

BUKU REFERENSI

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN TANTANGAN GLOBAL

Prof. Andrie Elia Embang, SE, M. Si



BUKU REFERENSI

PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN
TANTANGAN GLOBAL

Prof. Andrie Elia Embang, SE, M. Si



PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN TANTANGAN GLOBAL

Ditulis oleh:

Prof. Andrie Elia Embang, SE, M. Si

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7012-52-4
IV + 209 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Januari 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang tidak hanya membahas kelestarian lingkungan, tetapi juga mencakup ketidakseimbangan sosial dan ekonomi yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang. Dalam dunia yang terus berkembang, pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan menjadi semakin relevan untuk menangani krisis iklim, masalah ketimpangan sosial, dan disrupti teknologi. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang kolaboratif, lintas sektoral, dan global.

Buku referensi ini membahas pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya sebatas pembangunan ekonomi atau fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kultural. Perspektif sosiologi memberikan kerangka analisis yang memungkinkan untuk melihat dinamika sosial dan tantangan yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia. Dalam konteks ini, sosiologi menawarkan alat analisis untuk memahami bagaimana masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana kebijakan-kebijakan global disesuaikan pada tingkat lokal, serta bagaimana individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam upaya berkelanjutan.

Semoga buku referensi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan menjadi panduan bagi penelitian serta kebijakan-kebijakan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Salam hangat.

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I	PENDAHULUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	1
A.	Definisi dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan	1
B.	Sejarah Konsep Pembangunan Berkelanjutan	8
C.	Peran Sosiologi dalam Pembangunan Berkelanjutan	13
BAB II	TEORI SOSIOLOGI TENTANG PEMBANGUNAN. 19	
A.	Teori Modernisasi dan Dampaknya Terhadap Pembangunan.....	19
B.	Teori Ketergantungan dan Ketimpangan Global	29
C.	Teori Sistem Dunia dan Transformasi Sosial	45
BAB III	PILAR EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	51
A.	Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan	51
B.	Ekonomi Sirkular Sebagai Model Pembangunan	60
C.	Tantangan Ekonomi dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	70
BAB IV	PILAR SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	75
A.	Keadilan Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan	75
B.	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	79
C.	Pemberdayaan Komunitas untuk Kesejahteraan Berkelanjutan	83
BAB V	PILAR LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	87
A.	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.....	87

ii **Pembangunan Berkelanjutan**

B.	Perubahan Iklim dan Dampaknya Pada Pembangunan	91
C.	Kebijakan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	95
BAB VI	GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	99
A.	Dampak Globalisasi Pada Pembangunan Sosial.....	99
B.	Hubungan Antar Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	102
C.	Globalisasi Ekonomi dan Tantangan Lingkungan.....	106
BAB VII	KETIMPANGAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	111
A.	Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang.....	111
B.	Marginalisasi Kelompok Rentan dalam Proses Pembangunan.....	118
C.	Solusi untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial dalam Pembangunan.....	122
BAB VIII	PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	127
A.	Inovasi Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan...	127
B.	Teknologi Hijau dalam Ekonomi Sirkular.....	130
C.	Teknologi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Sosial	135
BAB IX	TANTANGAN GLOBAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	141
A.	Krisis Lingkungan Global dan Solusinya.....	141
B.	Ketimpangan Global dalam Sumber Daya dan Akses.....	145
C.	Ketahanan Sosial di Era Krisis Ekologi dan Ekonomi	148
BAB X	PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA.....	153
A.	Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia	153
B.	Tantangan Sosial-Ekonomi dalam Pembangunan Indonesia	157

- C. Studi Kasus: Proyek-Proyek Berkelanjutan di Indonesia 161

BAB XI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 163

- A. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan ... 163
- B. Kerangka Kebijakan untuk Ekonomi Berkelanjutan 167
- C. Kerjasama Multilateral dalam Implementasi Kebijakan . 170

BAB XII MASA DEPAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: HARAPAN DAN SOLUSI..... 175

- A. Proyeksi Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan 175
- B. Solusi Sosial dan Teknologi untuk Tantangan Global 180
- C. Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan 187

DAFTAR PUSTAKA 191

GLOSARIUM..... 201

INDEKS 203

BIOGRAFI PENULIS..... 207

SINOPSIS 209



BAB I

PENDAHULUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep penting yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Konsep ini menggabungkan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan keseimbangan dalam pembangunan. Fokus utamanya adalah pada penggunaan sumber daya secara efisien dan bijaksana, sambil menjaga kelestarian alam dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam implementasinya, pembangunan berkelanjutan mendorong inovasi dan perubahan kebijakan yang mendukung keberlanjutan jangka panjang. Tujuan akhirnya adalah menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan sehat untuk semua lapisan masyarakat di masa depan.

A. Definisi dan Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Dengan menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, serta ketimpangan sosial dan ekonomi, pembangunan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua.

1. Definisi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan. Salah satu prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab antar generasi dan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan pembangunan. Menurut Hall (2019), pembangunan berkelanjutan melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan untuk mencapai keseimbangan. Selain itu, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya perubahan pola konsumsi dan produksi untuk mengurangi degradasi lingkungan. Pendekatan ini juga menuntut integrasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap sumber daya alam.

Pada prakteknya, pembangunan berkelanjutan sering dihadapkan dengan tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi tanpa menimbulkan kerusakan ekosistem. Keberlanjutan lingkungan merupakan bagian yang sangat krusial dalam pembangunan ini, mengingat meningkatnya degradasi sumber daya alam akibat aktivitas manusia. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan jangka panjang dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, termasuk perubahan iklim dan polusi. Partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan secara efektif.

2. Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan merupakan panduan dalam mengelola sumber daya dan lingkungan secara bertanggung jawab guna memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya sendiri. Prinsip ini muncul dari kesadaran akan dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan ekonomi yang tidak terkendali, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan

lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang dapat dijelaskan secara rinci:

a. Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam. Prinsip ini menuntut agar aktivitas manusia, khususnya dalam pembangunan ekonomi, tidak menyebabkan kerusakan yang permanen pada sumber daya alam yang ada. Menurut Hens *et al.* (2020), keberlanjutan lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijak agar generasi mendatang tetap dapat menikmatinya. Fokus utama dari keberlanjutan lingkungan adalah menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi polusi, dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Selain itu, keberlanjutan lingkungan juga menekankan pentingnya penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon.

Penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan di berbagai sektor pembangunan memerlukan upaya yang signifikan, terutama dalam mengubah pola konsumsi dan produksi yang kurang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian harus dirancang sedemikian rupa agar tidak merusak ekosistem yang ada. Keberlanjutan lingkungan juga mencakup pengelolaan limbah yang efektif untuk mencegah pencemaran air, tanah, dan udara. Selain itu, rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian penting dari strategi menjaga keberlanjutan ekosistem. Pendekatan ini menuntut adanya kebijakan yang mendukung inovasi dalam teknologi ramah lingkungan serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan.

b. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya alam dengan cara yang lebih bijaksana dan produktif. Konsep ini menekankan

pentingnya mengurangi pemborosan sumber daya dalam proses produksi dan konsumsi, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut Roberts dan Jones (2019), efisiensi sumber daya berperan penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi, terutama dengan menurunkan penggunaan energi dan material per unit output. Dengan meningkatkan efisiensi, industri dapat mengurangi biaya produksi sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca dan pencemaran. Selain itu, efisiensi sumber daya juga berkaitan dengan penggunaan teknologi inovatif yang mendukung penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah secara lebih efektif. Upaya untuk meningkatkan efisiensi ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing ekonomi di berbagai sektor.

Penerapan prinsip efisiensi sumber daya dalam pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan dalam pola produksi dan konsumsi global. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui penerapan ekonomi sirkular, yang bertujuan untuk mendaur ulang material dan memperpanjang umur produk agar sumber daya dapat digunakan lebih lama. Hal ini tidak hanya mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru, tetapi juga mengurangi limbah dan polusi. Selain itu, efisiensi sumber daya juga dapat dicapai dengan mengurangi konsumsi energi dan air melalui teknologi ramah lingkungan, seperti sistem produksi bersih dan manajemen energi yang efisien. Inisiatif seperti ini berperan kunci dalam menurunkan tekanan terhadap ekosistem alam dan membantu menjaga keberlanjutan jangka panjang.

Gambar 1. *Sustainable Development Goals*



Sumber: *Dinas PMD Kalsel*

Di tingkat global, peningkatan efisiensi sumber daya juga terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pengelolaan air, energi, dan sumber daya alam lainnya. Negara-negara maju dan berkembang sama-sama didorong untuk mengadopsi kebijakan yang mendorong efisiensi ini agar dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang semakin langka. Edukasi dan partisipasi aktif dari masyarakat serta sektor swasta juga diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip ini diterapkan secara luas dan konsisten. Selain itu, kolaborasi internasional dalam pertukaran teknologi dan pengetahuan menjadi penting untuk mendorong penerapan efisiensi sumber daya di berbagai negara. Pada akhirnya, efisiensi sumber daya tidak hanya mendukung pelestarian lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

c. Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang bagi semua individu dalam masyarakat. Prinsip ini berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sering menjadi penghalang dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Ocampo (2020), keadilan sosial tidak hanya mencakup distribusi sumber daya yang adil, tetapi juga memastikan bahwa semua suara dalam masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan

keputusan. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, pembangunan berkelanjutan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Keadilan sosial juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan dan marjinal agar tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan. Pendekatan ini mendorong inklusi sosial yang lebih luas, memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dan merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Dengan cara ini, keadilan sosial menjadi landasan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Pada konteks pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak komunitas lokal atas sumber daya alam di wilayah, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang menjadi sumber kehidupan. Keadilan dalam pengelolaan sumber daya ini penting untuk menghindari konflik yang sering timbul akibat perebutan sumber daya. Selain itu, pendekatan yang adil dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar. Upaya untuk menciptakan keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil, diharapkan kesenjangan sosial dapat dikurangi, dan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan.

d. Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan. Prinsip ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inklusi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan dalam konteks pembangunan. Menurut Kauffman (2021), partisipasi publik tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkaya proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

dengan perspektif lokal yang lebih beragam. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat dapat berkontribusi dalam identifikasi masalah dan pengembangan solusi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan, sehingga lebih berkomitmen untuk menjaga dan melestarikannya. Oleh karena itu, strategi pembangunan berkelanjutan harus mencakup mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik secara efektif. Dengan memberdayakan masyarakat untuk terlibat, pembangunan dapat berlangsung lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan nyata.

Penerapan partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan membutuhkan pembentukan ruang yang aman dan inklusif bagi semua pihak untuk terlibat. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan platform yang memfasilitasi dialog antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui forum konsultasi, survei, dan diskusi kelompok terarah yang memungkinkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak orang dan mengumpulkan pendapatnya secara efisien. Partisipasi publik juga harus memperhatikan perbedaan gender, usia, dan latar belakang sosial untuk memastikan bahwa semua suara terdengar dan diakui. Ketika masyarakat merasa didengar dan terlibat, akan lebih termotivasi untuk berkontribusi pada keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

e. **Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan**

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah prinsip dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga melindungi lingkungan. Prinsip ini mengharuskan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Menurut Sachs (2019), "pertumbuhan ekonomi berkelanjutan memerlukan integrasi antara aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan untuk menciptakan nilai jangka panjang." Dengan cara ini, pembangunan ekonomi dapat berlangsung tanpa mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang. Pertumbuhan yang berkelanjutan juga memprioritaskan investasi dalam inovasi dan teknologi yang dapat membantu mengurangi emisi karbon serta meminimalkan limbah. Selain itu, menurut Faisal Asrawi *et al.* (2018) Keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana pertumbuhan ekonomi diharap mampu meningkatkan faktor-faktor produksi yang bertujuan merangsang perkembangan ekonomi dalam skala besar. Dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan. Ini mencakup perlunya insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja menjadi kunci dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perubahan yang disebabkan oleh transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, negara dapat memanfaatkan peluang baru yang muncul dari sektor ekonomi hijau. Implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan.

B. Sejarah Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu penting di arena global, mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat akan perlunya integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Sejak diperkenalkan dalam laporan

Brundtland pada tahun 1987, istilah ini tidak hanya menjadi landasan bagi kebijakan pembangunan di berbagai negara, tetapi juga memicu perdebatan dan tindakan kolektif di tingkat internasional. Melalui serangkaian perjanjian dan inisiatif global, termasuk Agenda 21 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), konsep ini berusaha untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Memahami sejarah dan perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang masih harus dihadapi dalam upaya menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kebutuhan manusia dan keberlangsungan lingkungan.

1. Definisi Awal

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan secara resmi dalam laporan yang diterbitkan oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1987. Definisi awalnya menekankan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ini menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, konsep ini membahas keterkaitan antara pembangunan dan keberlanjutan, di mana tindakan di satu sektor dapat memengaruhi sektor lainnya. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan mendorong pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan dan praktik.

Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan berkembang, mencakup berbagai dimensi dan pendekatan yang lebih holistik. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan isu-isu sosial dan lingkungan, termasuk kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat untuk merencanakan masa depan yang lebih baik tanpa merusak lingkungan yang ada. Hal ini juga menciptakan kesadaran bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, memiliki peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Pada akhirnya, definisi awal konsep pembangunan berkelanjutan menjadi fondasi bagi

berbagai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan bagi semua pihak.

2. Munculnya Agenda Global

Munculnya Agenda Global untuk pembangunan berkelanjutan ditandai dengan Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Konferensi ini merupakan momen penting yang mempertemukan negara-negara di seluruh dunia untuk membahas tantangan lingkungan dan pembangunan yang dihadapi umat manusia. Dalam konferensi tersebut, Agenda 21 disusun sebagai rencana aksi global yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan global. Agenda 21 mencakup berbagai isu, seperti pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya Agenda 21, setiap negara diharapkan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Setelah penerapan Agenda 21, perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan semakin meningkat, memicu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Konferensi Rio+10 yang diadakan di Johannesburg pada tahun 2002 memperkuat komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan melalui implementasi praktek-praktek berkelanjutan. Selanjutnya, Konferensi Rio+20 pada tahun 2012 menghasilkan dokumen hasil yang menegaskan kembali pentingnya pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kerangka untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi pada tahun 2015. Semua inisiatif ini menunjukkan bahwa agenda global untuk pembangunan berkelanjutan bukan hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan komitmen kolektif yang memerlukan tindakan nyata dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, munculnya agenda global menjadi pendorong utama dalam usaha menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh umat manusia.

3. Keterlibatan dalam Perjanjian Internasional

Keterlibatan dalam perjanjian internasional merupakan langkah krusial dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Sejak disepakatinya Agenda 21 pada tahun 1992, berbagai perjanjian dan konvensi telah dibentuk untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan sosial yang mendesak. Contohnya, Protokol Kyoto yang diadopsi pada tahun 1997 berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, dengan tujuan untuk menanggulangi perubahan iklim yang menjadi tantangan global. Selain itu, Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) juga merupakan platform penting bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Melalui perjanjian-perjanjian ini, negara-negara berkomitmen untuk mengambil tindakan yang konkret dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keterlibatan dalam perjanjian internasional tidak hanya mencerminkan komitmen negara-negara, tetapi juga memperkuat kerjasama global dalam menghadapi tantangan bersama. Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) pada tahun 2012 menjadi tonggak penting dalam menggalang dukungan internasional untuk menciptakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi pada tahun 2015. Dengan adanya SDGs, negara-negara diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perlindungan lingkungan. Keterlibatan dalam perjanjian internasional juga memungkinkan negara-negara untuk saling belajar dari praktik terbaik dan mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam konteks lokal. Oleh karena itu, perjanjian internasional berperan sebagai kerangka kerja yang penting untuk mendorong aksi kolektif dan memastikan keberlanjutan dalam pembangunan global.

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah kerangka global yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi oleh umat manusia. Ditetapkan pada tahun 2015 oleh PBB sebagai bagian dari Agenda 2030, SDGs terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait, mencakup aspek seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Setiap tujuan memiliki target yang spesifik dan terukur,

yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi semua orang di seluruh dunia. Dengan pendekatan yang holistik, SDGs mengajak semua negara, baik yang maju maupun berkembang, untuk berkomitmen dan berkolaborasi dalam mencapai target-target tersebut. Melalui SDGs, diharapkan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi, serta lingkungan dapat dilindungi untuk generasi mendatang.

Implementasi SDGs memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Setiap negara diharapkan untuk mengadaptasi tujuan-tujuan ini sesuai dengan konteks lokal dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan nasional. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan kemajuan yang dicapai dan untuk mengidentifikasi tantangan yang masih ada. SDGs juga mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor, yang memungkinkan solusi yang lebih efektif untuk masalah yang kompleks dan saling terkait. Dengan demikian, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bukan hanya sekadar daftar target, tetapi juga merupakan panggilan untuk aksi global menuju dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi semua.

5. Implementasi dan Tantangan

Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di berbagai negara menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Meskipun telah ada komitmen global, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai SDGs masih bervariasi, yang mengakibatkan kurangnya dukungan yang kuat dari semua lapisan masyarakat. Selain itu, sumber daya yang terbatas, baik finansial maupun manusia, seringkali menjadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai target-target tersebut. Koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan juga menjadi tantangan, karena keberhasilan implementasi SDGs memerlukan kerjasama lintas sektor yang efektif. Tanpa adanya sinergi yang baik, upaya untuk mencapai SDGs dapat terhambat dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Tantangan struktural seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta perubahan iklim, semakin memperumit implementasi SDGs. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi lebih banyak kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai target-

target pembangunan, terutama di tengah krisis global yang berkepanjangan. Selain itu, konflik dan ketidakstabilan politik di beberapa wilayah juga mengganggu upaya pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, di mana semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan bahwa implementasi SDGs dapat berjalan lebih lancar dan mencapai dampak yang signifikan bagi pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

C. Peran Sosiologi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sosiologi, sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada pemahaman interaksi sosial, struktur masyarakat, dan dinamika kelompok, memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena ia tidak hanya membantu dalam menganalisis bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi, tetapi juga memberikan wawasan yang diperlukan untuk merumuskan strategi pembangunan yang inklusif dan adil, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa mengorbankan kualitas lingkungan yang menjadi dasar keberlanjutan bagi generasi mendatang. Berikut adalah beberapa peran sosiologi dalam pembangunan berkelanjutan:

1. Memahami Dinamika Sosial

Memahami dinamika sosial merupakan salah satu peran penting sosiologi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam proses pembangunan, faktor-faktor sosial seperti budaya, nilai, dan interaksi masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program-program pembangunan. Sosiologi membantu dalam menganalisis bagaimana perubahan sosial terjadi dan bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Pemahaman terhadap dinamika ini memungkinkan pengambil keputusan untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Pahlawan (2020), “Sosiologi memberikan kerangka untuk memahami interaksi sosial yang

kompleks, yang penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.” Oleh karena itu, sosiologi tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga sebagai panduan dalam merancang intervensi sosial yang berkelanjutan. Dengan memahami dinamika sosial, pembangunan dapat dilakukan secara lebih adil dan merata, menciptakan manfaat bagi semua pihak.

Pada konteks pembangunan berkelanjutan, sosiologi berperan dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin terpinggirkan dalam proses pembangunan. Analisis sosiologis terhadap struktur sosial dan hubungan antarindividu atau kelompok memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan. Selain itu, pendekatan sosiologis juga penting dalam memahami konflik sosial yang mungkin muncul akibat kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan kepentingan lokal. Dengan memanfaatkan perspektif sosiologis, program-program pembangunan dapat disesuaikan agar lebih sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Hal ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan mengurangi potensi konflik di masyarakat. Dengan demikian, sosiologi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara teori dan praktik dalam pembangunan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip sosiologis membantu memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan.

2. Mendukung Partisipasi Masyarakat

Mendukung partisipasi masyarakat adalah salah satu peran krusial sosiologi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Melalui pemahaman tentang struktur sosial dan dinamika interaksi dalam komunitas, sosiologi dapat membantu merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan keberhasilan proyek, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab sosial. Menurut Fathoni (2021), “Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan merupakan elemen vital yang memungkinkan terciptanya program yang relevan dan berkelanjutan.” Dengan melibatkan masyarakat, program-program pembangunan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan mengurangi risiko konflik. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

sumber daya. Oleh karena itu, sosiologi berfungsi sebagai alat untuk memahami dan mendorong partisipasi masyarakat yang bermakna.

Partisipasi masyarakat yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai, norma, dan budaya yang ada dalam komunitas. Sosiologi menyediakan kerangka untuk menganalisis faktor-faktor ini, sehingga pengambil kebijakan dapat merancang pendekatan yang sesuai. Misalnya, melalui dialog yang melibatkan masyarakat, sosiolog dapat membantu menciptakan platform bagi suara-suara yang kurang terwakili untuk didengar. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menciptakan ruang untuk kolaborasi yang nyata. Selain itu, mendukung partisipasi masyarakat dapat memperkuat jejaring sosial dan solidaritas dalam komunitas. Dengan membangun hubungan yang kuat antaranggota masyarakat, pengembangan inisiatif lokal menjadi lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, peran sosiologi dalam mendukung partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Analisis Kesejahteraan Sosial

Analisis kesejahteraan sosial merupakan salah satu peran penting sosiologi dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan sosiologis, analisis ini tidak hanya mengukur aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, sosiologi dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan oleh Rachmawati (2022), “Analisis kesejahteraan sosial memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana struktur sosial dan ekonomi berinteraksi, sehingga memungkinkan identifikasi tantangan dan peluang dalam pembangunan berkelanjutan.” Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, sosiologi berperan dalam memberikan kerangka kerja untuk evaluasi yang lebih holistik terhadap kebijakan dan program pembangunan. Pemahaman yang lebih baik tentang kesejahteraan sosial ini dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata.

Analisis kesejahteraan sosial juga memungkinkan identifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

Sosiologi dapat menganalisis berbagai indikator kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar, untuk menentukan di mana intervensi paling dibutuhkan. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, sosiologi membantu dalam merancang program yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, menjadi kunci untuk menciptakan solusi yang efektif. Selain itu, analisis ini juga berfungsi sebagai alat pemantauan untuk mengevaluasi dampak kebijakan yang diterapkan. Melalui analisis yang sistematis, sosiologi memberikan informasi yang diperlukan untuk menyesuaikan strategi pembangunan sesuai dengan dinamika yang terjadi. Oleh karena itu, peran sosiologi dalam analisis kesejahteraan sosial sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Pengembangan Kebudayaan Berkelanjutan

Pengembangan kebudayaan berkelanjutan merupakan salah satu peran penting sosiologi dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Sosiologi membantu dalam memahami bagaimana kebudayaan dan tradisi lokal dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial dan identitas komunitas. Dengan menggali dan melestarikan warisan budaya, sosiologi memberikan pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan. Seperti yang dinyatakan oleh Nursanti (2020), “Kebudayaan yang berkelanjutan adalah pondasi bagi masyarakat untuk membangun identitas, meningkatkan keterlibatan sosial, dan mendukung pembangunan yang inklusif.” Oleh karena itu, pengembangan kebudayaan berkelanjutan bukan hanya soal pelestarian, tetapi juga tentang adaptasi dan inovasi dalam menghadapi tantangan modern. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat menciptakan solusi yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga menghasilkan hasil pembangunan yang lebih efektif. Dengan demikian, sosiologi berperan dalam menciptakan dialog antara tradisi dan modernitas dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

Sosiologi juga berfungsi untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebudayaan berkelanjutan. Dengan memahami dinamika sosial dan hubungan antarindividu dalam komunitas, sosiologi dapat merancang program yang mendorong

partisipasi aktif masyarakat. Melalui kegiatan budaya, masyarakat dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik yang mendukung keberlanjutan. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat rasa memiliki, tetapi juga menciptakan solidaritas sosial yang penting dalam menghadapi tantangan pembangunan. Selain itu, pengembangan kebudayaan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dapat menjadi sumber daya yang strategis dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, sosiologi berperan sebagai pendorong bagi masyarakat untuk melihat kebudayaan sebagai aset yang berharga dalam proses pembangunan.

5. Penelitian dan Evaluasi Program

Penelitian dan evaluasi program merupakan aspek penting dari peran sosiologi dalam pembangunan berkelanjutan. Sosiologi berkontribusi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan dengan pendekatan yang berbasis pada data sosial. Melalui penelitian, sosiolog dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memahami konteks sosial, serta mengevaluasi dampak dari kebijakan dan program yang telah diimplementasikan. Seperti yang dikemukakan oleh Supriyadi (2021), “Penelitian sosiologis memberikan wawasan kritis yang diperlukan untuk menilai efektivitas program pembangunan dan memastikan bahwa program tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” Dengan adanya penelitian yang sistematis, program-program dapat disesuaikan agar lebih relevan dan efektif dalam menjawab tantangan yang ada. Hal ini juga memastikan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi, yang penting untuk menciptakan rasa memiliki terhadap program. Oleh karena itu, peran sosiologi dalam penelitian dan evaluasi program sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada konteks evaluasi, sosiologi memberikan kerangka kerja untuk mengukur hasil dan dampak program secara holistik. Evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga pada kualitatif, yang meliputi perubahan dalam perilaku, norma, dan nilai sosial masyarakat. Dengan demikian, sosiologi dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Selain itu, pendekatan sosiologis dalam evaluasi juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk

masyarakat, dalam proses penilaian. Keterlibatan ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program. Dengan informasi yang diperoleh dari evaluasi, pengambil keputusan dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



BAB II

TEORI SOSIOLOGI TENTANG PEMBANGUNAN

Teori sosiologi tentang pembangunan merupakan kajian yang membahas bagaimana proses sosial, ekonomi, dan politik saling berinteraksi dalam menciptakan perubahan di masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya dipandang dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perspektif kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Berbagai teori, seperti modernisasi, dependen, dan post-kolonial, memberikan kerangka untuk memahami dinamika pembangunan di negara-negara berkembang. Proses pembangunan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, struktur sosial, dan sejarah, yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kemajuan. Dengan demikian, teori sosiologi tentang pembangunan memberikan wawasan penting untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

A. Teori Modernisasi dan Dampaknya Terhadap Pembangunan

Teori modernisasi merupakan sebuah pendekatan yang mendalami proses transformasi masyarakat dari kondisi tradisional menuju modern, yang dipicu oleh kemajuan teknologi, industrialisasi, dan perubahan sosial. Dalam konteks global yang semakin kompleks, teori ini menawarkan pemahaman tentang bagaimana perubahan dalam nilai, norma, dan struktur sosial dapat mempengaruhi dinamika pembangunan ekonomi dan politik di berbagai negara. Meskipun seringkali dihadapkan pada kritik, dampak teori modernisasi terhadap pembangunan tetap menjadi topik penting yang layak untuk diteliti, mengingat implikasinya yang luas terhadap masyarakat di seluruh dunia.

1. Konsep Utama Teori Modernisasi

Teori modernisasi merupakan kerangka kerja yang mencoba memahami proses transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh masyarakat saat beralih dari kondisi tradisional ke modern. Berikut adalah beberapa konsep utama dari teori modernisasi yang sering dibahas dalam kajian pembangunan.

a. Transisi dari Tradisional ke Modern

Transisi dari tradisional ke modern merupakan konsep utama dalam teori modernisasi yang sering dibahas dalam kajian pembangunan. Proses ini menggambarkan pergeseran masyarakat dari struktur sosial dan ekonomi yang agraris dan statis menuju struktur yang lebih dinamis dan industri. Dalam konteks ini, modernisasi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perubahan dalam nilai-nilai, norma, dan institusi sosial. Masyarakat yang mengalami modernisasi cenderung mengadopsi teknologi baru, pola perilaku yang lebih rasional, serta sistem pendidikan yang lebih formal. Menurut Inglehart dan Welzel (2018), "modernisasi mengarah pada peningkatan kesadaran individu dan pergeseran dari nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai yang lebih individualis dan rasional." Pergeseran ini dapat terlihat dari perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap gender, keluarga, dan politik. Transisi ini tidak bersifat linier dan dapat berbeda-beda di setiap negara atau wilayah. Beberapa negara mungkin mengalami modernisasi yang cepat, sementara yang lain mengalami transisi yang lebih lambat dan tertahan oleh faktor-faktor tertentu, seperti budaya, politik, dan ekonomi. Dampak dari modernisasi ini juga dapat menimbulkan ketegangan sosial, di mana nilai-nilai tradisional bertabrakan dengan nilai-nilai modern. Oleh karena itu, dalam kajian pembangunan, penting untuk membahas bagaimana transisi ini terjadi dan apa saja tantangan yang dihadapi. Masyarakat yang berhasil beradaptasi dengan perubahan ini akan lebih mampu menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang muncul.

b. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan konsep utama dalam teori modernisasi yang sering dibahas dalam kajian pembangunan. Konsep ini merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan

dalam struktur ekonomi suatu negara, yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya ditandai oleh peningkatan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti distribusi pendapatan yang lebih adil dan peningkatan kualitas hidup. Menurut Todaro dan Smith (2020), "pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktural dalam masyarakat dan ekonomi untuk menciptakan peluang yang lebih baik bagi semua." Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus bersifat inklusif, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasilnya.

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi adalah ketidakmerataan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di banyak negara, pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan sering kali tertinggal dalam hal akses terhadap sumber daya dan layanan dasar. Ini menciptakan kesenjangan yang bisa berujung pada konflik sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan pembangunan untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat di semua lapisan, terutama yang berada di daerah terpencil. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa tenaga kerja siap menghadapi perubahan yang dihasilkan oleh pembangunan ekonomi.

c. Peran Teknologi

Peran teknologi sebagai konsep utama dalam teori modernisasi sangat krusial dalam memahami dinamika perubahan sosial dan ekonomi. Teknologi dianggap sebagai pendorong utama yang memungkinkan transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Inovasi teknologi tidak hanya mempengaruhi produktivitas industri, tetapi juga cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Menurut Gerschenkron (2019), "teknologi modern bukan hanya alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengubah struktur sosial dan pola perilaku masyarakat." Ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki dampak yang mendalam pada cara individu dan kelompok berfungsi dalam masyarakat.

Teknologi juga berperan dalam mengurangi kesenjangan akses terhadap sumber daya. Dengan kemajuan digital, misalnya, informasi dan layanan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk yang sebelumnya terpinggirkan. Hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih besar dalam proses pembangunan, sehingga memperkuat struktur sosial. Namun, pergeseran ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti risiko ketidaksetaraan digital yang dapat memperlebar jurang antara yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara inklusif dan bertanggung jawab dalam konteks pembangunan.

d. Politik dan Struktur Sosial

Politik dan struktur sosial adalah konsep utama dalam teori modernisasi yang berperan penting dalam proses pembangunan suatu masyarakat. Dalam konteks modernisasi, perubahan politik sering kali beriringan dengan transformasi struktur sosial, yang mencakup pergeseran dari masyarakat tradisional yang hierarkis ke masyarakat yang lebih egaliter dan demokratis. Proses ini menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat legitimasi pemerintah. Menurut Lipset (2018), "demokrasi yang mapan bergantung pada adanya struktur sosial yang mendukung, termasuk kelas menengah yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif." Dengan demikian, politik dan struktur sosial saling memengaruhi dan berkontribusi pada kemajuan pembangunan.

Ketidakstabilan politik dapat menghambat proses modernisasi dan mengakibatkan stagnasi sosial dan ekonomi. Ketika struktur sosial terfragmentasi dan konflik terjadi, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, sehingga memperlemah legitimasi pemerintahan. Dalam konteks ini, penting untuk membangun konsensus sosial yang memungkinkan kerjasama antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Strategi pembangunan yang inklusif, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, menjadi krusial untuk menciptakan stabilitas politik dan mempercepat proses modernisasi. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang hubungan antara politik dan

struktur sosial akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

e. Globalisasi

Globalisasi merupakan konsep utama dalam teori modernisasi yang berperan penting dalam membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Proses ini mengacu pada peningkatan interkoneksi dan interdependensi antarnegara melalui perdagangan, teknologi, dan komunikasi. Globalisasi memungkinkan pertukaran ide, barang, dan layanan secara cepat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Menurut Giddens (2019), "globalisasi mengubah cara kita memahami waktu dan ruang, sehingga memfasilitasi hubungan yang lebih erat antara individu dan komunitas di seluruh dunia." Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat bahwa globalisasi tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga tantangan baru bagi masyarakat yang harus dihadapi.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam era globalisasi adalah ketidakmerataan distribusi manfaat. Meskipun globalisasi membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tidak semua negara dan kelompok sosial merasakan dampaknya secara merata. Ketidaksetaraan ini sering kali menciptakan ketegangan sosial dan konflik, di mana kelompok yang tertinggal merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil agar semua lapisan masyarakat dapat mengambil bagian dalam keuntungan yang dihasilkan oleh globalisasi. Pendekatan ini akan memastikan bahwa proses modernisasi berlangsung secara berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Dampak Teori Modernisasi terhadap Pembangunan

Teori modernisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan di berbagai negara, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dampak-dampak ini dapat dilihat dari berbagai perspektif dan sering kali menciptakan hasil yang kompleks. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai dampak teori modernisasi terhadap pembangunan.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hasil yang penting dari teori modernisasi dalam konteks pembangunan. Teori ini menekankan bahwa negara yang mengadopsi teknologi dan praktik ekonomi modern akan mengalami peningkatan produktivitas dan pertumbuhan yang signifikan. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai indikator keberhasilan suatu negara dalam bertransformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Modernisasi menciptakan peluang untuk investasi dan inovasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, pemerintah memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Stiglitz (2019), "Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya memicu peningkatan pendapatan tetapi juga memperkuat kerangka sosial yang mendukung perkembangan berkelanjutan."

Pertumbuhan ekonomi juga dapat mendorong peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ketika suatu negara mengalami pertumbuhan, lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk sektor-sektor penting ini, yang selanjutnya meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan tenaga kerja yang lebih terdidik dan sehat, produktivitas nasional akan semakin meningkat, menciptakan siklus positif bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, keberhasilan pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, teori modernisasi menyarankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi kunci untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang didasarkan pada prinsip modernisasi harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan secara holistik.

b. Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan salah satu dampak signifikan dari teori modernisasi dalam konteks pembangunan. Teori ini

menyatakan bahwa transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga transformasi dalam struktur sosial dan budaya. Ketika masyarakat mengadopsi nilai-nilai modern, terjadi perubahan dalam interaksi sosial, norma, dan cara berpikir individu. Proses ini seringkali memunculkan perubahan dalam peran gender, keluarga, dan komunitas, yang selanjutnya membentuk pola kehidupan baru. Dalam banyak kasus, modernisasi mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap pendidikan, teknologi, dan ide-ide baru, yang merupakan pendorong utama bagi perubahan sosial. Seperti yang dinyatakan oleh Inglehart dan Welzel (2020), “Perubahan dalam nilai-nilai sosial adalah indikator penting dari kemajuan menuju masyarakat yang lebih modern dan demokratis.”

Perubahan sosial yang dihasilkan dari modernisasi sering kali mengarah pada peningkatan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat. Ketika individu mulai menyadari hak dan tanggung jawab, menjadi lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini berkontribusi pada penguatan demokrasi dan pemerintahan yang lebih transparan. Selain itu, dengan adanya akses informasi yang lebih baik melalui teknologi, masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Perubahan sosial ini menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas, yang pada gilirannya mempercepat proses pembangunan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengelola konflik yang muncul akibat pergeseran nilai dan norma yang cepat dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif untuk mengatasi perbedaan yang mungkin timbul.

c. Urbanisasi

Urbanisasi merupakan salah satu dampak signifikan dari teori modernisasi dalam konteks pembangunan. Teori modernisasi menekankan bahwa pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan urban akan membawa perubahan struktural yang besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Proses urbanisasi biasanya ditandai dengan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota-kota besar, yang terjadi

seiring dengan perkembangan industri dan peningkatan peluang kerja. Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah penduduk di kota, tetapi juga mendorong pertumbuhan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, urbanisasi sering kali membawa perubahan dalam pola kehidupan, termasuk perubahan dalam cara berinteraksi sosial dan pembentukan komunitas baru. Menurut Jaramillo (2022), “Urbanisasi adalah indikator penting dari kemajuan ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, dari pekerjaan hingga kesehatan.” Urbanisasi dapat menjadi katalisator bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika populasi kota meningkat, begitu juga dengan permintaan terhadap berbagai layanan dan produk, yang pada gilirannya mendorong investasi dan inovasi di sektor-sektor baru. Namun, urbanisasi yang cepat juga menghadirkan tantangan serius, seperti kemacetan, polusi, dan masalah perumahan. Dalam banyak kasus, pemerintah kota harus menghadapi kesenjangan antara permintaan infrastruktur dan kapasitas yang ada, yang dapat memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.

Gambar 2. Urbanisasi



Sumber: *Kompasiana*

Urbanisasi memiliki dampak langsung terhadap perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Saat penduduk berpindah ke kota,

membawa nilai-nilai dan tradisi yang berbeda, yang dapat menyebabkan pertukaran budaya yang dinamis. Ini berpotensi memperkaya kehidupan sosial di kota, tetapi juga dapat menyebabkan konflik dan tantangan dalam menjaga identitas budaya. Perubahan ini juga menciptakan peluang bagi masyarakat untuk beradaptasi dan menciptakan cara hidup baru yang lebih modern dan progresif. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal agar tidak terjadi hilangnya identitas masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan kota menjadi sangat penting. Dengan melibatkan warga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, urbanisasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

d. Keterhubungan Global

Keterhubungan global adalah salah satu dampak yang signifikan dari teori modernisasi terhadap pembangunan. Proses modernisasi mendorong integrasi ekonomi, budaya, dan sosial di seluruh dunia, sehingga memfasilitasi pertukaran informasi, barang, dan jasa antar negara. Dengan adanya teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, batas-batas geografis menjadi semakin tidak relevan. Keterhubungan ini menciptakan peluang bagi negara-negara untuk saling berkolaborasi dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, pendidikan, dan penelitian. Selain itu, keterhubungan global juga memungkinkan transfer teknologi dan inovasi yang dapat mempercepat proses pembangunan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ghemawat (2019), “Keterhubungan global mengubah cara kita memandang dan memahami ekonomi, dengan menciptakan jaringan yang saling bergantung dan memberi peluang baru bagi pertumbuhan.”

Keterhubungan global memberikan akses yang lebih besar kepada negara-negara berkembang terhadap pasar internasional. Negara-negara ini dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki dan menjalin hubungan dengan investor asing untuk meningkatkan kapasitas produksi. Di sisi lain, partisipasi dalam ekonomi global juga membawa tantangan, seperti persaingan yang ketat dan ketergantungan pada pasar luar negeri. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengembangkan

kebijakan yang dapat memaksimalkan manfaat dari keterhubungan ini, sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin muncul. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang yang ada. Keterhubungan global tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pertukaran budaya dan pemahaman antar masyarakat. Dengan demikian, hubungan yang lebih erat antar negara dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis.

e. Tantangan dan Kritik

Tantangan dan kritik terhadap teori modernisasi menjadi sorotan penting dalam diskusi tentang pembangunan. Meskipun teori ini menawarkan pandangan tentang kemajuan dan transformasi sosial, ia juga sering dianggap terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan kompleksitas konteks lokal. Banyak kritik menganggap bahwa modernisasi mengabaikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di masyarakat, menyebabkan hilangnya identitas lokal. Selain itu, modernisasi sering kali menghasilkan kesenjangan yang lebih besar antara yang kaya dan yang miskin, karena tidak semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari proses ini. Sebagai contoh, tidak jarang masyarakat yang terpinggirkan justru mengalami eksploitasi dalam upaya mengejar modernitas. Seperti yang dinyatakan oleh Escobar (2020), "Modernisasi sering kali dianggap sebagai solusi universal, tetapi pada kenyataannya, ia sering menciptakan lebih banyak masalah daripada yang diselesaikannya."

Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang berusaha mengadopsi model modernisasi sering kali melibatkan keterbatasan sumber daya dan kapasitas institusi. Negara-negara berkembang yang berusaha untuk mengikuti jejak negara maju seringkali tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung perubahan yang diperlukan. Ketidakmampuan untuk mengelola perubahan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Selain itu, pendekatan yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dapat mengabaikan aspek-aspek lain yang penting, seperti kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, perlu ada refleksi kritis terhadap bagaimana proses modernisasi dapat dilakukan secara lebih

inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perdebatan tentang modernisasi harus melibatkan suara dan perspektif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang terdampak. Dengan cara ini, tantangan yang ada dapat diidentifikasi dan diatasi secara lebih efektif.

B. Teori Ketergantungan dan Ketimpangan Global

Teori Ketergantungan dan Ketimpangan Global adalah dua konsep penting dalam memahami dinamika pembangunan berkelanjutan. Teori ini berfokus pada bagaimana struktur ekonomi global dan ketidaksetaraan antara negara memengaruhi proses pembangunan di negara-negara berkembang. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai kedua teori ini dan bagaimana berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan:

1. Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan adalah sebuah kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam konteks pembangunan ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa negara-negara berkembang terjebak dalam siklus ketergantungan yang menghalanginya untuk mencapai kemandirian ekonomi. Ketergantungan ini sering kali terjadi karena struktur ekonomi global yang tidak seimbang, di mana negara-negara berkembang berfungsi sebagai penyedia bahan mentah dan pasar untuk produk-produk negara maju. Konsekuensinya, sumber daya alam dan manusia di negara-negara tersebut dieksploitasi, sementara manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh negara-negara maju. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, teori ini membahas perlunya transformasi struktur ekonomi global agar negara-negara berkembang dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari sumber daya yang dimiliki. Menurut Dos Santos (2020), "Ketergantungan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan politik yang berkontribusi pada ketidakadilan global." Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan berkeadilan sangat penting dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan di negara-negara berkembang.

Pada rangka mencapai pembangunan berkelanjutan, negara-negara berkembang perlu mengurangi ketergantungan melalui

penguatan kapasitas lokal dan diversifikasi ekonomi. Hal ini mencakup pengembangan industri lokal dan inovasi yang dapat menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang ada. Selain itu, kebijakan perdagangan internasional harus dirancang untuk memberikan akses yang lebih baik bagi negara-negara berkembang ke pasar global. Meningkatkan kerjasama internasional dan menciptakan kebijakan yang adil akan membantu mengurangi kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang. Pembangunan berkelanjutan harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang berkelanjutan akan bergantung pada kemampuan negara-negara berkembang untuk membangun kemandirian dan beradaptasi dengan dinamika global yang berubah. Dengan mengatasi ketergantungan, negara-negara dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Karakteristik

Karakteristik Teori Ketergantungan menjelaskan dinamika kompleks antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam konteks pembangunan ekonomi. Teori ini membahas hubungan tidak seimbang yang menghasilkan ketergantungan, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari Teori Ketergantungan:

1) Hubungan Ekonomi yang Tidak Seimbang

Teori Ketergantungan menjelaskan hubungan ekonomi yang tidak seimbang antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Dalam konteks ini, negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam siklus ketergantungan yang menyulitkannya untuk mencapai kemajuan ekonomi yang mandiri. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara berkembang sering dieksploitasi oleh negara maju, yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi pihak yang lebih kuat. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang sistematis dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Seperti yang dijelaskan oleh Cohn (2022), "Negara-negara berkembang sering menjadi sumber daya

bagi negara-negara maju, tetapi hasil dari eksploitasi ini tidak pernah dikembalikan secara adil kepada negara yang bersangkutan."

Pada sistem ekonomi global saat ini, ketergantungan ekonomi menjadi semakin terlihat melalui hubungan perdagangan yang tidak seimbang. Negara-negara maju memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan syarat perdagangan yang merugikan negara-negara berkembang. Akibatnya, negara-negara berkembang sering kali mengalami defisit perdagangan, di mana impor melebihi ekspor, yang mengakibatkan penurunan cadangan devisa dan stabilitas ekonomi. Ketidakstabilan ini sering kali diperburuk oleh kebijakan luar negeri negara-negara maju yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan ekonomi yang tidak seimbang ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga isu sosial dan politik yang kompleks.

2) Eksploitasi Sumber Daya

Eksploitasi sumber daya merupakan karakteristik utama dari Teori Ketergantungan yang menunjukkan bagaimana negara-negara maju mengambil keuntungan dari sumber daya alam negara-negara berkembang. Proses ini sering kali dilakukan melalui perusahaan multinasional yang berinvestasi di sektor-sektor strategis, seperti pertambangan dan perkebunan. Negara-negara berkembang, yang biasanya memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah, sering kali tidak mendapatkan manfaat yang setara dari eksploitasi ini. Hasil dari eksploitasi tersebut sering kali dibawa kembali ke negara asal perusahaan, sementara penduduk lokal tidak merasakan dampak positif yang signifikan. Seperti yang dikemukakan oleh Moyo (2020), "Eksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang tidak hanya merampas keuntungan ekonomi tetapi juga menghancurkan lingkungan dan sosial masyarakat."

Eksploitasi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Penambangan dan pengambilan sumber daya alam sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak

jangka panjang terhadap ekosistem lokal. Hal ini menyebabkan hilangnya biodiversitas, pencemaran air, dan kerusakan tanah, yang pada gilirannya mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Selain itu, praktik eksploitasi sering kali disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perampasan tanah dan ketidakadilan sosial. Dengan kata lain, ketergantungan pada eksploitasi sumber daya memperburuk ketidaksetaraan dan memperdalam masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.

3) Ketidakadilan Sosial

Ketidakadilan sosial merupakan karakteristik utama dari Teori Ketergantungan yang mencerminkan bagaimana struktur ekonomi global mempengaruhi distribusi kekayaan dan sumber daya. Dalam konteks ini, negara-negara maju sering kali memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya dan pasar, sementara negara-negara berkembang terjebak dalam posisi yang merugikan. Ketidakadilan ini terlihat jelas dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Masyarakat di negara-negara berkembang sering kali mengalami marginalisasi, di mana tidak mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi yang terjadi di negaranya sendiri. Menurut Sunkel (2021), "Ketidakadilan sosial yang dihasilkan oleh ketergantungan ekonomi menciptakan kondisi di mana masyarakat lokal tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya."

Kondisi ketidakadilan sosial ini diperburuk oleh kebijakan ekonomi yang dirancang untuk kepentingan negara-negara maju. Misalnya, negara-negara maju sering menetapkan syarat dan regulasi perdagangan yang lebih menguntungkan, yang mengakibatkan keterbatasan bagi negara-negara berkembang untuk bersaing secara adil di pasar global. Akibatnya, masyarakat di negara-negara berkembang terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakpastian yang berkepanjangan. Ketidakadilan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia dan

martabat individu. Masyarakat yang terpinggirkan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

4) Ketergantungan Struktural

Ketergantungan struktural merupakan karakteristik utama dari Teori Ketergantungan yang menggambarkan hubungan ekonomi yang timpang antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Dalam struktur ini, negara-negara berkembang sering kali terjebak dalam posisi yang bergantung pada negara maju untuk perdagangan, teknologi, dan investasi. Ketergantungan ini menciptakan pola yang menguntungkan negara maju, yang memiliki kontrol lebih besar terhadap sumber daya dan pasar global. Sebagai hasilnya, negara-negara berkembang sering kali mengalami hambatan dalam pengembangan industri lokal dan kapasitas untuk berkompetisi secara mandiri. Seperti yang dijelaskan oleh Mistral (2019), "Ketergantungan struktural menciptakan kondisi di mana negara-negara berkembang tidak mampu mengembangkan kemampuan untuk memproduksi dan mengelola sumber dayanya sendiri."

Pada konteks ketergantungan struktural, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara maju sering kali memperkuat posisi dominasi. Negara-negara maju cenderung mengadopsi kebijakan perdagangan yang tidak adil, yang lebih menguntungkan produk dan jasanya dibandingkan dengan produk dari negara berkembang. Hal ini mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan memperburuk kemiskinan di negara-negara yang terperangkap dalam ketergantungan tersebut. Ketergantungan struktural ini menciptakan siklus di mana negara-negara berkembang terus mengandalkan ekspor bahan mentah, sementara negara maju mendapatkan keuntungan dari nilai tambah yang dihasilkan. Oleh karena itu, masalah ini tidak hanya ekonomis, tetapi juga bersifat politik dan sosial, menghalangi kemajuan yang lebih luas di negara-negara berkembang.

b. Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan

Teori Ketergantungan memiliki implikasi signifikan terhadap pendekatan dan strategi yang diambil untuk mencapai

pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Implikasi ini berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana ketergantungan ekonomi dan sosial mempengaruhi potensi pembangunan suatu negara. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai implikasi Teori Ketergantungan bagi pembangunan berkelanjutan:

1) Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi merupakan konsep penting yang muncul dalam konteks teori ketergantungan, di mana negara-negara berkembang diharapkan untuk membangun kapasitas ekonomi yang mandiri sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan. Teori ketergantungan menunjukkan bahwa negara-negara ini sering terjebak dalam hubungan ekonomi yang tidak seimbang dengan negara-negara maju, yang mengakibatkan ketergantungan pada bantuan luar dan pasar internasional. Untuk mencapai kemandirian ekonomi, negara-negara berkembang perlu mengembangkan sumber daya lokal, memfokuskan pada produksi domestik, dan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif. Kemandirian ini bukan hanya memberikan stabilitas ekonomi tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, karena pendekatan lokal sering kali lebih memperhatikan keberlanjutan sumber daya. Seperti yang dinyatakan oleh Koutouan (2021), "Kemandirian ekonomi adalah prasyarat untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi yang terintegrasi."

Dengan mendorong kemandirian ekonomi, negara-negara berkembang dapat meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi pasar global dan tekanan eksternal. Melalui penguatan kapasitas lokal, seperti pengembangan teknologi dan inovasi, ekonomi dapat lebih mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, program-program pengembangan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab, negara-negara ini dapat menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang

menekankan pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang layak.

2) Reformasi Struktur Ekonomi Global

Reformasi struktur ekonomi global merupakan respons penting terhadap ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dihasilkan dari sistem ekonomi saat ini, yang dianalisis melalui lensa teori ketergantungan. Teori ini menunjukkan bahwa negara-negara berkembang sering terjebak dalam hubungan ekonomi yang tidak seimbang, di mana bergantung pada ekspor sumber daya dan impor barang-barang bernilai tambah. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan reformasi yang memungkinkan redistribusi kekayaan dan penguatan ekonomi lokal. Dengan meningkatkan akses ke pasar global dan memberikan dukungan kepada industri domestik, negara-negara berkembang dapat memperbaiki posisi tawar dalam ekonomi internasional. Menurut Rueda (2022), "Reformasi struktur ekonomi global harus mengedepankan keadilan dan keberlanjutan agar negara-negara berkembang dapat melepaskan diri dari jeratan ketergantungan yang merugikan."

Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah penguatan kerjasama internasional yang adil dan berkelanjutan. Negara-negara harus bekerja sama untuk menciptakan kesepakatan perdagangan yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya negara-negara maju. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terwujud akses yang lebih baik bagi produk-produk dari negara berkembang ke pasar global. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dan teknologi di negara-negara berkembang akan meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Reformasi ini tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

3) Penguatan Kapasitas Lokal

Penguatan kapasitas lokal merupakan salah satu implikasi kunci dari teori ketergantungan yang penting untuk

mencapai pembangunan berkelanjutan. Teori ini menekankan bahwa negara-negara berkembang seringkali terjebak dalam pola ketergantungan ekonomi yang merugikan, di mana sumber dayanya dieksploitasi untuk kepentingan negara maju. Dengan meningkatkan kapasitas lokal, negara-negara ini dapat mengurangi ketergantungan dan membangun ekonomi yang lebih mandiri. Hal ini mencakup pengembangan keterampilan, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung industri lokal dan meningkatkan daya saing. Menurut Duflo (2020), "Penguatan kapasitas lokal tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat terhadap guncangan eksternal."

Penguatan kapasitas lokal juga berperan dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal, kebijakan pembangunan dapat dirancang untuk mendukung masyarakat yang paling rentan. Misalnya, melalui pelatihan dan pendidikan, individu di komunitas lokal dapat diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perekonomian dengan cara yang lebih produktif. Hal ini tidak hanya memperbaiki kesejahteraan ekonomi individu, tetapi juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan cara ini, penguatan kapasitas lokal menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih adil dan merata.

4) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah aspek vital dalam konteks teori ketergantungan, terutama bagi negara-negara berkembang yang sering kali menjadi objek eksploitasi sumber daya oleh negara-negara maju. Teori ini membahas bagaimana negara berkembang cenderung terjebak dalam pola ketergantungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara tersebut untuk mengembangkan kebijakan yang memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini melibatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan

praktik pengelolaan yang memperhatikan ekosistem lokal. Menurut Martínez-Alier (2021), "Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan kunci untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang."

Pengelolaan yang berkelanjutan juga berkontribusi pada ketahanan ekonomi dengan mengurangi risiko yang terkait dengan eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Ketika negara-negara berkembang mengelola sumber daya alam dengan cara yang bijaksana, dapat meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi pasar global. Selain itu, pendekatan ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru, seperti ekowisata dan produk berkelanjutan, yang dapat meningkatkan pendapatan lokal. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan, keadilan sosial dan lingkungan juga dapat diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi lingkungan.

2. Teori Ketimpangan Global

Teori ketimpangan global merujuk pada fenomena di mana terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pembangunan, kesejahteraan, dan akses terhadap sumber daya antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di seluruh dunia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, teori ini membahas bahwa ketimpangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan lingkungan yang saling terkait. Ketimpangan global sering kali ditandai oleh distribusi sumber daya yang tidak merata, di mana negara-negara maju cenderung menguasai teknologi dan modal, sementara negara-negara berkembang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kesenjangan ini dapat memperburuk kondisi lingkungan di negara-negara miskin, di mana sering kali dieksploitasi untuk sumber daya alam tanpa mendapatkan manfaat yang proporsional. Menurut Piketty (2020), "Ketimpangan global mengancam stabilitas sosial dan keberlanjutan lingkungan, memerlukan tindakan kolektif untuk mengatasi tantangan ini." Oleh karena itu, pemahaman mengenai

ketimpangan global menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada keadilan dan pemerataan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pada usaha untuk mengatasi ketimpangan global, penting bagi komunitas internasional untuk merancang kerangka kerja yang mengutamakan kerjasama dan kolaborasi. Pendekatan yang inklusif harus diterapkan, di mana suara dan kebutuhan negara-negara berkembang diakui dalam pengambilan keputusan global. Selain itu, pendidikan dan peningkatan kapasitas di negara-negara miskin harus menjadi prioritas untuk membangun kemandirian dalam menghadapi tantangan global. Upaya untuk mengurangi ketimpangan juga harus mencakup akses yang adil terhadap teknologi dan inovasi, sehingga negara-negara berkembang dapat berpartisipasi dalam ekonomi global dengan lebih efektif. Kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan juga sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesehatan planet kita. Dengan memfokuskan perhatian pada ketimpangan global, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai teori ketimpangan global dan implikasinya akan membantu dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih baik di masa depan.

a. Karakteristik

Teori ketimpangan global menjelaskan fenomena ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya, kekayaan, dan kesempatan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di seluruh dunia. Karakteristik utama dari teori ini mencakup berbagai dimensi yang menggambarkan bagaimana ketimpangan ini terjadi dan dampaknya terhadap pembangunan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai karakteristik teori ketimpangan global:

1) Ketidakmerataan Ekonomi

Ketidakmerataan ekonomi adalah salah satu karakteristik mendasar dalam teori ketimpangan global, di mana distribusi sumber daya dan pendapatan di antara negara-negara dan dalam masyarakat tertentu sangat tidak seimbang. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dapat terjadi di tingkat global, tidak semua individu atau kelompok masyarakat menikmati hasilnya secara merata.

Hal ini menyebabkan munculnya jurang yang semakin lebar antara yang kaya dan yang miskin, baik di dalam negara maupun antar negara. Menurut Piketty (2020), "Ketidakmerataan ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga merupakan tantangan sosial dan politik yang mendasar bagi stabilitas masyarakat." Ketidakmerataan ekonomi ini juga dapat memperburuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi kelompok yang kurang beruntung.

Gambar 3. Ketidakmerataan Ekonomi



Sumber: *Kompaspedia*

Pada konteks global, ketidakmerataan ekonomi berkontribusi pada ketidakstabilan sosial, di mana populasi yang terpinggirkan sering kali merasa diabaikan oleh sistem ekonomi yang ada. Ketika sebagian besar kekayaan dan peluang terakumulasi di tangan segelintir orang, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan yang meluas dan potensi konflik sosial. Ketidakmerataan tidak hanya muncul dari faktor-faktor ekonomi, tetapi juga dari kebijakan pemerintah dan struktur sosial yang ada. Masyarakat yang mengalami ketidakmerataan lebih rentan terhadap krisis ekonomi, karena ketidakadilan sosial yang berkepanjangan dapat memicu protes dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu,

penting untuk mendorong kebijakan yang dapat mengurangi ketidakmerataan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2) Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial merupakan salah satu karakteristik utama dalam teori ketimpangan global, yang mencerminkan perbedaan akses terhadap sumber daya dan kesempatan di dalam masyarakat. Kesenjangan ini sering kali terwujud dalam bentuk ketidaksetaraan pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Stiglitz (2019), "Kesenjangan sosial tidak hanya berakar pada ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan struktural yang menghalangi mobilitas sosial." Dengan adanya kesenjangan ini, individu atau kelompok tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, yang akhirnya memperkuat stratifikasi sosial yang ada. Dampak dari kesenjangan sosial ini dapat terlihat dalam peningkatan ketidakpuasan masyarakat dan potensi konflik sosial yang lebih besar.

Kesenjangan sosial sering kali diperburuk oleh faktor-faktor seperti ras, etnis, gender, dan lokasi geografis, yang menyebabkan kelompok tertentu mengalami pengucilan. Misalnya, kelompok minoritas atau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diputus, di mana generasi mendatang terus-menerus mengalami kesulitan yang sama. Kesenjangan ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu, di mana merasa terasing dan tidak memiliki tempat dalam masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan sosial bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga isu kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius dari para pembuat kebijakan.

3) Dominasi Negara Maju

Dominasi negara maju adalah karakteristik penting dalam teori ketimpangan global, yang menggambarkan bagaimana kekuatan ekonomi dan politik negara-negara kaya sering kali mendominasi sistem internasional. Negara-negara maju,

dengan sumber daya dan teknologi yang melimpah, memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar global, mempengaruhi kebijakan perdagangan, dan menentukan norma-norma internasional. Menurut Rodrik (2021), "Dominasi ini sering kali menyebabkan negara-negara berkembang terjebak dalam ketergantungan yang merugikan, di mana tidak memiliki kontrol atas nasib ekonomi sendiri." Hal ini menciptakan ketidakadilan, di mana negara-negara yang lebih lemah terus-menerus berjuang untuk mengejar kemajuan ekonomi di tengah tantangan yang tidak seimbang. Selain itu, dominasi ini juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah di negara-negara berkembang, yang sering kali dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi.

Pada konteks global, dominasi negara maju juga berkontribusi pada ketimpangan dalam akses terhadap teknologi dan inovasi. Negara-negara kaya memiliki kapasitas untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, sementara negara-negara berkembang sering kali kekurangan dana dan infrastruktur yang diperlukan untuk bersaing. Ketidakmerataan dalam penguasaan teknologi ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, tetapi juga memperluas kesenjangan dalam pendidikan dan keterampilan. Akibatnya, individu di negara maju lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan global, sementara di negara berkembang tertinggal. Dominasi ini juga dapat menciptakan ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan populasi yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki suara dalam arena global.

b. Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan

Teori ketimpangan global memiliki implikasi penting bagi pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks bagaimana negara-negara kaya dan miskin berinteraksi serta dampak dari ketidakmerataan ini terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai implikasi teori ketimpangan global bagi pembangunan berkelanjutan:

1) Keseimbangan Sumber Daya

Keseimbangan sumber daya merupakan aspek krusial dalam menghadapi ketimpangan global yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan ini seringkali menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengelola sumber daya secara efisien dan adil. Menurut Raworth (2018), keseimbangan sumber daya harus dilihat sebagai bagian integral dari ekonomi yang sehat, di mana setiap individu memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai kualitas hidup yang layak. Tanpa keseimbangan yang tepat, ketimpangan yang ada akan semakin memburuk, mengancam kestabilan sosial dan lingkungan.

Pada konteks ini, keberlanjutan lingkungan dan sosial tidak dapat dipisahkan dari distribusi sumber daya yang adil. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi internasional perlu merumuskan kebijakan yang mendukung distribusi sumber daya yang lebih merata. Pendekatan yang inklusif ini akan membantu mengurangi ketimpangan global dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan yang dihasilkan. Dengan demikian, keseimbangan sumber daya berperan sebagai jembatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2) Pembangunan Ekonomi yang Inklusif

Pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu pendekatan penting dalam mengatasi ketimpangan global, yang berpotensi menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan yang tinggi tidak hanya menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat, tetapi juga mengurangi akses terhadap peluang ekonomi yang vital. Dalam konteks ini, pembangunan inklusif berfokus pada pemberdayaan semua individu, termasuk kelompok marginal, agar dapat berpartisipasi dalam

pertumbuhan ekonomi. Menurut Sen (2020), pembangunan yang inklusif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memperluas kemampuan dan pilihan yang dimiliki setiap orang. Dengan demikian, inklusi ekonomi dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pada upaya mencapai pembangunan yang inklusif, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kebijakan yang mendukung akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan modal sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Selain itu, investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan lokal juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan menghilangkan hambatan yang ada, kita dapat memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan yang ada.

3) Perlindungan Lingkungan

Perlindungan lingkungan menjadi aspek penting dalam menghadapi ketimpangan global yang dapat mengancam pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan sering kali berkontribusi pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan sangatlah penting. Menurut Sachs (2019), keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan global untuk mengatasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh ketimpangan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, kita dapat mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup.

Di era globalisasi, perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi bersih dan praktik bisnis

berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan juga perlu ditingkatkan agar semua pihak berkontribusi dalam upaya pelestarian. Dengan kolaborasi ini, kita dapat menciptakan solusi inovatif untuk menghadapi tantangan lingkungan yang ada saat ini. Hal ini tidak hanya akan mendukung keberlanjutan ekologis, tetapi juga mengurangi ketimpangan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang paling rentan.

4) Keadilan Sosial dan Ekonomi

Keadilan sosial dan ekonomi merupakan aspek fundamental dalam konteks ketimpangan global yang berpengaruh pada pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan sering kali menciptakan ketidakadilan yang merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan. Menurut Piketty (2020), ketidakadilan ekonomi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengganggu kohesi sosial yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, menciptakan struktur sosial yang adil akan berkontribusi pada keberlanjutan dan kestabilan masyarakat.

Untuk menghadapi ketimpangan global, penting untuk merumuskan kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini harus berfokus pada pengurangan kesenjangan pendapatan dan pemberdayaan kelompok marginal agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Melalui program-program yang inklusif, seperti peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, kita dapat mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas. Selain itu, mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) juga akan membantu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan. Dengan cara ini, keadilan sosial akan menjadi pendorong bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

C. Teori Sistem Dunia dan Transformasi Sosial

Teori Sistem Dunia dan Transformasi Sosial menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana interaksi antara struktur global dan perubahan internal di masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara. Dengan mempertimbangkan kedua pendekatan ini, kita dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan, ketidaksetaraan, dan keadilan sosial di berbagai konteks. Analisis ini tidak hanya relevan untuk sosiolog dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berusaha memahami tantangan dan peluang dalam menghadapi perubahan zaman.

1. Teori Sistem Dunia

Teori Sistem Dunia, yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, adalah pendekatan sosiologis yang menganalisis struktur ekonomi global dan dampaknya terhadap negara-negara di seluruh dunia. Teori ini berargumen bahwa dunia tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah, tetapi sebagai sistem yang terintegrasi di mana negara-negara berinteraksi dalam hubungan yang kompleks. Dalam konteks ini, negara dibagi menjadi tiga kategori: pusat, semi-pusat, dan pinggiran, yang masing-masing memiliki peran dan posisi tertentu dalam sistem global. Wallerstein (2020) menjelaskan bahwa "hubungan ekonomi dan politik antara negara-negara ini menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam, di mana negara-negara pinggiran bergantung pada negara-negara pusat untuk investasi dan teknologi." Melalui lensa Teori Sistem Dunia, kita dapat memahami bagaimana dinamika global berkontribusi terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di berbagai negara.

Teori ini juga membahas pentingnya sejarah dalam membentuk struktur dunia saat ini, termasuk bagaimana kolonialisasi dan imperialisme telah menciptakan ketergantungan antara negara-negara. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini tetapi juga mempertimbangkan warisan masa lalu yang terus memengaruhi hubungan antar negara. Selain itu, Teori Sistem Dunia mengajak kita untuk melihat dampak dari proses globalisasi, yang sering kali memperdalam ketidaksetaraan antara negara-negara. Dalam menghadapi tantangan global, pemahaman tentang Teori Sistem Dunia dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan

berkelanjutan. Dengan demikian, teori ini menjadi alat penting untuk menganalisis kompleksitas pembangunan dalam konteks global. Teori ini melihat dunia sebagai sistem terintegrasi yang terdiri dari tiga kategori utama:

a. Pusat (*Core*)

Pada Teori Sistem Dunia, kategori pusat (*core*) merujuk pada negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan militer yang dominan. Negara-negara ini seringkali mengendalikan proses produksi dan distribusi sumber daya, serta menentukan arah kebijakan global. Ciri utama dari negara-negara pusat adalah kemampuannya untuk memanfaatkan inovasi dan teknologi, yang memperkuat posisinya dalam jaringan ekonomi internasional. Selain itu, negara pusat sering kali terlibat dalam pengambilan keputusan penting yang mempengaruhi negara-negara pinggiran (*peripheral*) dan semi-peripheral. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan internasional, di mana negara-negara pusat mengakumulasi lebih banyak kekayaan dan kekuasaan.

Pada konteks ini, negara pusat tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai pusat konsumen bagi produk-produk global, memiliki infrastruktur yang kuat dan akses ke modal yang cukup, memungkinkan untuk menarik investasi asing. Keunggulan ini menciptakan siklus di mana negara pusat terus berkembang, sementara negara pinggiran tetap tertinggal. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi negara pinggiran pada negara pusat dapat memperburuk kondisi ekonomi, menciptakan hambatan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Wallerstein (2018), "negara-negara pusat memiliki posisi yang menguntungkan dalam pembagian kerja global, yang memungkinkan untuk mendominasi proses ekonomi dan sosial."

b. Semi-Pusat (*Semi-Periphery*)

Pada Teori Sistem Dunia, kategori semi-pusat (*semi-periphery*) merujuk pada negara-negara yang berada di antara negara pusat dan pinggiran. Negara-negara ini sering kali memiliki karakteristik ekonomi yang campuran, dengan beberapa sektor yang maju dan lainnya yang tertinggal. Sebagai hasilnya, semi-pusat berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara

negara-negara pusat dan pinggiran, berfungsi sebagai penghubung dalam sistem ekonomi global. Sering kali terlibat dalam produksi dan distribusi barang dan jasa, meskipun tidak dengan tingkat dominasi yang dimiliki oleh negara pusat. Dengan demikian, posisi semi-pusat memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam ekonomi global dan memanfaatkan peluang yang muncul.

Keberadaan negara semi-pusat memberikan kesempatan bagi negara pinggiran untuk berkembang dan mengejar kemajuan ekonomi. Melalui investasi dan perdagangan, negara-negara semi-pusat dapat membantu negara-negara pinggiran untuk mengakses pasar yang lebih luas dan teknologi yang lebih maju. Ini menciptakan dinamika di mana negara-negara pinggiran dapat meningkatkan daya saing dalam sistem dunia. Namun, meskipun negara semi-pusat memiliki potensi untuk maju, juga menghadapi tantangan dari ketergantungan yang tinggi pada negara pusat. Menurut Bair dan Gereffi (2020), "negara semi-pusat sering kali terjebak dalam peran sebagai penyedia sumber daya bagi negara pusat, yang dapat membatasi kemampuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan."

c. Pinggiran (*Periphery*)

Pada Teori Sistem Dunia, kategori pinggiran (*periphery*) mencakup negara-negara yang memiliki posisi ekonomi yang lemah dan bergantung pada negara-negara pusat. Negara-negara ini seringkali kaya akan sumber daya alam, tetapi kurang dalam hal pengembangan industri dan teknologi. Ketergantungan pada ekspor bahan mentah menjadikan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai dan tantangan sosial-politik menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara pinggiran. Kondisi ini menciptakan siklus di mana negara pinggiran tetap terjebak dalam ketergantungan dan tidak dapat mengejar kemajuan yang setara dengan negara pusat.

Negara-negara pinggiran juga sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses pasar internasional dan teknologi yang lebih maju. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam investasi dan kebijakan yang kurang mendukung pengembangan ekonomi. Selain itu, adanya ketidakstabilan politik dan konflik internal

dapat memperburuk situasi, sehingga memperlambat proses pembangunan. Meski demikian, ada potensi bagi negara pinggirannya untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu, seperti pariwisata atau pertanian organik, yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Menurut Frank (2019), "negara-negara pinggirannya sering kali terjebak dalam hubungan yang tidak setara dengan negara pusat, yang menghalanginya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan."

2. Transformasi Sosial

Transformasi sosial merujuk pada perubahan signifikan dalam struktur, nilai-nilai, dan perilaku suatu masyarakat seiring dengan perkembangan waktu. Proses ini sering kali melibatkan modifikasi dalam aspek ekonomi, politik, dan budaya yang dapat berdampak pada cara individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Transformasi sosial dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk perubahan teknologi, pergeseran demografi, serta pengaruh globalisasi dan migrasi. Menurut Giddens (2019), "transformasi sosial tidak hanya mencakup perubahan dalam struktur sosial tetapi juga bagaimana individu beradaptasi dan merespons perubahan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari." Oleh karena itu, pemahaman tentang transformasi sosial penting untuk analisis dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Pada konteks pembangunan, transformasi sosial berperan krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Proses ini sering kali melibatkan perjuangan untuk keadilan sosial, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ketika masyarakat mengalami transformasi, nilai-nilai baru dapat muncul yang mendukung keberagaman dan kesetaraan. Selain itu, transformasi sosial dapat berkontribusi pada penciptaan identitas kolektif yang lebih kuat, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial. Dengan memahami proses ini, pembuat kebijakan dan peneliti dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendukung perkembangan sosial yang positif. Dalam konteks pembangunan, transformasi sosial dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti

a. Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi berperan penting dalam proses transformasi sosial, terutama dalam konteks pembangunan. Ketika struktur

ekonomi suatu negara mengalami perubahan, misalnya melalui industrialisasi atau pengembangan teknologi, dampaknya sering kali meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial dan budaya. Sebagai contoh, migrasi dari daerah pedesaan ke kota-kota yang lebih berkembang dapat mempengaruhi norma dan nilai sosial yang ada. Seiring dengan meningkatnya pendapatan dan akses ke pendidikan, individu dan komunitas dapat mengalami pergeseran dalam caranya memahami dan mengatasi tantangan sosial.

Pentingnya perubahan ekonomi sebagai pemicu transformasi sosial juga terlihat dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya investasi dalam infrastruktur dan layanan publik, masyarakat dapat merasakan perbaikan signifikan dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hal ini menciptakan peluang bagi individu untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembangunan. Menurut Sen (2021), "Perubahan ekonomi tidak hanya harus dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemajuan sosial yang menyertainya." Dengan mengedepankan aspek sosial, pembangunan ekonomi dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan sosial dan budaya merupakan faktor kunci dalam proses transformasi sosial dalam konteks pembangunan. Ketika nilai-nilai, norma, dan praktik budaya mengalami perubahan, masyarakat dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman yang baru. Hal ini sering kali terkait dengan modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi, yang memungkinkan pertukaran ide dan budaya antar komunitas. Perubahan sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan mendorong partisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, perubahan dalam cara pandang dan perilaku individu serta kelompok dapat memengaruhi dinamika sosial yang lebih luas.

Perubahan budaya juga dapat memperkuat identitas komunitas dan memberikan dukungan bagi pembangunan yang inklusif. Ketika masyarakat mengadopsi nilai-nilai baru, seperti kesetaraan gender atau keberagaman, sering kali berupaya untuk

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih adil. Menurut Castells (2020), "Perubahan budaya bukan hanya soal tradisi yang hilang, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menemukan cara baru untuk berinteraksi dan beradaptasi." Dengan cara ini, perubahan sosial dan budaya dapat menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan.

c. Perubahan Politik

Perubahan politik memiliki peranan penting dalam mendorong transformasi sosial dalam konteks pembangunan. Ketika rezim politik mengalami perubahan, baik melalui pemilihan umum, reformasi, atau gerakan sosial, hal ini sering kali mengarah pada perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat hak-hak sipil. Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam proses politik dapat meningkatkan kesadaran sosial dan mendorong keadilan sosial. Melalui proses ini, masyarakat bisa menuntut perubahan yang lebih adil dan inklusif. Transformasi sosial yang dihasilkan dari perubahan politik juga terlihat dalam penguatan lembaga-lembaga demokratis. Lembaga-lembaga yang kuat dan transparan dapat memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, yang pada gilirannya berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih responsif. Menurut Tilly (2019), "Proses politik yang inklusif tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat solidaritas sosial." Dengan demikian, ada hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan proses demokrasi yang lebih baik.



BAB III

PILAR EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi global yang cepat dan tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini. Pilar ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada penciptaan sistem ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Di samping itu, pentingnya inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian utama, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan yang dilakukan. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, pilar ekonomi berperan krusial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang holistik dan berimbang.

A. Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Di era modern ini, tantangan global seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan krisis sumber daya alam menuntut adanya pendekatan baru dalam pembangunan ekonomi. Ekonomi hijau muncul sebagai solusi yang menawarkan cara inovatif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil melindungi lingkungan dan mendorong keadilan sosial. Dengan menekankan pada penggunaan sumber daya yang efisien dan teknologi ramah lingkungan, ekonomi hijau berperan penting sebagai pilar ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui integrasi prinsip-prinsip ekonomi hijau, masyarakat diharapkan dapat menciptakan

kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang.

1. Pengertian Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah suatu pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial tanpa mengorbankan lingkungan. Dalam kerangka ini, ekonomi hijau menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Dengan mengintegrasikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, ekonomi hijau berusaha menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan. Sebagai bagian dari agenda global, ekonomi hijau juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Barbier (2019), “Ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan dan berinvestasi dalam keberlanjutan.”

Gambar 4. *Green Economy Index*



Sumber: *Forest Digest*

Pada pelaksanaannya, ekonomi hijau mendorong adopsi teknologi bersih dan praktik ramah lingkungan di berbagai sektor, termasuk energi, pertanian, dan industri. Transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga membuka peluang kerja baru dan mendorong inovasi. Masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya beralih ke ekonomi hijau untuk mengatasi tantangan iklim yang mendesak. Dengan demikian, kebijakan dan investasi yang mendukung ekonomi hijau sangat penting untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan kesehatan planet ini.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau didasarkan pada beberapa prinsip utama yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama ekonomi hijau yang mendasari praktik dan kebijakan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan:

a. Pengurangan Emisi Karbon

Pengurangan emisi karbon merupakan salah satu prinsip utama ekonomi hijau yang berfokus pada penciptaan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan mengurangi emisi karbon, berbagai sektor, termasuk industri dan transportasi, dapat berkontribusi pada pengurangan dampak perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam praktiknya, kebijakan yang mendukung pengurangan emisi karbon, seperti insentif untuk energi terbarukan dan efisiensi energi, menjadi sangat penting. Menurut Bassey (2021), "Pengurangan emisi karbon harus menjadi inti dari strategi pembangunan untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif."

Pengurangan emisi karbon juga mendorong inovasi teknologi dan peralihan ke sumber energi yang lebih bersih. Investasi dalam teknologi hijau, seperti kendaraan listrik dan energi terbarukan, menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang lebih rendah karbon. Kebijakan yang mendukung penelitian dan

pengembangan dalam teknologi ramah lingkungan akan membantu mempercepat transisi ini. Dengan demikian, pengurangan emisi karbon bukan hanya menjadi tujuan lingkungan, tetapi juga menjadi peluang ekonomi yang baru. Hal ini menciptakan lapangan kerja dalam sektor-sektor yang berfokus pada keberlanjutan dan inovasi.

b. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi hijau yang berfokus pada pengoptimalan penggunaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan efisiensi, kita dapat meminimalkan limbah dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kebijakan yang mendukung efisiensi sumber daya mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik produksi yang lebih baik. Di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga industri, efisiensi sumber daya dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi biaya operasional. Menurut Zhou (2019), "Penerapan prinsip efisiensi sumber daya adalah langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan."

Penerapan efisiensi sumber daya juga melibatkan inovasi dalam proses produksi dan konsumsi. Perusahaan yang menerapkan metode efisien dapat menghasilkan produk yang lebih baik dengan menggunakan lebih sedikit bahan baku dan energi. Selain itu, konsumen juga diajak untuk lebih sadar dalam mengonsumsi produk yang berkelanjutan dan efisien. Melalui penghematan energi dan pengurangan limbah, efisiensi sumber daya tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga menciptakan keuntungan ekonomi. Kebijakan publik yang mempromosikan efisiensi akan menjadi pendorong bagi sektor swasta untuk beradaptasi dengan praktik yang lebih berkelanjutan.

c. Inklusi Sosial

Inklusi sosial merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi hijau yang berfokus pada keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan kesempatan yang sama bagi semua individu, terutama bagi kelompok yang

terpinggirkan, dalam mengakses sumber daya dan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kebijakan ekonomi hijau dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Inklusi sosial juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup di berbagai komunitas. Menurut Kuhlman dan Farrington (2020), "Inklusi sosial dalam ekonomi hijau adalah kunci untuk memastikan bahwa semua orang dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari transisi menuju keberlanjutan."

Prinsip inklusi sosial dalam ekonomi hijau juga berarti memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Dengan memberikan suara kepada masyarakat yang terdampak, kebijakan dapat dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasinya. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara masyarakat untuk menjaga lingkungan dan sumber daya. Selain itu, inklusi sosial juga dapat mendorong inovasi yang muncul dari keragaman perspektif dan pengalaman. Dengan demikian, keberagaman sosial berkontribusi pada solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan.

d. Restorasi Ekosistem

Restorasi ekosistem adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi hijau yang berfokus pada pemulihan dan revitalisasi lingkungan yang telah terdegradasi. Prinsip ini mencakup berbagai praktik yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan, restorasi ekosistem dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup. Kebijakan yang mendukung restorasi ekosistem berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan. Menurut Benayas *et al.* (2020), "Restorasi ekosistem tidak hanya mengembalikan kondisi lingkungan, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim."

Pada praktiknya, restorasi ekosistem mencakup berbagai pendekatan, seperti reforestasi, rehabilitasi lahan terdegradasi,

dan perlindungan habitat alami. Pendekatan ini membantu memperbaiki kualitas tanah dan air, serta mendukung spesies yang terancam punah. Selain itu, restorasi ekosistem juga berfungsi untuk mengurangi risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang sering kali disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, restorasi ekosistem juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, integrasi restorasi ekosistem dalam kebijakan ekonomi hijau menjadi langkah penting untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.

3. Hubungan Antara Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ekonomi hijau berfungsi sebagai pilar ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan karena:

a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu tujuan utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera tanpa merusak lingkungan. Hubungan antara ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau, diharapkan akan terjadi pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi sumber daya, dan perlindungan ekosistem, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Haines *et al.* (2020), "Transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya menawarkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan dampak lingkungan lainnya."

Ekonomi hijau tidak hanya sekadar mengganti sumber daya yang tidak terbarukan dengan yang terbarukan, tetapi juga melibatkan inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan investasi

dalam teknologi hijau, negara dapat menciptakan ekosistem inovasi yang mendorong perkembangan produk dan jasa baru yang lebih efisien dan berkelanjutan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dan berkontribusi pada penggunaan yang lebih efisien dari sumber daya yang ada. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung kebijakan yang mendorong ekonomi hijau dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan dapat saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.

b. Meningkatkan Kualitas Hidup

Meningkatkan kualitas hidup merupakan salah satu tujuan utama dalam pengembangan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan dampak lingkungan negatif, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan praktik-praktik ekonomi yang ramah lingkungan, masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta akses yang lebih baik terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup yang berkualitas. Selain itu, ekonomi hijau memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Seperti yang dinyatakan oleh Barbier (2019), "Investasi dalam ekonomi hijau tidak hanya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan."

Hubungan antara ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan terlihat pada bagaimana strategi hijau dapat memperkuat ketahanan masyarakat terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim. Dengan mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan yang sehat memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan,

pekerjaan, dan kesehatan yang lebih baik. Ini menciptakan siklus positif di mana peningkatan kualitas hidup dapat mendukung lebih banyak inisiatif keberlanjutan. Dengan demikian, ekonomi hijau tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

4. Contoh Implementasi Ekonomi Hijau

Implementasi ekonomi hijau dapat dilihat dalam berbagai sektor dan praktik yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa contoh nyata dari implementasi ekonomi hijau yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif:

a. Energi Terbarukan

Energi terbarukan adalah salah satu contoh nyata dari implementasi ekonomi hijau yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif. Penggunaan sumber energi yang dapat diperbarui, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, investasi dalam energi terbarukan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca, energi terbarukan berkontribusi terhadap pencapaian target perubahan iklim global. Menurut Kharas (2019), "Energi terbarukan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan yang kita hadapi saat ini."

Implementasi energi terbarukan tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang bagi inovasi dan teknologi baru. Misalnya, perkembangan teknologi panel surya dan turbin angin telah membuat biaya produksi energi terbarukan semakin kompetitif dibandingkan dengan energi konvensional. Hal ini mengarah pada adopsi yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan perumahan. Kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan energi terbarukan, seperti insentif pajak dan skema subsidi, juga

berperan penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, energi terbarukan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.

b. Pertanian Berkelanjutan

Pertanian berkelanjutan adalah contoh nyata dari implementasi ekonomi hijau yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif. Praktik pertanian ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menerapkan teknik pertanian yang ramah lingkungan, seperti rotasi tanaman, agroforestry, dan penggunaan pupuk organik, petani dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Pertanian berkelanjutan juga berkontribusi terhadap keamanan pangan dengan menghasilkan makanan yang sehat dan bergizi. Menurut Altieri (2021), "Pertanian berkelanjutan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang signifikan."

Penerapan pertanian berkelanjutan dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal. Dengan memproduksi makanan secara lokal, petani dapat mengurangi biaya transportasi dan dampak lingkungan dari distribusi pangan. Selain itu, pertanian berkelanjutan seringkali melibatkan teknik tradisional yang melibatkan komunitas, yang dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan keberdayaan masyarakat. Program pelatihan dan edukasi tentang praktik pertanian berkelanjutan juga dapat memberdayakan petani untuk mengadopsi metode yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini memungkinkan pertanian berkelanjutan untuk berperan sebagai motor penggerak ekonomi hijau di berbagai wilayah.

c. Transportasi Ramah Lingkungan

Transportasi ramah lingkungan merupakan contoh nyata dari implementasi ekonomi hijau yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif. Sistem transportasi yang berkelanjutan berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi yang efisien.

Contohnya termasuk pengembangan kendaraan listrik, transportasi umum yang efisien, dan penggunaan sepeda serta jalur pejalan kaki yang aman. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, transportasi ramah lingkungan berkontribusi pada kualitas udara yang lebih baik dan lingkungan yang lebih sehat. Menurut Kahn (2020), "Perubahan menuju transportasi ramah lingkungan adalah langkah krusial dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan membangun kota yang lebih berkelanjutan."

Gambar 5. Transportasi Ramah Lingkungan



Sumber: *Kata Investor*

Investasi dalam infrastruktur transportasi ramah lingkungan dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Misalnya, pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik dan jaringan transportasi umum yang efisien dapat menciptakan lapangan kerja dalam konstruksi dan pengoperasian. Hal ini juga mendorong inovasi dalam teknologi transportasi, seperti kendaraan otonom dan sistem manajemen lalu lintas yang pintar. Dengan meningkatkan integrasi antara berbagai moda transportasi, masyarakat dapat menikmati kemudahan akses dan mobilitas yang lebih baik. Melalui upaya tersebut, transportasi ramah lingkungan tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

B. Ekonomi Sirkular Sebagai Model Pembangunan

Ekonomi sirkular adalah model pembangunan yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya

melalui pendekatan yang berkelanjutan. Berbeda dengan model ekonomi linier tradisional yang berfokus pada "ambil, buat, dan buang," ekonomi sirkular mendorong sistem yang menutup siklus produk dan sumber daya. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai ekonomi sirkular sebagai model pembangunan:

1. Definisi Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular merupakan suatu sistem ekonomi yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan limbah melalui pendekatan yang berkelanjutan. Dalam model ini, produk dan material tidak hanya dianggap sebagai barang yang dikonsumsi dan dibuang, tetapi sebagai bagian dari siklus yang berkelanjutan. Ekonomi sirkular mendorong inovasi dalam desain produk, pemanfaatan ulang, dan daur ulang, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, model ini menekankan pentingnya kolaborasi antara produsen, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Menurut Kirchgeorg *et al.* (2021), "Ekonomi sirkular mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi, menciptakan peluang untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan efisiensi ekonomi."

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing di pasar global. Model ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor daur ulang dan pengelolaan limbah. Selain itu, ekonomi sirkular memungkinkan konsumen untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan melalui praktik konsumsi yang lebih bijak. Dengan demikian, implementasi ekonomi sirkular menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan penurunan sumber daya alam. Melalui pergeseran paradigma ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Sirkular

Prinsip-prinsip ekonomi sirkular merupakan dasar dari model pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Prinsip-prinsip ini berfokus

pada pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, dan peningkatan nilai dari produk dan material. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai prinsip-prinsip ekonomi sirkular:

a. Desain untuk Daur Ulang

Desain untuk daur ulang adalah prinsip penting dalam ekonomi sirkular yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan merancang produk yang dapat dengan mudah didaur ulang, para desainer dapat mengurangi jumlah material yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan mendorong penggunaan kembali material tersebut. Ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga dapat menghemat biaya bagi produsen. Sebagaimana dinyatakan oleh Geissdoerfer *et al.* (2018), "Desain untuk daur ulang adalah bagian integral dari ekonomi sirkular yang membantu menciptakan sistem produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan." Melalui pendekatan ini, inovasi dalam desain menjadi kunci untuk menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan.

Implementasi desain untuk daur ulang tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga memperhatikan seluruh siklus hidup produk. Ini berarti mempertimbangkan cara material akan diproses, digunakan, dan akhirnya didaur ulang pada tahap awal desain. Oleh karena itu, kolaborasi antara desainer, produsen, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta produk yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien. Dengan kata lain, setiap tahap produksi harus dirancang untuk memudahkan pengolahan dan pemulihan material di akhir siklus hidup produk.

b. Penggunaan Sumber Daya Terbarukan

Penggunaan sumber daya terbarukan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi sirkular yang berupaya untuk menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan. Dengan beralih dari sumber daya yang tidak terbarukan, seperti bahan bakar fosil, menuju sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti energi matahari, angin, dan biomassa, kita dapat mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan lainnya.

Sumber daya terbarukan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas, tetapi juga berkontribusi pada keamanan energi jangka panjang. Sebagaimana dinyatakan oleh Pappas *et al.* (2021), "Penggunaan sumber daya terbarukan sebagai bagian dari ekonomi sirkular membantu menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan resilient." Dengan demikian, integrasi sumber daya terbarukan dalam berbagai sektor ekonomi menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Implementasi prinsip ini memerlukan inovasi dalam teknologi dan kebijakan yang mendukung penggunaan sumber daya terbarukan. Ini mencakup pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung produksi dan distribusi energi terbarukan, serta kebijakan yang mendorong investasi dalam teknologi hijau. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat penggunaan sumber daya terbarukan juga sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku. Dengan pendidikan dan informasi yang tepat, konsumen dan produsen dapat beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam transisi menuju penggunaan sumber daya terbarukan.

c. **Pengoptimalan Penggunaan**

Pengoptimalan penggunaan merupakan prinsip kunci dalam ekonomi sirkular yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan limbah. Dalam konteks ini, pengoptimalan tidak hanya berlaku pada penggunaan material, tetapi juga pada energi, waktu, dan proses produksi. Dengan menerapkan strategi pengoptimalan, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Menurut Kirchgorg *et al.* (2019), "Pengoptimalan penggunaan sebagai bagian dari ekonomi sirkular tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan." Oleh karena itu, pendekatan ini sangat penting dalam menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan adalah melalui desain produk yang mempertimbangkan siklus hidupnya

secara keseluruhan. Hal ini mencakup pemilihan material yang efisien dan proses produksi yang minim limbah. Selain itu, penggunaan teknologi pintar dan digitalisasi dalam proses produksi dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi inefisiensi. Melalui analisis data yang cermat, perusahaan dapat menemukan cara untuk mengurangi penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil. Oleh karena itu, inovasi dalam desain dan teknologi merupakan aspek penting dalam mencapai pengoptimalan yang berkelanjutan.

d. Inovasi dalam Bisnis Model

Inovasi dalam bisnis model merupakan prinsip utama dalam ekonomi sirkular yang mengedepankan cara baru dalam menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai sambil mempertimbangkan keberlanjutan. Dalam konteks ini, perusahaan didorong untuk merancang model bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menjawab tantangan global, seperti perubahan iklim dan penipisan sumber daya, dengan cara yang inovatif. Menurut Bocken *et al.* (2019), "Inovasi dalam model bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif sekaligus memperkuat keberlanjutan ekonomi." Dengan mengadopsi inovasi ini, perusahaan dapat meningkatkan daya saing di pasar yang semakin mengedepankan keberlanjutan.

Salah satu contoh inovasi dalam bisnis model adalah transisi dari model penjualan produk menuju model layanan, yang dikenal sebagai 'product-as-a-service'. Dalam pendekatan ini, perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi juga menyediakan layanan pemeliharaan dan perbaikan, sehingga memperpanjang umur produk dan mengurangi limbah. Ini memungkinkan konsumen untuk menggunakan produk tanpa harus membeli, yang dapat mengurangi konsumsi sumber daya secara keseluruhan. Selain itu, model ini mendorong perusahaan untuk menciptakan produk yang lebih tahan lama dan mudah diperbaiki. Dengan demikian, inovasi dalam bisnis model dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin berfokus pada aspek lingkungan.

3. Manfaat Ekonomi Sirkular

Ekonomi sirkular menawarkan berbagai manfaat sebagai model pembangunan yang berkelanjutan. Dengan fokus pada pengurangan limbah, penggunaan ulang, dan daur ulang sumber daya, model ini tidak hanya membantu lingkungan tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai manfaat ekonomi sirkular:

a. Mengurangi Limbah

Ekonomi sirkular sebagai model pembangunan berfokus pada pengurangan limbah melalui pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan meminimalkan limbah, ekonomi sirkular tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Selain itu, strategi pengurangan limbah dapat mendorong inovasi dalam desain produk dan proses, sehingga menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh Kirchgeorg *et al.* (2020), "model ekonomi sirkular berfokus pada peralihan dari pola konsumsi linier menuju siklus yang lebih berkelanjutan dengan tujuan mengurangi limbah."

Pada konteks pembangunan ekonomi, pengurangan limbah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan praktik ekonomi sirkular, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan bahan baku dan mengurangi jejak karbon. Ini juga mendorong kolaborasi antar sektor, yang diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien. Melalui pengurangan limbah, masyarakat dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar, seperti penciptaan lapangan kerja baru dalam sektor daur ulang dan pemulihan sumber daya. Dengan demikian, ekonomi sirkular tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang.

b. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya merupakan salah satu manfaat utama dari penerapan ekonomi sirkular sebagai model pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi praktik ekonomi sirkular,

perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada penghematan biaya, tetapi juga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dengan mengoptimalkan proses produksi dan penggunaan bahan baku, perusahaan dapat mengurangi jejak ekologis. Menurut Geissdoerfer *et al.* (2018), "ekonomi sirkular berfokus pada penciptaan nilai melalui penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan limbah, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan ekonomi." Penerapan efisiensi sumber daya dalam ekonomi sirkular juga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan produk dan proses. Perusahaan yang berfokus pada efisiensi sumber daya cenderung mencari cara baru untuk mendaur ulang dan memperpanjang umur produk, yang berkontribusi pada peningkatan daya saing. Selain itu, peningkatan efisiensi dapat membantu menciptakan pasar baru dan peluang bisnis, seperti industri daur ulang dan pengelolaan limbah. Masyarakat juga diuntungkan dari inisiatif ini, karena dapat mengakses produk yang lebih berkelanjutan dan hemat biaya. Oleh karena itu, efisiensi sumber daya dalam ekonomi sirkular menciptakan lingkaran positif antara inovasi, keberlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi.

c. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu manfaat signifikan dari penerapan ekonomi sirkular sebagai model pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berfokus pada pengurangan limbah dan pemanfaatan kembali sumber daya, ekonomi sirkular membuka peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk daur ulang, perbaikan, dan inovasi produk. Hal ini tidak hanya mengurangi pengangguran tetapi juga menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Menurut Kirchgeorg *et al.* (2020), "penerapan ekonomi sirkular dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dengan mempromosikan praktik bisnis yang lebih efisien dan inovatif." Dengan mengembangkan sektor-sektor ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari investasi dalam ekonomi sirkular.

Pada konteks pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja melalui ekonomi sirkular dapat memberikan dampak positif bagi komunitas lokal. Pekerjaan yang dihasilkan dalam sektor ekonomi sirkular seringkali lebih berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan akan produk dan layanan yang berkelanjutan, perusahaan dapat mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dalam berbagai bidang, mulai dari teknik hingga pemasaran. Selain itu, ekonomi sirkular dapat mendorong pendidikan dan pelatihan yang relevan, sehingga meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan.

d. Inovasi dan Daya Saing

Inovasi dan daya saing merupakan dua manfaat penting dari penerapan ekonomi sirkular sebagai model pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi sirkular, perusahaan didorong untuk mencari cara baru dalam menciptakan nilai dari sumber daya yang ada, sehingga mendorong inovasi dalam produk, proses, dan layanan. Hal ini tidak hanya membantu perusahaan untuk tetap relevan dalam pasar yang kompetitif tetapi juga meningkatkan efisiensi dan pengurangan limbah. Menurut Bocken *et al.* (2019), "inovasi dalam model bisnis yang berorientasi pada ekonomi sirkular dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan." Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, perusahaan dapat menarik pelanggan yang semakin sadar akan keberlanjutan.

Ekonomi sirkular mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem inovasi yang lebih luas. Kolaborasi ini dapat menghasilkan ide-ide baru dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh berbagai sektor, sehingga mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses produksi, perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing di

pasar global. Masyarakat juga diuntungkan dari inovasi yang dihasilkan, karena dapat mengakses produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Oleh karena itu, inovasi menjadi kunci dalam membangun daya saing dalam kerangka ekonomi sirkular.

4. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi ekonomi sirkular sebagai model pembangunan menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat transisi dari sistem ekonomi linear saat ini. Meskipun terdapat banyak manfaat dari ekonomi sirkular, tantangan ini memerlukan perhatian dan solusi yang tepat agar model ini dapat diadopsi secara luas. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tantangan dalam implementasi ekonomi sirkular:

a. Perubahan Paradigma

Perubahan paradigma dalam implementasi ekonomi sirkular sebagai model pembangunan merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh banyak negara. Peralihan dari model ekonomi linier, yang mengandalkan pola produksi dan konsumsi satu arah, menuju model ekonomi sirkular memerlukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap sumber daya dan limbah. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, sangat penting untuk mendukung perubahan ini. Selain itu, inovasi teknologi dan kebijakan yang mendukung diperlukan untuk memfasilitasi transisi yang mulus. Seperti yang dinyatakan oleh Kaza *et al.* (2022), "Perubahan paradigma ini bukan hanya tentang mengganti bahan, tetapi juga tentang mengubah cara kita berpikir tentang sistem dan siklus kehidupan produk."

Menghadapi tantangan perubahan paradigma ini, pendidikan dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar lebih memahami manfaat ekonomi sirkular. Pelatihan dan program edukasi yang berfokus pada praktik berkelanjutan dapat membentuk pola pikir yang lebih terbuka terhadap perubahan. Ini juga melibatkan peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan solusi inovatif. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan dukungan untuk inisiatif ekonomi sirkular dapat tumbuh, yang pada gilirannya mendorong implementasi yang

lebih luas. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem.

b. Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan teknologi merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi sirkular sebagai model pembangunan. Teknologi yang ada saat ini sering kali belum cukup maju untuk mendukung proses daur ulang dan pemulihan bahan secara efisien. Selain itu, kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan juga memperlambat kemajuan menuju ekonomi sirkular. Banyak perusahaan masih mengandalkan metode produksi tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Menurut Geissdoerfer *et al.* (2020), "Inovasi teknologi yang efektif adalah kunci untuk mengatasi keterbatasan ini dan memungkinkan transisi yang lebih cepat ke model ekonomi sirkular."

Keterbatasan teknologi juga berdampak pada biaya produksi yang tinggi dalam penerapan praktik ekonomi sirkular. Biaya untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi baru sering kali menjadi penghalang bagi perusahaan kecil dan menengah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan di pasar, di mana hanya perusahaan besar yang mampu berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Selain itu, kekurangan infrastruktur yang mendukung, seperti fasilitas daur ulang yang canggih, juga menjadi kendala. Dengan demikian, tantangan teknologi harus diatasi agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari ekonomi sirkular.

c. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan berperan penting dalam implementasi ekonomi sirkular sebagai model pembangunan, namun sering kali menjadi tantangan yang signifikan. Banyak kebijakan yang ada saat ini masih berpihak pada model ekonomi linier, yang dapat menghambat kemajuan menuju praktik berkelanjutan. Regulasi yang tidak mendukung atau bahkan menghalangi inisiatif ekonomi sirkular dapat mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam solusi ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan dan pembaruan regulasi untuk mendorong penggunaan bahan daur ulang dan praktik

produksi yang lebih berkelanjutan. Menurut Kirchgeorg *et al.* (2019), "Kebijakan yang mendukung dan menciptakan insentif bagi ekonomi sirkular adalah kunci untuk mendorong adopsi yang lebih luas di sektor industri."

Tantangan lain terkait regulasi adalah kompleksitas dan ketidakpastian hukum yang sering kali mengelilingi implementasi ekonomi sirkular. Banyak perusahaan merasa bingung dengan berbagai regulasi yang berlaku, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan investasi. Ketiadaan pedoman yang jelas mengenai daur ulang dan pengelolaan limbah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan ekonomi sirkular. Selain itu, adanya perbedaan regulasi antara negara atau wilayah dapat menciptakan tantangan bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional. Dalam konteks ini, harmonisasi regulasi menjadi penting untuk memudahkan perusahaan dalam menerapkan praktik ekonomi sirkular.

C. Tantangan Ekonomi dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Namun, mencapai tujuan ini tidaklah mudah, terutama di tengah tantangan ekonomi yang beragam. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan:

1. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketika kekayaan dan sumber daya terdistribusi secara tidak merata, hal ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Seiring dengan itu, ketimpangan ekonomi dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Oxfam (2020), "Krisis ketidakadilan yang

disebabkan oleh ketimpangan ekonomi memerlukan tindakan segera untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat tercapai."

Ketimpangan ekonomi seringkali berakar pada sistem kebijakan yang tidak adil dan praktik bisnis yang tidak etis. Kebijakan fiskal dan perpajakan yang kurang efektif dapat memperparah ketidakadilan ini, menciptakan jurang yang lebih dalam antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global, perbedaan dalam tingkat pembangunan antar negara juga memperburuk ketimpangan ekonomi, di mana negara-negara berkembang sering kali tertinggal dalam akses terhadap teknologi dan investasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam

Ketergantungan pada sumber daya alam merupakan tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral sering kali dieksploitasi secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan industri dan ekonomi, namun, eksploitasi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tak terpulihkan. Selain itu, penggunaan sumber daya alam yang tidak efisien dan tidak ramah lingkungan berpotensi memperburuk krisis iklim yang sedang berlangsung. Tantangan ini semakin diperparah oleh ketidakmampuan beberapa negara untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang dapat menggantikan penggunaan sumber daya alam. Menurut Lutz dan Fletcher (2020), pengelolaan yang berkelanjutan dan efisien terhadap sumber daya alam adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem.

Ketergantungan pada sumber daya alam juga menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi ekonomi global, di mana negara-negara yang kaya akan sumber daya cenderung lebih mengandalkan ekspor daripada pengembangan ekonomi berkelanjutan. Ketergantungan ini membuat negara-negara tersebut rentan terhadap fluktuasi harga pasar global, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam sering kali menyebabkan konflik sosial dan politik, terutama di wilayah-wilayah

yang kaya akan sumber daya tetapi kurang stabil secara politik. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan pembangunan antara negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam dengan negara yang lebih fokus pada inovasi dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Biaya Pembangunan Berkelanjutan

Biaya pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang. Implementasi teknologi ramah lingkungan, infrastruktur hijau, serta transisi menuju energi terbarukan membutuhkan investasi besar yang sering kali tidak terjangkau oleh banyak negara, terutama negara berkembang. Tingginya biaya ini menghambat kemampuan pemerintah dan sektor swasta untuk melakukan inovasi yang diperlukan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Selain itu, perbedaan prioritas antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan investasi dalam keberlanjutan membuat banyak negara enggan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk proyek-proyek berkelanjutan. Menurut Garcia dan Bowman (2021), tantangan utama dalam membiayai pembangunan berkelanjutan adalah minimnya akses pada sumber pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Meskipun biaya awal pembangunan berkelanjutan relatif tinggi, manfaat jangka panjangnya tidak dapat diabaikan. Investasi dalam proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi efisiensi sumber daya, berpotensi mengurangi biaya operasional di masa depan dan meningkatkan ketahanan terhadap risiko lingkungan. Namun, tantangan terbesar terletak pada upaya untuk menarik investasi dari sektor swasta dan lembaga keuangan global yang sering kali memprioritaskan keuntungan jangka pendek. Sektor keuangan perlu lebih berperan aktif dalam menyediakan mekanisme pembiayaan berkelanjutan, termasuk instrumen keuangan hijau seperti obligasi hijau dan dana lingkungan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, pembangunan berkelanjutan akan terus terbentur oleh hambatan biaya yang signifikan.

4. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, karena dampaknya yang luas terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Perubahan suhu global, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca ekstrem mengancam sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Fenomena ini juga memperburuk ketidakstabilan ekonomi, terutama di negara-negara yang bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, perubahan iklim memicu berbagai krisis kemanusiaan, seperti kelangkaan air dan pangan, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup manusia. Menurut Singh dan Choudhury (2019), perubahan iklim menciptakan ancaman serius bagi ekosistem global dan pembangunan berkelanjutan, karena memperparah masalah kemiskinan dan ketidakadilan.

Tantangan perubahan iklim menuntut aksi cepat dan terpadu dari berbagai pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi dengan dampak yang tak terhindarkan. Namun, mengatasi perubahan iklim sering kali membutuhkan biaya besar dan transformasi sistem ekonomi yang kompleks, yang tidak selalu mudah diterapkan, terutama di negara berkembang. Banyak negara masih menghadapi kesulitan dalam mengalihkan penggunaan energi fosil ke energi terbarukan karena keterbatasan teknologi dan pendanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama global yang solid untuk menyediakan dukungan teknis dan finansial yang diperlukan guna mengatasi tantangan ini. Tanpa langkah nyata dan kolektif, dampak perubahan iklim akan terus memperlambat upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

5. Keterbatasan Teknologi dan Inovasi

Keterbatasan teknologi dan inovasi merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Banyak negara, terutama negara berkembang, menghadapi hambatan dalam mengakses teknologi canggih yang diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang kompleks. Teknologi ramah lingkungan dan inovasi dalam energi terbarukan, misalnya, sering kali sulit diimplementasikan karena biaya tinggi, kurangnya infrastruktur, dan minimnya sumber daya manusia yang terampil. Selain itu, inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan belum berkembang

secara merata di seluruh dunia. Menurut Johnson (2020), ketidakmampuan dalam mengakses dan menerapkan teknologi berkelanjutan secara global memperlambat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun teknologi memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, kesenjangan inovasi antara negara maju dan berkembang masih menjadi kendala signifikan. Negara-negara maju cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melakukan penelitian dan pengembangan (R&D), sementara negara-negara berkembang sering kali kekurangan modal dan akses terhadap teknologi terbaru. Akibatnya, negara berkembang lebih lambat dalam mengadopsi teknologi yang diperlukan untuk mitigasi perubahan iklim dan pembangunan infrastruktur hijau. Kolaborasi internasional dalam berbagi pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua negara dapat memanfaatkan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya alih teknologi yang memadai, kesenjangan pembangunan ini akan semakin melebar.

BAB IV

PILAR SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pilar sosial dalam pembangunan berkelanjutan berperan penting dalam memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks administrasi publik, pilar sosial berfokus pada upaya pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, akses terhadap pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup warga negara. Keberlanjutan sosial juga menekankan perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta penguatan ikatan sosial untuk mencegah ketimpangan dan marginalisasi. Di samping itu, pembangunan berkelanjutan membutuhkan sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan sosial jangka panjang. Dengan demikian, pilar sosial menjadi elemen krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

A. Keadilan Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan

Keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan secara adil dan merata kepada semua anggota masyarakat. Ini berarti bahwa dalam setiap program atau kebijakan pembangunan, harus ada perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan, agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan. Keadilan sosial berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Keadilan sosial merujuk pada kondisi di mana semua individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam

proses pembangunan. Ini mencakup pengakuan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial memastikan bahwa tidak hanya generasi sekarang yang mendapatkan manfaat dari pembangunan, tetapi juga generasi mendatang, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana semua individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Keadilan sosial tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang prinsip-prinsip keadilan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan:

1. Kesetaraan dan Inklusi

Kesetaraan dan inklusi merupakan prinsip fundamental dalam keadilan sosial yang sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, berhak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan layanan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penerapan kesetaraan dan inklusi dapat membantu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Sen (2019), "Keadilan sosial yang mendorong kesetaraan dan inklusi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan." Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap keadilan sosial dapat memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di semua sektor.

Prinsip kesetaraan dan inklusi juga mendukung penciptaan lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, keberagaman perspektif dapat diakomodasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan efektif. Di samping itu, inklusi sosial berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan. Ketika masyarakat merasa terlibat dan diakui, cenderung lebih berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pembangunan. Dengan demikian, kesetaraan

dan inklusi tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip kunci dalam mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua anggota komunitas diakomodasi. Dengan meningkatkan partisipasi, individu merasa memiliki suara dan pengaruh dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan. Menurut Cornwall (2019), "Partisipasi masyarakat yang autentik adalah pilar utama dalam mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan." Hal ini menunjukkan bahwa tanpa partisipasi, pembangunan berkelanjutan cenderung mengabaikan perspektif lokal yang krusial.

Partisipasi masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembangunan. Ketika masyarakat terlibat, dapat memantau implementasi kebijakan dan program, serta menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menciptakan sistem checks and balances yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Selain itu, partisipasi yang aktif dapat mempercepat proses inovasi dan penerapan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan efektivitas pembangunan berkelanjutan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip esensial dalam mencapai keadilan sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pemerintah serta pemangku kepentingan dalam setiap tahap proses pembangunan. Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan yang diambil, yang berdampak pada kehidupan. Menurut Bovens *et al.* (2018), "Akuntabilitas tidak hanya menjamin bahwa keputusan diambil dengan pertimbangan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab kepada masyarakat." Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas berperan penting dalam menciptakan kepercayaan antara masyarakat dan pengambil keputusan.

Pada praktiknya, akuntabilitas mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan program pembangunan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pemantauan, dapat memberikan masukan yang konstruktif dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil, tetapi juga meningkatkan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas yang tinggi juga dapat mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang sering kali menjadi penghalang bagi keadilan sosial. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi jaminan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dengan adil dan merata.

4. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan prinsip fundamental dalam mencapai keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, layanan, dan peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Kesejahteraan sosial mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sementara kesejahteraan ekonomi berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Menurut Stiglitz (2019), "Keadilan sosial tidak dapat dicapai tanpa menciptakan kesejahteraan yang inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi." Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif. Ketika masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan, cenderung lebih berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mendukung kebijakan yang adil. Hal ini menciptakan siklus positif yang menguntungkan semua pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi dapat mengurangi ketegangan dan konflik yang sering muncul akibat ketidakadilan. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya mendukung keadilan sosial tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan berkelanjutan.

5. Keberlanjutan Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan merupakan prinsip yang sangat penting dalam keadilan sosial, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa semua individu berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat, yang mendukung kehidupan dan kesejahteraan. Kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem tetapi juga pada masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang paling rentan. Menurut Sachs (2021), "Keberlanjutan lingkungan adalah prasyarat untuk keadilan sosial, karena tanpa lingkungan yang sehat, tujuan-tujuan sosial dan ekonomi tidak dapat dicapai." Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial.

Pada prakteknya, keberlanjutan lingkungan mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, perlindungan biodiversitas, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk kelangsungan hidup. Selain itu, keberlanjutan lingkungan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, menjamin keberlanjutan lingkungan merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan karena melibatkan warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang mempengaruhi kehidupan. Konsep ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat di setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Dengan melibatkan masyarakat, pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, mengurangi risiko kegagalan program, dan meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab di kalangan warga. Selain itu, partisipasi

masyarakat membantu menciptakan keadilan sosial dengan memberi suara pada kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, dan komunitas rentan. Secara rinci, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa dimensi penting:

1. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan dimensi penting dalam partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui proses ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait kebijakan yang akan diambil, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Oleh karena itu, keterlibatan ini harus bersifat inklusif, mencakup berbagai kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Masyarakat yang dilibatkan secara aktif akan lebih mungkin mendukung dan berkontribusi terhadap keberlanjutan proyek-proyek pembangunan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan keterlibatan aktif ini, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat lebih terjamin karena setiap tahapan pembangunan diawasi secara langsung oleh masyarakat. Hal ini juga mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih adil dan merata. Ketika suara masyarakat diabaikan, sering kali pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

2. Akses terhadap Informasi

Akses terhadap informasi merupakan elemen kunci dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan memperoleh informasi yang memadai, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan. Informasi yang terbuka dan transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami kebijakan, program, dan dampak yang mungkin timbul dari pembangunan yang dilakukan. Ketika informasi

dapat diakses secara luas, hal ini mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat di berbagai tingkat, baik lokal maupun nasional. Selain itu, akses terhadap informasi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi yang relevan.

Transparansi dalam penyebaran informasi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan. Informasi yang jelas dan dapat diakses membantu masyarakat dalam memahami tujuan dan manfaat dari proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, serta memberikannya kemampuan untuk mengidentifikasi potensi masalah. Hal ini penting karena keterlibatan masyarakat yang didukung oleh informasi yang tepat dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana. Dengan demikian, akses terhadap informasi berperan besar dalam memperkuat akuntabilitas dan menjaga keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.

3. Pemberdayaan dan Kapasitas

Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat merupakan dimensi penting dalam partisipasi masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan, masyarakat diberikan pengetahuan, keterampilan, dan alat yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam proses pembangunan. Hal ini tidak hanya memperkuat kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi juga untuk menjalankan perannya sebagai agen perubahan di komunitas. Pemberdayaan ini memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah pembangunan. Selain itu, peningkatan kapasitas memungkinkan masyarakat untuk lebih tanggap terhadap tantangan dan peluang yang muncul dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas masyarakat juga berperan dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, terutama di tingkat lokal. Dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan yang relevan, masyarakat mampu menghadapi perubahan lingkungan dan ekonomi dengan lebih baik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, masyarakat yang berdaya memiliki kemampuan untuk memelihara inisiatif pembangunan dan memastikan bahwa dampak positif dari

program-program yang ada dapat bertahan dalam jangka panjang. Proses ini juga mendorong inovasi lokal, di mana masyarakat dapat menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan dan kualitas hasil pembangunan.

4. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lain

Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain merupakan dimensi esensial dalam partisipasi masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri, yang semuanya memiliki peran dalam menciptakan solusi yang efektif dan inklusif. Dengan adanya kolaborasi, tantangan pembangunan dapat dihadapi secara lebih komprehensif, karena setiap pihak membawa perspektif dan sumber daya yang berbeda namun saling melengkapi. Kolaborasi ini juga membantu membangun kepercayaan di antara para pihak, sehingga memungkinkan proses pembangunan yang lebih transparan dan partisipatif. Masyarakat, sebagai pemangku kepentingan utama, menjadi bagian integral dalam menentukan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi ini juga memberikan ruang bagi terjadinya dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, setiap pihak dapat menyuarakan kepentingannya, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang lebih seimbang dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemangku kepentingan dari berbagai sektor dapat membantu menyediakan sumber daya atau teknologi yang diperlukan oleh masyarakat, sementara masyarakat memberikan masukan berdasarkan pengetahuan lokal yang dimiliki. Ini menciptakan sinergi yang memperkuat implementasi proyek pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan peluang keberhasilannya. Dengan demikian, kolaborasi lintas sektor berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

C. Pemberdayaan Komunitas untuk Kesejahteraan Berkelanjutan

Pemberdayaan komunitas merupakan pendekatan kunci dalam mencapai kesejahteraan berkelanjutan, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pilar sosial pembangunan berkelanjutan berfokus pada kesejahteraan manusia, pemerataan kesempatan, dan peningkatan kualitas hidup melalui penguatan kapasitas individu dan komunitas. Pemberdayaan komunitas bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan aksi yang mempengaruhi kehidupan secara langsung, dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut penjelasan lebih rinci tentang peran pemberdayaan komunitas dalam mencapai kesejahteraan berkelanjutan:

1. Peningkatan Kapasitas dan Pendidikan

Peningkatan kapasitas dan pendidikan berperan penting dalam pemberdayaan komunitas untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Dengan memberikan akses pendidikan yang inklusif, masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mandiri dan produktif dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Pendidikan juga membantu individu memahami pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijaksana, yang menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mampu menentukan arah perkembangan komunitasnya. Menurut Wong *et al.* (2020), program pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas dapat memperkuat komunitas dalam menghadapi ketidakpastian global dan mempromosikan keberlanjutan jangka panjang.

Pemberdayaan komunitas melalui pendidikan juga berperan dalam membangun kemandirian ekonomi dengan memberikan akses pada pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Ketika individu dalam komunitas memiliki kapasitas yang lebih baik, dapat menciptakan peluang ekonomi baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan yang berkelanjutan juga membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan, yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan sumber daya alam yang digunakan oleh komunitas.

2. Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek penting dalam pemberdayaan komunitas untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Dengan melibatkan anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan, merasa memiliki tanggung jawab dan keterikatan terhadap hasil yang dihasilkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ketika masyarakat terlibat dalam proses ini, dapat mengidentifikasi solusi yang lebih sesuai dengan konteks lokal dan memperkuat kapabilitas kolektif untuk mengatasi tantangan yang ada. Menurut Tufekci dan Majeed (2021), partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang berwenang.

Partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan memungkinkan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil. Dengan melibatkan berbagai suara dan perspektif, proses pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis dan mengakomodasi kepentingan semua anggota masyarakat. Hal ini sangat penting dalam konteks keberagaman sosial, di mana kelompok-kelompok tertentu mungkin sering terpinggirkan. Ketika semua suara didengar dan dipertimbangkan, komunitas dapat mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan yang berbeda. Keterlibatan ini juga mendorong dialog dan komunikasi yang konstruktif antar anggota komunitas, membangun rasa saling percaya dan kolaborasi yang kuat.

3. Penguatan Kelembagaan Sosial dan Ekonomi

Penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi merupakan aspek kunci dalam pemberdayaan komunitas untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat memberikan struktur dan dukungan bagi komunitas untuk mengorganisir diri dan mengembangkan potensi yang ada. Dengan memperkuat kelembagaan sosial, komunitas dapat menciptakan jaringan yang mendukung kolaborasi dan pertukaran informasi, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola sumber daya secara efisien. Selain itu, kelembagaan ekonomi yang solid memungkinkan akses yang lebih baik terhadap modal, teknologi, dan pasar, yang

esensial untuk pengembangan usaha lokal. Menurut Fatawi dan Adawiyah (2022), penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan sosial yang baik juga berfungsi sebagai wadah bagi anggota komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Dalam konteks ini, komunitas yang memiliki lembaga yang efektif dapat lebih mudah menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Penguatan kelembagaan ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang ada. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terlibat dalam merumuskan kebijakan dan program yang relevan dengan kebutuhannya.

4. Pengurangan Ketimpangan Sosial

Pengurangan ketimpangan sosial adalah salah satu peran krusial dalam pemberdayaan komunitas untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Ketimpangan sosial yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan dan stabilitas sosial, memicu konflik, dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dengan memberdayakan komunitas, terutama kelompok yang terpinggirkan, kita dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Hal ini tidak hanya mengurangi ketimpangan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Menurut Sen (2019), pengurangan ketimpangan sosial adalah kunci untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan masyarakat.

Pada upaya mengurangi ketimpangan sosial, partisipasi aktif dari berbagai elemen komunitas sangat diperlukan. Melibatkan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua kelompok terwakili. Ketika suara kelompok yang terpinggirkan diakui, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan responsif. Selain itu, kolaborasi antar kelompok masyarakat yang berbeda juga dapat memperkuat solidaritas dan menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas. Dengan demikian, pengurangan ketimpangan sosial tidak hanya

berfokus pada distribusi sumber daya, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan politik bagi semua anggota masyarakat.

5. Pembangunan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan adalah kunci dalam pemberdayaan komunitas untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan. Dengan fokus pada pengembangan sumber daya lokal, komunitas dapat menciptakan peluang ekonomi yang relevan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Proses ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal yang tidak berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan ekonomi, komunitas dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan masyarakat di masa depan. Menurut McKenzie (2021), pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dapat memberdayakan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup tanpa mengorbankan lingkungan.

Pemberdayaan komunitas dalam pembangunan ekonomi lokal juga melibatkan peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Dengan memberikan pelatihan dan akses pada pendidikan yang relevan, individu dalam komunitas dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal. Hal ini memungkinkan untuk memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, baik melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun inovasi baru. Selain itu, pengembangan jaringan sosial dan kolaborasi antar pelaku ekonomi lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Melalui upaya bersama, komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial.



BAB V

PILAR LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pilar lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan fondasi yang sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dengan semakin meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh planet ini, seperti perubahan iklim, penurunan biodiversitas, dan pencemaran, pendekatan yang holistik menjadi semakin mendesak. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi mendatang. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip lingkungan dalam kebijakan dan praktik pembangunan harus menjadi prioritas utama. Dengan mengintegrasikan pilar lingkungan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta menjaga kelestarian bumi sebagai tempat tinggal kita bersama.

A. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) merupakan suatu pendekatan strategis yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan degradasi lingkungan, PSDA bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, pengelolaan yang efektif dapat memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tetap tersedia untuk generasi mendatang. Melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, kita dapat

menciptakan masa depan yang lebih baik dan harmonis bagi manusia dan ekosistem.

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan (PSDA-B) adalah pendekatan strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Pendekatan ini merupakan salah satu pilar lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan. Beberapa elemen kunci dari PSDA-B mencakup konservasi, pengelolaan yang efisien, dan partisipasi masyarakat.

1. Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Upaya konservasi bertujuan untuk melindungi dan memelihara SDA agar dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan. Menurut Kurniawan (2020), konservasi bukan hanya tentang melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya yang sama. Pendekatan ini melibatkan berbagai strategi, termasuk perlindungan area konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya yang ada. Dengan melakukan konservasi yang efektif, kita dapat mendukung ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Pengelolaan SDA yang berkelanjutan memerlukan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, konservasi berperan dalam memastikan bahwa sumber daya yang digunakan tidak habis dan dapat diperbarui. Penggunaan teknologi ramah lingkungan juga menjadi bagian penting dalam upaya ini, di mana teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan SDA, sehingga kesadaran dan tanggung jawab bersama dapat terbangun. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, pengelolaan SDA akan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan yang Efisien

Pengelolaan yang efisien merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Pengelolaan

yang baik tidak hanya bertujuan untuk memanfaatkan SDA secara optimal, tetapi juga untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Menurut Susanto (2021), pengelolaan yang efisien melibatkan penggunaan teknologi dan metode yang dapat mengurangi pemborosan serta meningkatkan produktivitas. Dengan pengelolaan yang efisien, sumber daya alam dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa SDA dapat digunakan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

Efisiensi dalam pengelolaan SDA juga mencakup perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan strategi yang holistik dan adaptif. Melalui sinergi ini, pengelolaan SDA dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Selain itu, pemantauan dan evaluasi yang terus menerus diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diinginkan. Dengan demikian, pengelolaan yang efisien akan mendukung pengembangan ekonomi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat legitimasi dari kebijakan yang diambil. Menurut Hidayat (2019), partisipasi aktif masyarakat dapat mengoptimalkan pengelolaan SDA dengan memanfaatkan pengetahuan lokal dan pengalaman yang dimiliki. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, pengelolaan SDA dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat adalah langkah penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

Partisipasi masyarakat juga membantu membangun kesadaran akan pentingnya konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan, akan lebih memahami dampak dari tindakannya terhadap lingkungan. Edukasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat dapat memperkuat kemampuan

dalam menjaga dan memelihara SDA. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pengelolaan SDA. Partisipasi yang inklusif ini akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

4. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Kebijakan yang jelas dan terencana dapat membantu mengarahkan penggunaan SDA dengan cara yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan. Menurut Pratiwi (2022), regulasi yang efektif berfungsi untuk melindungi SDA dari eksploitasi berlebihan dan dampak negatif yang dapat merugikan lingkungan. Selain itu, kebijakan yang tepat juga menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, pengelolaan SDA dapat dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan.

Pentingnya penegakan hukum dalam implementasi kebijakan tidak dapat diabaikan. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kebijakan yang telah ditetapkan bisa saja dilanggar, mengakibatkan kerusakan pada SDA. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat institusi dan sistem hukum yang berkaitan dengan pengelolaan SDA. Edukasi kepada masyarakat tentang regulasi yang ada juga menjadi bagian penting agar masyarakat memahami hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan SDA. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara SDA akan semakin meningkat.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan efektif dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Menurut Setiawan (2023), pemantauan yang berkelanjutan dapat mengidentifikasi masalah dan memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan segera. Selain itu, evaluasi yang tepat membantu dalam menilai dampak dari berbagai intervensi dan strategi yang telah dilakukan. Dengan demikian,

pemantauan dan evaluasi yang sistematis akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA.

Pemantauan yang efektif juga membutuhkan penggunaan teknologi dan metodologi yang tepat untuk mengumpulkan data yang akurat. Alat dan teknik modern, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan remote sensing, dapat digunakan untuk memantau perubahan dalam penggunaan lahan dan kondisi lingkungan. Data yang diperoleh dari pemantauan ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pemantauan akan meningkatkan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan. Dengan keterlibatan masyarakat lokal, data yang diperoleh akan lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi setempat.

B. Perubahan Iklim dan Dampaknya Pada Pembangunan

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, yang berimplikasi langsung pada pembangunan berkelanjutan. Fenomena ini terjadi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Dampak perubahan iklim terlihat dalam bentuk peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, dan naiknya permukaan air laut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai perubahan iklim dan dampaknya sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjaga lingkungan dan kualitas hidup manusia.

Dampak perubahan iklim pada pembangunan berkelanjutan adalah isu kritis yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga kesejahteraan sosial. Perubahan iklim, yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan polusi, menghasilkan efek jangka pendek dan jangka panjang yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk memahami implikasi ini, penting untuk membahas dampak-dampak utama yang muncul.

1. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu krusial yang dihadapi oleh banyak negara sebagai dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata. Perubahan iklim memengaruhi pola cuaca dan menyebabkan fluktuasi produksi pangan yang signifikan, mengganggu distribusi pangan, serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam. Menurut FAO (2021), "Perubahan iklim dapat mempengaruhi ketahanan pangan secara langsung melalui dampaknya terhadap produktivitas pertanian, serta secara tidak langsung melalui perubahan dalam ekonomi, kesehatan, dan lingkungan." Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan yang terjamin sangat penting untuk memastikan akses yang adil terhadap makanan bergizi bagi semua orang. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan pangan harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan berkelanjutan.

Ketersediaan air, kualitas tanah, dan keberagaman hayati adalah faktor-faktor yang sangat terpengaruh oleh perubahan iklim, yang berdampak langsung pada ketahanan pangan. Dengan meningkatnya suhu dan frekuensi cuaca ekstrem, seperti banjir dan kekeringan, tanaman pangan menjadi lebih rentan terhadap gagal panen. Hal ini berpotensi memperburuk kelangkaan pangan dan meningkatkan harga makanan, yang pada gilirannya mengancam kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang rentan. Selain itu, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi pola migrasi masyarakat, menyebabkan pergeseran dalam pola konsumsi dan produksi pangan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung adaptasi pertanian yang tahan iklim guna menjaga ketahanan pangan.

2. Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan komponen vital dalam pembangunan berkelanjutan, namun dampak perubahan iklim semakin mengancam ketersediaan dan kualitasnya. Perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan dapat mengubah siklus hidrologi secara signifikan. Menurut UN Water (2020), "Perubahan iklim berpotensi memperburuk krisis air di seluruh dunia, dengan mempengaruhi ketersediaan air tawar dan meningkatkan permintaan untuk penggunaan air." Kondisi ini dapat menyebabkan konflik sumber daya, memperburuk ketidakadilan sosial, dan mengancam kehidupan serta mata pencaharian masyarakat yang

bergantung pada sumber daya air. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara perubahan iklim dan sumber daya air sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang berkelanjutan.

Ketersediaan air yang terbatas juga berdampak pada sektor pertanian dan industri, yang merupakan pilar utama ekonomi di banyak negara. Perubahan iklim dapat mengurangi produktivitas pertanian akibat kurangnya air untuk irigasi, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan. Selain itu, kualitas air seringkali terpengaruh oleh pencemaran yang meningkat akibat ekstremitas cuaca, seperti banjir yang mencuci limbah ke dalam sumber air. Hal ini mengakibatkan tantangan dalam memastikan akses terhadap air bersih dan aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi praktik manajemen sumber daya air yang efisien dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

3. Kesehatan Masyarakat

Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, yang menjadi perhatian utama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem berkontribusi pada penyebaran penyakit yang terkait dengan iklim, seperti malaria, demam berdarah, dan penyakit pernapasan. Menurut WHO (2021), "Perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dengan cara yang kompleks, termasuk memengaruhi faktor-faktor sosial dan lingkungan yang mendasari kesehatan." Selain itu, pergeseran dalam pola makanan dan air bersih dapat meningkatkan risiko malnutrisi, terutama di kalangan kelompok rentan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan isu kesehatan dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim untuk melindungi masyarakat.

Kondisi kesehatan mental juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, di mana stres akibat bencana alam dan ketidakpastian ekonomi dapat mengganggu kesejahteraan psikologis masyarakat. Peristiwa cuaca ekstrem, seperti banjir dan kekeringan, tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga meningkatkan beban psikologis bagi individu dan komunitas. Terlebih lagi, ketidakstabilan dalam ketersediaan makanan dan air dapat memperburuk kondisi kesehatan mental, yang berdampak pada produktivitas dan kualitas hidup. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam penanganan

kesehatan masyarakat sangat diperlukan dalam konteks perubahan iklim. Intervensi yang melibatkan kesehatan fisik dan mental harus menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

4. Ekonomi dan Pekerjaan

Perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan lapangan pekerjaan di seluruh dunia, yang menjadi tantangan serius dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kenaikan suhu, cuaca ekstrem, dan perubahan pola iklim dapat merusak infrastruktur dan produktivitas sektor-sektor utama, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Menurut ILO (2021), "Perubahan iklim dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan yang signifikan dan mengurangi kualitas pekerjaan, terutama di sektor yang bergantung pada sumber daya alam." Hal ini berpotensi meningkatkan pengangguran dan ketidakpastian ekonomi, terutama di negara-negara berkembang yang lebih rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan mitigasi perubahan iklim sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Sektor pertanian, sebagai salah satu pilar ekonomi di banyak negara, sangat terpengaruh oleh perubahan iklim yang mengubah pola curah hujan dan suhu tanah. Dampak ini dapat mengurangi hasil pertanian, meningkatkan risiko gagal panen, dan mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat. Pekerja di sektor ini seringkali mengalami ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi hasil pertanian yang disebabkan oleh kondisi iklim. Selain itu, pergeseran dalam permintaan pasar dapat memaksa petani untuk beradaptasi dengan praktik pertanian baru yang mungkin memerlukan pelatihan dan dukungan teknis. Dengan demikian, penyesuaian yang tepat dan dukungan dalam bentuk pendidikan serta pelatihan menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor ini.

5. Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Keanekaragaman hayati dan ekosistem mengalami dampak serius akibat perubahan iklim, yang memiliki implikasi signifikan bagi pembangunan berkelanjutan. Peningkatan suhu global dan perubahan pola cuaca mengancam habitat alami, menyebabkan spesies flora dan fauna terpaksa beradaptasi, berpindah, atau bahkan menghadapi

kepunahan. Menurut IPBES (2019), "Perubahan iklim adalah salah satu penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati, yang berdampak pada fungsi ekosistem dan jasa yang disediakan untuk manusia." Hilangnya keanekaragaman hayati tidak hanya mengurangi stabilitas ekosistem, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekologis yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan berkelanjutan.

Perubahan iklim juga mengubah interaksi dalam ekosistem, mempengaruhi rantai makanan dan hubungan simbiosis antara spesies. Misalnya, perubahan suhu dan curah hujan dapat mengubah pola migrasi hewan, sehingga mempengaruhi distribusi dan kelangsungan hidup spesies. Selain itu, spesies invasif yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrem dapat menguasai habitat dan mengancam spesies lokal. Ketidakstabilan dalam ekosistem ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga jasa ekosistem yang vital, seperti penyediaan air bersih, polinasi, dan pengendalian hama. Oleh karena itu, diperlukan upaya konservasi yang berkelanjutan untuk mempertahankan ekosistem yang sehat dan seimbang.

C. Kebijakan Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan merujuk pada serangkaian prinsip dan langkah strategis yang dirancang untuk memelihara dan melindungi lingkungan sambil mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kepentingan generasi mendatang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi juga berusaha untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kebijakan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan:

1. Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan

Keseimbangan ekonomi dan lingkungan merupakan aspek krusial dalam kebijakan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan tidak

hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Untuk mencapai keseimbangan ini, penting untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Dempsey *et al.* (2021), "keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang." Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi lingkungan.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai keseimbangan ini sangat beragam, mulai dari perubahan iklim hingga penurunan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, yang pada akhirnya berdampak negatif pada ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan harus mencakup strategi untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Penekanan pada inovasi teknologi dan praktik ramah lingkungan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan ini. Dengan menerapkan kebijakan yang mendorong pengembangan teknologi hijau, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

2. Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan aspek penting dalam kebijakan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang efektif harus mampu mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap air bersih, udara yang bersih, dan lingkungan yang sehat. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana kebutuhan masyarakat saat ini dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Lehtonen (2020), "pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat." Dengan pendekatan yang holistik, kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara bersamaan.

Penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan

pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu lingkungan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini juga akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Ketika masyarakat merasa terlibat, cenderung lebih berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan yang ada.

3. Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Perlindungan keanekaragaman hayati adalah aspek penting dari kebijakan lingkungan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati mencakup variasi dalam spesies, gen, dan ekosistem yang mendukung kehidupan di Bumi. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kita tidak hanya melindungi spesies yang terancam punah, tetapi juga memastikan bahwa ekosistem tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Menurut Díaz *et al.* (2019), "keanekaragaman hayati berperan kunci dalam stabilitas ekosistem dan penyediaan layanan ekosistem yang vital untuk kehidupan manusia." Oleh karena itu, kebijakan lingkungan yang efektif harus memprioritaskan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Penurunan keanekaragaman hayati dapat memiliki dampak serius pada ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi. Ketika spesies hilang, layanan ekosistem yang diberikan, seperti penyerbukan, pengendalian hama, dan pemeliharaan kualitas tanah, juga terancam. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem pertanian dan sumber daya alam lainnya yang bergantung pada keberagaman spesies. Oleh karena itu, perlindungan keanekaragaman hayati perlu menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan lingkungan. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa ekosistem tetap seimbang dan dapat menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh generasi saat ini dan mendatang.

4. Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi berperan penting dalam kebijakan lingkungan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan berkembangnya teknologi, kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan solusi yang

lebih efisien dan ramah lingkungan dalam berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, dan pertanian. Teknologi hijau, seperti energi terbarukan dan teknik pengelolaan limbah yang inovatif, dapat mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Menurut Ockwell *et al.* (2018), "inovasi teknologi yang berkelanjutan adalah kunci untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi sumber daya." Oleh karena itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam kebijakan lingkungan.

Penerapan teknologi yang inovatif tidak hanya membantu mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Misalnya, industri energi terbarukan tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keamanan energi. Dengan mengadopsi teknologi ramah lingkungan, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing. Selain itu, inovasi dalam teknologi pertanian, seperti sistem pertanian presisi, dapat meningkatkan hasil panen sekaligus mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk. Dengan demikian, sinergi antara inovasi teknologi dan kebijakan lingkungan dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang saling menguntungkan.



BAB VI

GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Globalisasi telah menjadi salah satu fenomena utama yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, globalisasi menawarkan peluang dan tantangan yang kompleks. Di satu sisi, integrasi ekonomi global memungkinkan transfer teknologi, pertukaran informasi, dan peningkatan investasi yang dapat mendukung pembangunan. Namun, di sisi lain, dampak negatif seperti ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya juga meningkat. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik dan pendekatan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa globalisasi memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak, tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

A. Dampak Globalisasi Pada Pembangunan Sosial

Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia, yang didorong oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan perdagangan internasional. Melalui globalisasi, batasan-batasan geografis dan budaya semakin kabur, menciptakan dunia yang lebih terhubung dan saling bergantung. Fenomena ini membawa dampak yang luas di berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya, dengan mempengaruhi cara hidup, pola produksi, serta pertukaran informasi di seluruh dunia.

Globalisasi membawa banyak perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dampak globalisasi perlu ditinjau dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keseimbangan antara kebutuhan masa kini

tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Berikut ini adalah beberapa dampak globalisasi pada pembangunan sosial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan:

1. Peningkatan Akses terhadap Pengetahuan dan Teknologi

Globalisasi telah meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan teknologi, yang berdampak signifikan pada pembangunan sosial. Akses lebih luas terhadap teknologi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat, memperbaiki keterampilan, dan meningkatkan inovasi di berbagai sektor. Teknologi digital juga memfasilitasi keterhubungan antar masyarakat, memperkuat inklusi sosial, serta meningkatkan kesadaran akan isu-isu global. Hal ini mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan masyarakat yang lebih adaptif dan berdaya. Menurut Kurniawan (2020), “peningkatan akses terhadap teknologi mendorong terciptanya peluang baru dalam pendidikan dan tenaga kerja, sehingga mempercepat proses transformasi sosial.”

Perkembangan teknologi juga berkontribusi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Melalui platform digital, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah dan institusi lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan menerima informasi terkait kebijakan. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan sumber daya juga memungkinkan penerapan prinsip efisiensi dan keberlanjutan. Dengan demikian, akses terhadap teknologi tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga menciptakan fondasi bagi tercapainya kesejahteraan jangka panjang. Hal ini memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

2. Peningkatan Mobilitas dan Migrasi Tenaga Kerja

Globalisasi telah meningkatkan mobilitas dan migrasi tenaga kerja secara signifikan, yang memberikan dampak besar pada pembangunan sosial. Mobilitas tenaga kerja yang lebih tinggi memungkinkan individu berpindah antar negara untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik, meningkatkan keterampilan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di negara tujuan. Migrasi ini juga memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang, yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, migrasi tenaga kerja juga menimbulkan tantangan baru terkait ketenagakerjaan, integrasi sosial, dan

perlindungan hak-hak pekerja. Menurut Santoso (2019), “mobilitas tenaga kerja yang lebih tinggi memerlukan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja migran di negara-negara tujuan.”

Peningkatan migrasi tenaga kerja juga dapat mengurangi tekanan ketenagakerjaan di negara asal. Dengan meningkatnya kesempatan kerja di luar negeri, tingkat pengangguran di negara asal dapat berkurang, sementara remitansi yang dikirim oleh para pekerja migran juga mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini menciptakan siklus pembangunan yang saling menguntungkan antara negara asal dan negara tujuan. Meski demikian, negara asal juga menghadapi tantangan seperti brain drain, di mana tenaga kerja terampil meninggalkan negara tersebut, yang dapat memperlambat pembangunan lokal. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mendorong migrasi teratur dan aman.

3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Globalisasi telah mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia, namun juga memperbesar ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini muncul karena distribusi manfaat dari globalisasi yang tidak merata, di mana negara-negara maju dan kelompok elite cenderung memperoleh keuntungan lebih besar dibanding negara-negara berkembang dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ketimpangan ini dapat memperburuk kondisi sosial, menciptakan pengangguran struktural, dan memperkuat jurang antara kaya dan miskin. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif dan adil. Menurut Setiawan (2021), "ketimpangan ekonomi yang diperburuk oleh globalisasi menuntut kebijakan redistribusi yang lebih efektif untuk menciptakan keadilan sosial."

Dampak dari ketimpangan sosial dan ekonomi juga terlihat dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Masyarakat yang berada di kelompok ekonomi rendah sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar ini, yang semakin memperkuat siklus kemiskinan. Pembangunan sosial yang berkelanjutan memerlukan strategi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan ketimpangan melalui kebijakan yang mendukung inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional untuk mengatasi kesenjangan tersebut secara sistematis.

4. Tantangan terhadap Nilai dan Identitas Lokal

Globalisasi tidak hanya membawa perubahan ekonomi dan teknologi, tetapi juga menantang nilai dan identitas lokal. Proses globalisasi sering kali mendorong homogenisasi budaya, di mana budaya global mendominasi nilai-nilai tradisional lokal. Hal ini dapat menyebabkan erosi identitas budaya, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pada pengaruh budaya global melalui media dan teknologi. Dalam kerangka pembangunan sosial yang berkelanjutan, menjaga keanekaragaman budaya sangat penting untuk mempertahankan warisan lokal dan memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Menurut Rahmawati (2022), “globalisasi telah menciptakan tantangan besar terhadap kelestarian budaya lokal, yang membutuhkan strategi khusus untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan tradisi.”

Tantangan terhadap nilai dan identitas lokal juga berdampak pada pola pikir dan gaya hidup masyarakat, yang semakin mengadopsi norma-norma global. Akibatnya, beberapa elemen budaya lokal mulai kehilangan relevansinya, seperti bahasa daerah dan upacara adat, yang sering kali diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak diatasi, fenomena ini dapat mengarah pada krisis identitas, di mana masyarakat kehilangan rasa keterikatan terhadap budaya asalnya. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan upaya pelestarian budaya lokal melalui pendidikan, kebijakan budaya, dan promosi pariwisata berbasis komunitas.

B. Hubungan Antar Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Dalam konteks global, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai secara individu oleh satu negara, karena banyak tantangan lingkungan, ekonomi, dan sosial bersifat lintas batas. Oleh karena itu, hubungan antar negara berperan penting dalam menciptakan sinergi, koordinasi, dan

kolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang hubungan antar negara dalam pembangunan berkelanjutan:

1. Kolaborasi Global melalui Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Kolaborasi global melalui Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berperan penting dalam menciptakan hubungan antarnegara yang lebih harmonis dan berkelanjutan. SDGs mencakup berbagai isu, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perubahan iklim, dan memerlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini, negara-negara dapat saling bertukar pengetahuan, teknologi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), “kolaborasi internasional menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang ambisius dan saling terintegrasi” (UNDP, 2020). Keterlibatan semua pihak dalam kolaborasi ini sangat penting untuk mengatasi tantangan global yang kompleks.

Salah satu contoh konkret dari kolaborasi global adalah inisiatif yang dilakukan oleh negara-negara dalam menangani perubahan iklim. Program-program seperti Paris Agreement menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperkuat ketahanan iklim. Selain itu, dukungan finansial dan teknis antara negara berkembang dan negara maju juga merupakan bagian integral dari upaya ini. Dengan adanya kerjasama seperti ini, negara-negara dapat saling mendukung dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan. Penguatan kolaborasi di bidang lingkungan hidup menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

2. Transfer Teknologi dan Pengetahuan

Transfer teknologi dan pengetahuan antar negara berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena memfasilitasi akses ke inovasi dan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kapasitas pembangunan. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat bertukar teknologi dan pengetahuan

yang diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, transfer ini tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan budaya negara penerima. Seperti yang diungkapkan oleh Mazzucato (2018), "Inovasi harus inklusif dan mampu menjawab tantangan global, termasuk perubahan iklim dan ketidakadilan sosial."

Pada konteks pembangunan berkelanjutan, transfer teknologi harus disertai dengan pengembangan kapasitas lokal agar teknologi yang diterima dapat digunakan secara efektif. Hal ini berarti bahwa negara penerima perlu membangun infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi baru. Proses ini melibatkan pelatihan, pendidikan, dan kolaborasi antara institusi penelitian dan industri. Kerjasama antara negara maju dan berkembang juga penting untuk memastikan bahwa teknologi yang ditransfer sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan cara ini, transfer teknologi menjadi lebih dari sekadar pengiriman perangkat keras; ia mencakup proses pembelajaran yang mendalam dan kolaboratif.

3. Pendanaan dan Kerjasama Ekonomi

Pendanaan dan kerjasama ekonomi antar negara merupakan elemen vital dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya. Kerjasama ini dapat mengambil berbagai bentuk, seperti investasi asing, bantuan bilateral, dan skema pembiayaan multilateral. Melalui mekanisme ini, negara-negara dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Sebagai contoh, investasi dalam teknologi ramah lingkungan tidak hanya membantu negara penerima mencapai target keberlanjutan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global. Seperti yang diungkapkan oleh Stiglitz (2019), "Pendanaan yang tepat dan kerjasama ekonomi dapat menciptakan sinergi yang mengarah pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan."

Pada konteks ini, penting bagi negara-negara untuk membangun kerangka regulasi yang memadai agar investasi asing dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan yang jelas dan transparan tidak hanya menarik minat investor, tetapi juga menjamin bahwa manfaat dari investasi

tersebut dirasakan oleh masyarakat lokal. Kerjasama antara negara-negara dapat memperkuat kapasitas institusi lokal dan mendorong pertukaran pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan proyek-proyek berkelanjutan. Selain itu, dengan adanya dukungan pendanaan yang konsisten, negara-negara dapat merencanakan dan melaksanakan proyek jangka panjang yang lebih efektif. Semua ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial, yang menjadi prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan.

4. Perdagangan Internasional dan Keberlanjutan

Perdagangan internasional berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan meningkatkan akses pasar bagi produk berkelanjutan, negara-negara dapat mendorong produksi yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial. Selain itu, perdagangan memungkinkan pertukaran teknologi dan inovasi yang diperlukan untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Negara-negara yang berfokus pada praktik perdagangan berkelanjutan dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Porter dan Kramer (2019), "Perdagangan yang berkelanjutan bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan nilai bersama bagi semua pihak yang terlibat."

Perdagangan internasional juga berkontribusi pada penyebaran praktik terbaik dalam keberlanjutan di seluruh dunia. Negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dapat belajar dari pengalaman satu sama lain, mengadopsi kebijakan yang sukses, dan mengimplementasikan standar lingkungan yang lebih tinggi. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat mengembangkan sistem yang menghargai keberlanjutan, seperti label hijau dan sertifikasi produk ramah lingkungan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk menegakkan aturan dan standar yang mendukung keberlanjutan. Dengan cara ini, perdagangan internasional dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

5. Diplomasi Lingkungan dan Kerjasama Multilateral

Diplomasi lingkungan dan kerjasama multilateral merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengingat banyak tantangan lingkungan bersifat global dan tidak mengenal batas negara. Melalui forum-forum internasional, negara-negara dapat berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan dan tindakan yang efektif dalam menangani masalah lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Kerjasama ini menciptakan kesepakatan dan komitmen kolektif untuk melindungi sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, diplomasi lingkungan membantu mengoordinasikan upaya mitigasi dan adaptasi, serta memfasilitasi transfer teknologi yang diperlukan untuk keberlanjutan. Seperti yang dinyatakan oleh Leal Filho (2020), "Diplomasi lingkungan merupakan jembatan yang menghubungkan kebijakan nasional dengan tanggung jawab global dalam mencapai keberlanjutan."

Kerjasama multilateral memberikan platform bagi negara-negara untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan. Melalui perjanjian internasional seperti Paris Agreement dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, negara-negara dapat menetapkan target yang ambisius dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mempromosikan solidaritas antara negara-negara dalam menghadapi tantangan lingkungan yang sama. Dalam konteks ini, penting bagi negara-negara untuk saling mendukung dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Dengan cara ini, diplomasi lingkungan dan kerjasama multilateral menjadi instrumen strategis dalam memfasilitasi perubahan yang diperlukan untuk keberlanjutan global.

C. Globalisasi Ekonomi dan Tantangan Lingkungan

Di era globalisasi yang semakin pesat, interaksi antarnegara dalam bidang ekonomi telah membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Meskipun globalisasi memberikan peluang untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan akses teknologi, tantangan lingkungan yang muncul akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan pencemaran lingkungan menjadi

isu yang tak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis hubungan antara globalisasi ekonomi dan tantangan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

1. Pengertian Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi adalah proses integrasi yang semakin meningkat di antara ekonomi negara-negara di dunia, yang ditandai dengan aliran barang, jasa, modal, dan informasi secara global. Proses ini dipicu oleh kemajuan teknologi, liberalisasi perdagangan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung investasi asing. Globalisasi ekonomi memungkinkan negara-negara untuk saling berinteraksi, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperluas pasar. Menurut Stiglitz (2018), "Globalisasi tidak hanya menciptakan peluang baru, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara dalam menjaga kesejahteraan masyarakat." Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk merumuskan strategi yang tepat agar dapat mengambil manfaat dari globalisasi ini tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.

Globalisasi ekonomi juga membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Banyak industri dalam negeri menghadapi tekanan akibat persaingan yang semakin ketat dengan produk-produk asing yang lebih murah dan berkualitas. Hal ini bisa menyebabkan penutupan usaha lokal dan peningkatan angka pengangguran jika tidak diimbangi dengan inovasi dan peningkatan kualitas. Selain itu, ketidakmerataan keuntungan dari globalisasi dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara negara kaya dan negara berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama internasional dan kebijakan yang inklusif.

2. Tantangan Lingkungan Akibat Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi dan interaksi antarnegara, tetapi dampak negatifnya terhadap lingkungan tidak dapat diabaikan. Tantangan lingkungan yang muncul akibat globalisasi memerlukan perhatian serius, terutama dalam pembangunan berkelanjutan yang berusaha mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan

lingkungan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tantangan lingkungan akibat globalisasi:

a. Peningkatan Eksploitasi Sumber Daya Alam

Peningkatan eksploitasi sumber daya alam sebagai dampak dari globalisasi menghadirkan tantangan besar bagi keberlanjutan lingkungan. Globalisasi mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, namun sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam banyak kasus, pengambilan sumber daya alam dilakukan secara berlebihan, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Hal ini memperburuk masalah perubahan iklim dan mengancam keanekaragaman hayati. Menurut Junaidi (2020), "Pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud jika eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan."

Peningkatan permintaan global terhadap sumber daya alam membuat negara-negara berkembang lebih rentan terhadap eksploitasi. Dengan adanya investasi asing yang tinggi, praktik penambangan dan perambahan hutan sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dalam upaya mengejar keuntungan ekonomi, banyak perusahaan mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsekuensinya, banyak komunitas lokal yang kehilangan akses terhadap sumber daya penting. Untuk itu, diperlukan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

b. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan akibat dampak globalisasi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sering kali disertai dengan peningkatan produksi limbah dan emisi polutan yang merusak lingkungan. Aktivitas industri, transportasi, dan urbanisasi yang meningkat memperburuk kualitas udara, air, dan tanah. Dalam konteks ini, pencemaran bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada ekosistem yang mendukung kehidupan. Menurut Rahardjo (2021), "Globalisasi telah memfasilitasi peningkatan pencemaran yang tidak terkontrol, sehingga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup generasi mendatang."

Seiring dengan meningkatnya perdagangan internasional, pergeseran produksi ke negara-negara dengan regulasi lingkungan yang lebih lemah juga menjadi perhatian. Banyak perusahaan memindahkan operasinya ke lokasi dengan biaya lingkungan yang lebih rendah, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Praktik ini menyebabkan pencemaran di negara-negara tersebut, yang sering kali tidak memiliki kapasitas untuk mengelola limbah yang dihasilkan. Selain itu, pencemaran tidak mengenal batas negara, sehingga dampaknya bisa dirasakan di wilayah lain melalui arus udara dan air. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan pencemaran lingkungan ini.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan lingkungan yang signifikan akibat globalisasi dalam pembangunan berkelanjutan. Globalisasi mendorong peningkatan aktivitas industri dan transportasi yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Peningkatan emisi ini mempercepat pemanasan global, yang berakibat pada perubahan pola cuaca dan peningkatan frekuensi bencana alam. Hal ini juga mengancam ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, dan kesehatan manusia. Menurut Widiyanto (2022), "Perubahan iklim yang dipicu oleh aktivitas manusia harus diatasi dengan upaya kolaboratif yang melibatkan semua sektor untuk mencapai keberlanjutan."

Negara-negara berkembang sering kali menjadi yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, meskipun tidak berkontribusi besar terhadap emisi global. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan, serta kehilangan habitat dan keanekaragaman hayati. Selain itu, globalisasi sering kali menyebabkan pergeseran dalam penggunaan lahan, dari pertanian tradisional menjadi penggunaan lahan untuk industri dan infrastruktur, yang memperburuk dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional dan internasional.

d. Pengalihan Polusi Antarnegara

Pengalihan polusi antarnegara menjadi salah satu tantangan serius dalam konteks globalisasi dan pembangunan berkelanjutan. Proses globalisasi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi sering kali mendorong perusahaan untuk memindahkan kegiatan produksi ke negara-negara dengan regulasi lingkungan yang lebih longgar. Praktik ini tidak hanya mengakibatkan penumpukan limbah dan pencemaran di negara tujuan, tetapi juga merugikan masyarakat lokal yang sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menangani dampak tersebut. Selain itu, pencemaran yang dihasilkan dari pengalihan ini tidak mengenal batas negara, sehingga masalahnya bisa menyebar ke negara lain melalui udara dan air. Menurut Nugroho (2019), "Pengalihan polusi antarnegara merupakan dampak negatif dari globalisasi yang memerlukan kerjasama internasional untuk mitigasi dan penyelesaian masalah lingkungan."

Dampak pengalihan polusi sering kali terlihat pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Negara-negara yang menerima polusi ini sering kali menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk penyakit pernapasan dan penyakit akibat paparan bahan kimia berbahaya. Hal ini semakin memperburuk ketidakadilan sosial, di mana masyarakat miskin menjadi yang paling terpukul oleh dampak negatif ini. Dalam banyak kasus, negara-negara berkembang tidak memiliki sumber daya atau teknologi yang cukup untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kerjasama lintas negara untuk mengelola dan mengurangi polusi yang dipindahkan.

BAB VII

KETIMPANGAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ketimpangan sosial merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan, yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini muncul akibat perbedaan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan peluang ekonomi yang sering kali menguntungkan kelompok tertentu, sementara yang lain terpinggirkan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penting untuk mengatasi ketimpangan sosial agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan menjadi krusial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

A. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Negara Berkembang

Ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang merupakan isu penting yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya perbedaan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan kerja, banyak individu dan kelompok terpinggirkan dari perkembangan ekonomi. Masalah ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan ketimpangan ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

1. Definisi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi merujuk pada kondisi di mana terdapat perbedaan akses terhadap sumber daya dan kesempatan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Perbedaan ini

mencakup aspek seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan, yang menciptakan kesenjangan antara individu atau kelompok. Ketimpangan ini sering kali memperburuk kemiskinan dan menghalangi mobilitas sosial, sehingga memperparah kondisi kelompok yang kurang beruntung. Menurut Piketty (2018), ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan ketegangan sosial yang mendalam dan berpotensi merusak tatanan demokrasi di masyarakat. Dengan demikian, ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi isu sentral yang perlu diatasi untuk mencapai keadilan sosial.

Salah satu penyebab utama ketimpangan sosial dan ekonomi adalah distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar sumber daya. Ketidaksetaraan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan kondisi pasar tenaga kerja. Kelompok masyarakat dengan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit dihindari. Di sisi lain, kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap peluang ekonomi cenderung terus memperkaya diri. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk mengurangi ketimpangan ini.

2. Penyebab Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Penyebabnya dapat dilihat dari sudut pandang historis, struktural, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Ketimpangan ini sering kali mencerminkan perbedaan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Berikut adalah beberapa penyebab utama ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang:

a. Akses Tidak Merata terhadap Pendidikan

Akses tidak merata terhadap pendidikan merupakan salah satu penyebab utama ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang. Ketika akses terhadap pendidikan terbatas, banyak individu yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Akibatnya, sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan tidak mampu memperbaiki taraf hidup. Selain

itu, pendidikan yang tidak merata juga memperparah ketidaksetaraan antara kelompok kaya dan miskin, di mana yang memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kesempatan ekonomi yang lebih baik. Menurut Ladd (2020), pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, karena memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua individu.

Ketidakterataan akses pendidikan juga berdampak pada mobilitas sosial, di mana individu dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung cenderung tetap berada di posisi yang sama tanpa peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ketiadaan akses pendidikan yang memadai membatasi kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, karena berkontribusi terhadap stagnasi ekonomi. Dalam jangka panjang, ketimpangan pendidikan dapat memperkuat ketidaksetaraan ekonomi yang sudah ada, menghalangi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk memperbaiki akses terhadap pendidikan sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

b. Distribusi Kekayaan yang Tidak Seimbang

Distribusi kekayaan yang tidak seimbang adalah salah satu penyebab utama ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang. Ketika kekayaan terpusat pada segelintir individu atau kelompok, sebagian besar populasi kesulitan mengakses sumber daya dan peluang ekonomi yang memadai. Ketimpangan ini menciptakan jurang antara yang kaya dan miskin, yang semakin memperlebar ketidaksetaraan sosial. Orang-orang yang berada di puncak piramida ekonomi sering kali memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang bisnis, sementara yang lain terjebak dalam siklus kemiskinan. Menurut Oxfam (2019), distribusi kekayaan yang tidak seimbang memperburuk ketimpangan, di mana 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak kekayaan daripada 50% populasi global.

Distribusi kekayaan yang timpang juga berdampak negatif pada mobilitas sosial. Di negara-negara berkembang, yang lahir

di keluarga miskin cenderung sulit meningkatkan taraf hidup karena akses ke sumber daya ekonomi sangat terbatas. Kondisi ini memperparah ketidakadilan antar generasi, di mana kekayaan dan kemiskinan sering kali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini menyebabkan kesenjangan yang terus melebar antara kelompok masyarakat yang berbeda, yang pada akhirnya membatasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, redistribusi kekayaan yang lebih adil diperlukan untuk mengurangi ketimpangan sosial.

c. Kebijakan Ekonomi yang Tidak Inklusif

Kebijakan ekonomi yang tidak inklusif menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang. Kebijakan yang tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan marginal, cenderung memperparah ketidaksetaraan. Ketika kebijakan hanya menguntungkan segelintir pihak, seperti elit ekonomi atau kelompok tertentu, mayoritas masyarakat tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Akibatnya, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin melebar, menciptakan ketidakadilan yang sistemik. Menurut Stiglitz (2020), kebijakan ekonomi yang tidak inklusif menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperdalam ketimpangan karena hanya memperkuat struktur kekuasaan dan kekayaan yang ada.

Kebijakan ekonomi yang tidak inklusif juga menghambat mobilitas sosial, yang membuat individu dari kelompok ekonomi lemah sulit meningkatkan taraf hidup. Hal ini sering disebabkan oleh kebijakan yang tidak memperhitungkan kebutuhan kelompok miskin, seperti kurangnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah tertinggal. Tanpa dukungan dari kebijakan yang inklusif, kelompok ini terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diatasi. Situasi ini menambah ketimpangan antar daerah dan antar kelompok sosial, di mana daerah perkotaan dan kelompok elit mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan daerah pedesaan dan masyarakat miskin.

d. Ketergantungan pada Sektor Ekonomi Tradisional

Ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang. Sektor ini, yang sering kali meliputi pertanian subsisten, perikanan, dan kerajinan tangan, cenderung tidak memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada sektor ini sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan, dengan akses terbatas pada sumber daya yang lebih produktif. Selain itu, ketergantungan ini mengurangi peluang diversifikasi ekonomi, yang seharusnya dapat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Menurut Rodrik (2018), ketergantungan yang berkelanjutan pada sektor ekonomi tradisional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperdalam ketimpangan sosial.

Keterbatasan dalam sektor ekonomi tradisional juga mengakibatkan rendahnya produktivitas, yang berimplikasi langsung terhadap pendapatan masyarakat. Banyak pekerjaan di sektor ini yang bersifat informal dan tidak terjamin, sehingga memberikan sedikit perlindungan bagi pekerja. Ketiadaan teknologi modern dan metode produksi yang efisien lebih lanjut menghambat peningkatan hasil produksi. Sebagai akibatnya, masyarakat yang terlibat dalam sektor tradisional ini kesulitan untuk bersaing di pasar yang semakin global. Dengan mengabaikan potensi sektor-sektor yang lebih inovatif dan produktif, negara berkembang berisiko kehilangan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

3. Dampak Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang memiliki berbagai dampak negatif yang meluas, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak yang signifikan:

a. Meningkatnya Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Peluang

Ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang telah berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kemiskinan dan

ketidaksetaraan peluang. Dalam banyak kasus, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas sangat terbatas bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, memperburuk situasi kemiskinan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, sebagian besar penduduk tetap terperangkap dalam siklus kemiskinan, sementara segelintir individu mengakumulasi kekayaan yang tidak proporsional. Menurut Duflo (2020), "Ketidaksetaraan adalah musuh besar bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang." Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial harus dilakukan secara holistik, dengan fokus pada peningkatan akses terhadap sumber daya dan kesempatan.

Ketidaksetaraan peluang menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi inovasi dan perkembangan sosial. Banyak individu di negara berkembang tidak memiliki akses yang memadai untuk memanfaatkan teknologi baru dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan menciptakan hambatan bagi mobilitas sosial. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan kapasitas dan pemberdayaan individu, terutama di kalangan generasi muda. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

b. Ketidakstabilan Sosial dan Konflik

Ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang sering kali menjadi pemicu ketidakstabilan sosial dan konflik. Ketika sekelompok kecil individu mengakumulasi kekayaan yang signifikan sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidakpuasan dapat tumbuh di kalangan kelompok yang terpinggirkan. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan sering kali menciptakan ketegangan antara berbagai lapisan masyarakat. Menurut Collier (2018), "Ketidakstabilan sosial yang diakibatkan oleh ketimpangan dapat memperburuk konflik dan menghambat kemajuan pembangunan." Akibatnya, negara berkembang berisiko

mengalami ketidakpastian yang berkelanjutan dan potensi untuk kekerasan sosial.

Konflik yang timbul dari ketimpangan ini sering kali mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan menghalangi upaya pembangunan yang berkelanjutan. Ketika individu merasa tidak terwakili dan tidak memiliki akses terhadap peluang yang adil, mungkin resort to tindakan kekerasan sebagai cara untuk menyuarakan ketidakpuasan. Situasi ini menciptakan lingkaran setan di mana ketidakstabilan menghalangi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan ini dengan cara yang konstruktif. Salah satu solusi adalah mendorong dialog sosial yang inklusif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil.

c. Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat

Ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang sering kali berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Ketika pendapatan dan sumber daya terdistribusi secara tidak merata, sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menghambat potensi produktivitas dan inovasi, yang sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Menurut Piketty (2020), "Ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya menciptakan ketidakpuasan sosial tetapi juga merusak kemampuan suatu negara untuk tumbuh secara berkelanjutan." Akibatnya, ketimpangan dapat mengakibatkan stagnasi ekonomi yang memperburuk keadaan bagi kelompok masyarakat yang sudah terpinggirkan.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan penurunan investasi dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Ketika pemerintah dan sektor swasta menghadapi keterbatasan sumber daya, alokasi anggaran cenderung berpihak pada kelompok yang lebih kaya, mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih luas. Kurangnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh

karena itu, pendekatan yang holistik dan berbasis inklusi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Menerapkan kebijakan yang mendukung akses pendidikan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk memecahkan masalah ini.

d. Erosi Modal Sosial dan Kohesi Sosial

Ketimpangan sosial dan ekonomi di negara berkembang dapat menyebabkan erosi modal sosial dan kohesi sosial yang signifikan. Ketika kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, hubungan antarindividu dalam masyarakat menjadi semakin tegang. Rasa saling percaya dan kolaborasi yang sebelumnya ada dalam komunitas sering kali tergantikan oleh ketidakpuasan dan kecurigaan. Menurut Putnam (2019), "Erosi modal sosial yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan dapat mengancam kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara efektif." Hal ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial tetapi juga mengurangi partisipasi warga dalam aktivitas komunitas yang konstruktif.

Kohesi sosial yang rendah dapat mengarah pada meningkatnya konflik dan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat. Ketika individu merasa terpinggirkan atau tidak memiliki suara, lebih mungkin terlibat dalam tindakan negatif, seperti protes atau kekerasan. Fenomena ini menciptakan siklus di mana ketidakadilan sosial terus berlanjut, merusak ikatan sosial yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi strategi yang berfokus pada penguatan modal sosial melalui keterlibatan masyarakat dan dialog yang terbuka. Upaya untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan solidaritas sangat penting dalam menciptakan kembali hubungan antar anggota masyarakat.

B. Marginalisasi Kelompok Rentan dalam Proses Pembangunan

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma yang mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kemajuan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pembangunan sering kali mengabaikan atau bahkan memperburuk kondisi kelompok rentan, yang

mencakup perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok berpendapatan rendah. Marginalisasi ini terjadi karena berbagai faktor struktural dan sistemik yang menghalangi akses terhadap sumber daya, layanan, dan peluang yang sama dalam pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan agar pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara adil. Marginalisasi kelompok rentan dalam pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa aspek penting, antara lain:

1. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Ketidakadilan sosial dan ekonomi merupakan isu krusial yang berkontribusi pada marginalisasi kelompok rentan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Kelompok-kelompok tersebut sering kali menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses sumber daya dan peluang, yang mengakibatkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penjaminan keadilan sosial bagi semua kelompok, terutama yang paling rentan. Hal ini sejalan dengan pandangan Elkington (2018) yang menyatakan bahwa "tanpa keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan tidak akan pernah terwujud." Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan aspek keadilan sosial dalam setiap strategi pembangunan agar semua individu dapat berpartisipasi secara aktif.

Marginalisasi kelompok rentan sering kali diperparah oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan yang tidak inklusif dan stigma sosial. Ketidakadilan ini dapat terlihat dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Akibatnya, marginalisasi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana kelompok rentan terus berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, upaya pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, mendapatkan manfaat yang setara.

2. Kurangnya Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek penting yang berkontribusi pada marginalisasi kelompok rentan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Ketika kelompok-kelompok ini tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, suaranya sering kali diabaikan, sehingga kebutuhan dan aspirasinya tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan kebijakan dan program pembangunan yang tidak inklusif, yang berpotensi memperdalam ketidakadilan sosial dan ekonomi. Menurut Cornwall (2019), "partisipasi yang bermakna adalah kunci untuk memastikan bahwa semua suara didengar dalam proses pembangunan." Oleh karena itu, menciptakan saluran partisipasi yang efektif sangat penting untuk memberdayakan kelompok rentan.

Marginalisasi yang dialami oleh kelompok rentan sering kali diperburuk oleh ketidakadilan struktural yang menghalangi akses terhadap proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam banyak konteks, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas sering kali tidak memiliki representasi yang memadai dalam forum-forum di mana keputusan penting dibuat. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak mencerminkan kebutuhan, sehingga mengabaikan isu-isu krusial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, meningkatkan partisipasi kelompok rentan bukan hanya sebuah keharusan moral, tetapi juga strategi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Akses Terbatas terhadap Sumber Daya

Akses terbatas terhadap sumber daya menjadi salah satu aspek penting yang memicu marginalisasi kelompok rentan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kelompok-kelompok ini sering kali menghadapi berbagai hambatan yang menghalanginya untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Tanpa akses yang memadai, tidak dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan, yang pada gilirannya memperdalam ketidakadilan sosial. Menurut Sen (2021), "akses terhadap sumber daya adalah hak asasi yang fundamental, dan tanpa itu, pencapaian kesejahteraan yang berkelanjutan tidak

mungkin terwujud." Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan merombak kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, dapat mengakses sumber daya yang diperlukan.

Sumber daya yang terbatas sering kali terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau kelompok, menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan. Hal ini terutama terlihat dalam konteks pertanian, di mana petani kecil dan masyarakat adat sering kali tidak memiliki hak atas tanah atau akses terhadap teknologi modern. Ketidakadilan ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi juga berkontribusi pada ketidakamanan pangan dan masalah kesehatan. Untuk mengatasi isu ini, dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta upaya untuk memperkuat hak-haknya atas sumber daya. Melalui langkah-langkah ini, akses yang lebih adil dapat diciptakan, memungkinkan semua individu untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

4. Dampak Lingkungan yang Tidak Seimbang

Dampak lingkungan yang tidak seimbang menjadi salah satu aspek penting yang berkontribusi pada marginalisasi kelompok rentan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Ketika sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, kelompok-kelompok yang paling terpukul adalah yang bergantung pada lingkungan untuk kehidupan sehari-hari. Dampak negatif ini dapat berupa pencemaran, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang semuanya secara langsung mempengaruhi kualitas hidup kelompok rentan. Menurut Martinez-Alier (2020), "marginalisasi lingkungan berakar pada ketidakadilan sosial dan ekonomi yang membuat kelompok rentan lebih rentan terhadap dampak negatif dari kerusakan lingkungan." Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan perspektif lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan agar dampak yang tidak seimbang dapat diminimalisir.

Kelompok rentan, seperti komunitas lokal dan masyarakat adat, sering kali tidak memiliki suara dalam keputusan yang berdampak pada lingkungan. Ketidakadilan ini memperburuk keadaan, membuatnya lebih rentan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Selain itu, sering kali kurang memiliki sumber daya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang semakin memperdalam ketidaksetaraan.

Dalam hal ini, pengakuan terhadap hak-hak kelompok rentan sangat penting untuk memastikan bahwa dapat berkontribusi dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Dengan memberikan ruang bagi partisipasinya, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Solusi untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial dalam Pembangunan

Ketimpangan sosial dalam pembangunan adalah permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Ketimpangan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik. Untuk mengatasi ketimpangan sosial ini, berbagai solusi dapat diimplementasikan, baik dari sisi kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, maupun peran sektor swasta. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif menjadi solusi yang sangat relevan dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam pembangunan. Konsep pendidikan ini mengedepankan prinsip bahwa semua anak, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan mengintegrasikan anak-anak dari berbagai latar belakang, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, pendidikan inklusif tidak hanya meningkatkan akses pendidikan tetapi juga mendorong kesetaraan sosial. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman, serta mengurangi stigma terhadap individu dengan disabilitas. Menurut Kurniasih (2020), "Pendidikan inklusif adalah langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang."

Penerapan pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan diharapkan dapat memperkuat rasa solidaritas dan saling pengertian antar siswa. Melalui interaksi yang terjadi di dalam kelas yang inklusif, siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan memahami pengalaman orang lain. Hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya inklusi,

pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan masyarakat, dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif.

2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam pembangunan. Konsep ini berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja yang layak. Pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat. Menurut Hossain (2021), "Pembangunan ekonomi berkelanjutan memberikan kerangka kerja untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dengan cara yang adil dan inklusif, sehingga semua orang dapat berkontribusi dan memperoleh manfaat."

Pembangunan ekonomi berkelanjutan juga mendorong inovasi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan, perusahaan dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Langkah ini akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih tangguh dan mampu bertahan di tengah tantangan global, seperti perubahan iklim dan krisis energi. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan yang lebih adil dan seimbang. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mengimplementasikan strategi pembangunan yang berkelanjutan.

3. Akses Layanan Kesehatan yang Merata

Akses layanan kesehatan yang merata merupakan solusi kunci dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam pembangunan. Ketimpangan dalam layanan kesehatan sering kali menyebabkan perbedaan besar dalam kualitas hidup, di mana kelompok masyarakat yang kurang beruntung mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan yang diperlukan. Dengan memastikan akses yang setara bagi semua individu,

termasuk yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki kebutuhan khusus, kita dapat meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan. Akses yang merata tidak hanya mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga keterjangkauan biaya, yang sangat penting dalam mendukung kesehatan masyarakat. Menurut Purnamasari (2023), "Akses layanan kesehatan yang merata adalah prasyarat bagi pembangunan sosial yang inklusif, yang memungkinkan setiap individu untuk mencapai potensi kesehatan terbaik."

Memastikan akses layanan kesehatan yang merata juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Ketika masyarakat merasa bahwa mendapatkan layanan yang adil dan berkualitas, lebih cenderung untuk menggunakan layanan kesehatan yang tersedia. Ini, pada gilirannya, dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dapat mendukung pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, yang penting untuk mengurangi angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, penguatan sistem kesehatan melalui akses yang merata menjadi landasan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

4. Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Komunitas

Partisipasi masyarakat dan pemberdayaan komunitas merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi ketimpangan sosial dalam pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dapat memberikan input yang penting terkait kebutuhan dan aspirasinya. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan lebih sesuai dengan konteks lokal. Pemberdayaan komunitas memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Menurut Setiawan (2019), "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kunci untuk menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan, di mana setiap suara dihargai dan diakui."

Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dengan menciptakan rasa tanggung jawab kolektif. Ketika anggota komunitas terlibat langsung, lebih cenderung

menjaga dan melestarikan hasil-hasil pembangunan yang dicapai. Pemberdayaan komunitas juga berfungsi untuk membangun jaringan sosial yang kuat, yang dapat membantu individu dalam mendapatkan dukungan di saat dibutuhkan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan berkolaborasi dalam menemukan solusi yang tepat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya sekadar bagian dari proses, tetapi merupakan inti dari pembangunan yang inklusif.

5. Kebijakan Publik yang Adil

Kebijakan publik yang adil merupakan salah satu solusi penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dalam pembangunan. Kebijakan yang dirancang dengan prinsip keadilan sosial dapat membantu menjamin bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan dasar. Ini mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Dalam proses perumusan kebijakan, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok yang terpinggirkan, agar suaranya didengar dan kebutuhannya terpenuhi. Menurut Nurbaiti (2020), "Kebijakan publik yang adil berperan sebagai instrumen untuk meruntuhkan tembok ketidaksetaraan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif."

Penerapan kebijakan publik yang adil juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Dengan memastikan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan data dan bukti yang solid, masyarakat dapat lebih percaya pada pemerintah dan sistem yang ada. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan diwakili, cenderung mendukung inisiatif yang diambil dan berkontribusi pada keberhasilan implementasinya. Ini juga berarti bahwa pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang efektif untuk memonitor dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan. Dengan cara ini, kebijakan publik tidak hanya menjadi alat untuk mengatasi ketimpangan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

BAB VIII

PERAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Peran teknologi dalam pembangunan berkelanjutan semakin penting di era modern ini, seiring dengan meningkatnya tantangan lingkungan dan sosial. Inovasi teknologi menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan, pembangunan dapat dilakukan tanpa merusak ekosistem yang ada, sehingga memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu, teknologi juga memfasilitasi akses informasi dan pengetahuan, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam strategi pembangunan tidak hanya mendukung efisiensi dan efektivitas, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

A. Inovasi Teknologi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Inovasi teknologi berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang diusung oleh PBB. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Dalam konteks ini, inovasi teknologi tidak hanya berfokus pada pengembangan produk baru, tetapi juga pada cara-cara baru dalam melakukan bisnis, pengelolaan sumber daya, dan interaksi sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai inovasi teknologi untuk pembangunan berkelanjutan:

1. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya merupakan aspek penting dalam inovasi teknologi yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, perusahaan dan organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak lingkungan. Inovasi yang terfokus pada efisiensi sumber daya juga berpotensi meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global. Dalam konteks ini, teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi menjadi kunci untuk mengurangi jejak karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagaimana diungkapkan oleh Bocken *et al.* (2019), "Inovasi yang mendukung efisiensi sumber daya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan."

Implementasi teknologi efisien tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomis. Misalnya, perusahaan yang menerapkan praktik efisiensi sumber daya dapat mengurangi biaya operasional melalui pengurangan konsumsi energi dan bahan baku. Ini menciptakan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi yang berkelanjutan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dapat menarik perhatian konsumen yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan. Dengan demikian, efisiensi sumber daya dapat menjadi pendorong inovasi yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak.

2. Energi Terbarukan

Energi terbarukan berperan krusial dalam inovasi teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sumber energi seperti matahari, angin, dan biomassa menawarkan alternatif yang ramah lingkungan terhadap bahan bakar fosil yang terbatas dan mencemari. Dengan memanfaatkan teknologi yang efisien dan inovatif, penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu mitigasi perubahan iklim. Selain itu, investasi dalam energi terbarukan juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ketahanan energi suatu negara. Seperti yang dinyatakan oleh IRENA (2020), "Transisi ke energi terbarukan adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global."

Pemanfaatan energi terbarukan berkontribusi pada diversifikasi sumber energi, yang sangat penting untuk mengurangi ketergantungan

pada sumber daya yang tidak terbarukan. Inovasi dalam teknologi penyimpanan energi, seperti baterai dan sistem penyimpanan energi lainnya, memungkinkan penggunaan energi terbarukan yang lebih efisien. Teknologi ini tidak hanya mendukung kestabilan pasokan energi tetapi juga memberikan solusi bagi tantangan intermittency yang sering dihadapi oleh sumber energi terbarukan. Lebih lanjut, pengembangan infrastruktur energi yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan akses energi bagi masyarakat yang belum terlayani. Dengan demikian, energi terbarukan merupakan pilar penting dalam menciptakan sistem energi yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Transportasi Berkelanjutan

Transportasi berkelanjutan merupakan elemen vital dalam inovasi teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sistem transportasi yang ramah lingkungan tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga meningkatkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi seperti kendaraan listrik, sistem transportasi publik yang efisien, dan infrastruktur ramah sepeda, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Menurut Creutzig *et al.* (2018), "Transformasi menuju sistem transportasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan iklim dan memperbaiki kualitas hidup di perkotaan." Dengan pendekatan yang inovatif, transportasi berkelanjutan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang hijau.

Penerapan teknologi dalam transportasi berkelanjutan juga mendukung pengembangan kota cerdas. Konsep kota cerdas mencakup penggunaan data dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi, mengurangi kemacetan, dan memfasilitasi mobilitas yang lebih baik. Inovasi dalam sistem manajemen lalu lintas dan transportasi publik berbasis aplikasi dapat mengoptimalkan perjalanan dan mengurangi waktu tempuh. Selain itu, integrasi berbagai moda transportasi, seperti bus, kereta, dan sepeda, dapat memberikan solusi mobilitas yang lebih fleksibel dan efisien. Dengan demikian, teknologi berperan kunci dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan adaptif.

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan aspek krusial dalam inovasi teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. TIK memungkinkan pengumpulan, analisis, dan penyebaran data yang lebih efisien, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang berbasis informasi. Melalui platform digital, masyarakat dapat terhubung dan berkolaborasi dalam inisiatif yang berfokus pada keberlanjutan, dari pertanian cerdas hingga pengelolaan sumber daya alam. Sebagaimana dinyatakan oleh Gichoya (2021), "TIK memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan akses informasi dan memperkuat partisipasi masyarakat." Dengan memanfaatkan TIK, proses inovasi dapat dipercepat dan dampaknya dapat diperluas.

Implementasi TIK dalam sektor publik dan swasta juga berkontribusi pada efisiensi operasional dan transparansi. Sistem manajemen berbasis TIK memungkinkan pemantauan penggunaan sumber daya yang lebih baik, mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, TIK dapat mendukung pengembangan solusi berbasis data untuk masalah-masalah lingkungan, seperti perubahan iklim dan polusi. Akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan juga membantu masyarakat dalam membuat pilihan yang lebih berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, TIK berfungsi sebagai penggerak inovasi yang membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif.

B. Teknologi Hijau dalam Ekonomi Sirkular

Teknologi hijau telah menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks ekonomi sirkular. Inovasi ini berfokus pada pengembangan solusi yang mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan teknologi seperti energi terbarukan, material daur ulang, dan proses produksi yang ramah lingkungan, teknologi hijau tidak hanya meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi limbah, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan produk dan layanan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, teknologi hijau juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praktik

berkelanjutan, yang pada gilirannya mendorong perubahan perilaku dan adopsi pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

Pada kerangka ekonomi sirkular, teknologi hijau memungkinkan terciptanya model bisnis yang lebih inovatif dan berkelanjutan, di mana setiap fase dari siklus hidup produk dirancang untuk mengurangi pemborosan dan memaksimalkan nilai sumber daya. Dengan mengedepankan prinsip daur ulang dan perpanjangan umur produk, ekonomi sirkular bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat beroperasi dalam batasan kapasitas lingkungan. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan ekosistem, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan daya saing industri, dan menghasilkan lapangan kerja di sektor-sektor yang berfokus pada keberlanjutan. Dengan demikian, kolaborasi antara teknologi hijau dan prinsip ekonomi sirkular merupakan kunci untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan resilien terhadap tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai peran teknologi hijau dalam pembangunan berkelanjutan melalui prinsip-prinsip ekonomi sirkular:

1. Pengurangan Limbah

Pengurangan limbah adalah salah satu peran penting teknologi hijau dalam pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Dalam ekonomi sirkular, limbah dianggap sebagai sumber daya yang berpotensi digunakan kembali, diolah, atau didaur ulang, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Implementasi teknologi hijau, seperti sistem manajemen limbah yang efisien dan proses produksi yang ramah lingkungan, sangat mendukung upaya ini. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan konsumsi yang meningkat, pendekatan sirkular menjadi semakin relevan dalam meminimalisir dampak lingkungan. Menurut Geissdoerfer *et al.* (2018), "Ekonomi sirkular merupakan paradigma yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan nilai baru melalui inovasi berkelanjutan."

Penerapan teknologi hijau dalam konteks pengurangan limbah juga membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi yang lebih baik dan mengurangi biaya operasional. Dengan memanfaatkan bahan baku yang dapat diperbaharui dan metode produksi yang lebih bersih, perusahaan dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan. Selain itu,

pengurangan limbah juga berdampak positif terhadap reputasi perusahaan di mata konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung ekonomi sirkular dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Implementasi regulasi yang mendukung, seperti insentif untuk inovasi hijau, akan mendorong adopsi teknologi ini.

2. Penghematan Sumber Daya

Penghematan sumber daya merupakan salah satu peran utama teknologi hijau dalam pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Dalam konteks ini, teknologi hijau berfokus pada penggunaan inovasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan mengurangi limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Dengan merancang produk yang lebih tahan lama dan dapat didaur ulang, perusahaan dapat mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga mengurangi biaya operasional bagi perusahaan. Menurut Kirchgeorg *et al.* (2020), "Ekonomi sirkular berupaya untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan."

Pada praktiknya, penghematan sumber daya melalui teknologi hijau dapat dilakukan dengan mengadopsi berbagai metode, seperti penggunaan energi terbarukan dan material yang ramah lingkungan. Proses produksi yang lebih efisien, seperti daur ulang dan pemulihan energi, menjadi penting untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar yang semakin memperhatikan keberlanjutan. Selain itu, penghematan sumber daya juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang langka. Upaya ini akan membantu menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan dan berinovasi di seluruh sektor.

3. Inovasi Produk dan Layanan

Inovasi produk dan layanan berperan krusial dalam teknologi hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Dengan menciptakan produk yang

lebih efisien, ramah lingkungan, dan mudah didaur ulang, perusahaan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, inovasi dalam layanan, seperti model berbagi atau penyewaan, dapat mengurangi kebutuhan untuk memproduksi barang baru, sehingga memperpanjang siklus hidup produk yang ada. Dengan berfokus pada keberlanjutan, perusahaan tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen yang semakin sadar lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru. Menurut Bocken *et al.* (2019), "Inovasi dalam produk dan layanan yang berkelanjutan adalah kunci untuk memfasilitasi transisi menuju ekonomi sirkular yang lebih produktif dan efisien."

Penerapan inovasi produk dan layanan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi konsumen yang lebih memilih solusi yang berkelanjutan. Misalnya, perusahaan yang menawarkan produk dengan bahan daur ulang atau proses produksi yang ramah lingkungan dapat menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan. Ini menciptakan peluang pasar baru dan memperkuat posisi kompetitif di pasar global. Selain itu, dengan mengintegrasikan teknologi hijau ke dalam desain produk, perusahaan dapat mengurangi biaya jangka panjang melalui efisiensi energi dan pengurangan limbah. Dengan demikian, inovasi menjadi penggerak utama dalam menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan masa depan.

4. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan

Meningkatkan kesadaran dan pendidikan merupakan peran penting teknologi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Dalam konteks ini, teknologi hijau dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, dan praktik berkelanjutan lainnya. Melalui program pendidikan yang efektif, individu dan komunitas dapat memahami cara-cara untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Masyarakat yang teredukasi akan lebih cenderung untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti daur ulang dan penggunaan energi terbarukan. Menurut Wiek *et al.* (2019), "Pendidikan untuk keberlanjutan adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan dan siap menghadapi tantangan ekonomi sirkular."

Penggunaan teknologi hijau dalam pendidikan juga menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Dengan memanfaatkan alat dan platform digital, informasi tentang praktik berkelanjutan dapat disampaikan dengan cara yang lebih efektif dan mudah dipahami. Ini memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek praktis yang berfokus pada keberlanjutan, sehingga meningkatkan pengalaman belajar. Selain itu, teknologi dapat memfasilitasi kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan program pendidikan yang berfokus pada ekonomi sirkular. Hal ini akan memperkuat kesadaran kolektif dan mendorong tindakan nyata dalam masyarakat.

5. Kolaborasi dan Kemitraan

Kolaborasi dan kemitraan menjadi peran penting teknologi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui prinsip-prinsip ekonomi sirkular. Dalam konteks ini, berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, perlu bekerja sama untuk mengembangkan solusi inovatif yang ramah lingkungan. Melalui kemitraan yang kuat, sumber daya dan pengetahuan dapat dibagikan secara efektif, memungkinkan penerapan teknologi hijau yang lebih luas dan efisien. Ini juga menciptakan sinergi dalam upaya mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Menurut Sweeney *et al.* (2021), "Kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk mendorong adopsi teknologi hijau dan mempercepat transisi menuju ekonomi sirkular."

Dengan membangun jaringan kolaborasi, setiap pemangku kepentingan dapat saling melengkapi dan meningkatkan kapasitas masing-masing dalam penerapan teknologi hijau. Misalnya, perusahaan dapat berkolaborasi dengan lembaga penelitian untuk mengembangkan produk yang lebih berkelanjutan, sementara pemerintah dapat mendukung melalui kebijakan yang menguntungkan. Kemitraan ini juga dapat menciptakan peluang bisnis baru yang berfokus pada keberlanjutan, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi. Selain itu, kolaborasi dapat mempercepat pengembangan dan distribusi teknologi yang membantu masyarakat mengadopsi praktik ekonomi sirkular. Dengan cara ini, kolaborasi dan kemitraan tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif.

C. Teknologi dan Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Sosial

Teknologi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan sosial, baik positif maupun negatif. Dalam konteks lingkungan, perkembangan teknologi sering kali meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi, namun di sisi lain juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan melalui produksi limbah dan polusi. Secara sosial, teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan hidup, namun juga memunculkan tantangan seperti ketimpangan digital dan pengurangan interaksi tatap muka. Berikut adalah beberapa dampak teknologi terhadap lingkungan dan sosial yang dapat dijelaskan lebih lanjut:

1. Dampak Teknologi terhadap Lingkungan

Dampak teknologi terhadap lingkungan mencakup berbagai aspek yang bersifat positif dan negatif. Seiring berkembangnya teknologi, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam lebih efisien, namun proses produksi, penggunaan, dan pembuangan perangkat teknologi juga menimbulkan tantangan besar bagi lingkungan. Teknologi dapat mempercepat kerusakan ekosistem melalui polusi, limbah elektronik, dan penambangan sumber daya, tetapi juga memiliki potensi untuk memperbaiki kondisi lingkungan melalui inovasi energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Berikut adalah beberapa dampak teknologi terhadap lingkungan yang dijelaskan lebih rinci:

a. Polusi dan Limbah Teknologi

Teknologi modern, terutama dalam bentuk perangkat elektronik, telah meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menyebabkan dampak negatif berupa polusi dan limbah elektronik. Perangkat elektronik yang sudah usang sering kali dibuang secara tidak benar, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah limbah elektronik di tempat pembuangan akhir. Limbah ini mengandung bahan beracun seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari tanah dan air, merusak ekosistem di sekitarnya. Menurut Zeng *et al.* (2019), limbah elektronik di seluruh dunia mencapai lebih dari 50 juta ton per tahun dan terus meningkat seiring perkembangan teknologi. Dampak negatif ini memerlukan tindakan pengelolaan limbah elektronik yang lebih baik agar tidak semakin membahayakan lingkungan.

Perkembangan teknologi juga meningkatkan polusi udara melalui produksi perangkat elektronik. Proses manufaktur teknologi canggih sering kali melibatkan penggunaan energi yang besar, terutama dari sumber energi fosil, yang kemudian menghasilkan emisi karbon dalam jumlah signifikan. Polusi udara dari emisi karbon ini memperburuk masalah perubahan iklim dan menurunkan kualitas udara, sehingga berdampak langsung pada kesehatan manusia dan hewan. Meski begitu, kesadaran tentang masalah ini telah mendorong banyak industri untuk beralih ke energi terbarukan dalam proses produksinya. Namun, upaya tersebut masih perlu diperluas untuk mengurangi dampak polusi yang lebih besar di masa depan.

b. Efisiensi Energi dan Energi Terbarukan

Perkembangan teknologi telah memungkinkan terciptanya solusi yang lebih efisien dalam penggunaan energi, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi efisiensi energi, seperti lampu LED dan perangkat hemat energi lainnya, membantu mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan kinerja. Langkah ini penting dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang menjadi penyebab utama emisi karbon dioksida. Menurut Al-Ansari *et al.* (2020), efisiensi energi memiliki peran kunci dalam mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Teknologi ini, jika diterapkan secara luas, dapat menekan beban lingkungan yang disebabkan oleh kebutuhan energi yang terus meningkat.

Teknologi energi terbarukan juga semakin berkembang sebagai solusi yang lebih ramah lingkungan. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air menjadi alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Teknologi ini tidak hanya menghasilkan energi yang bersih, tetapi juga membantu mengurangi polusi udara dan memperlambat laju pemanasan global. Di berbagai negara, teknologi ini mulai diterapkan secara masif, meskipun tantangan dalam hal biaya dan infrastruktur masih menjadi hambatan. Namun, investasi di bidang energi terbarukan terus meningkat seiring dengan kesadaran global terhadap dampak lingkungan dari energi konvensional.

c. Degradasi Lingkungan

Perkembangan teknologi telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga berkontribusi terhadap degradasi lingkungan. Peningkatan produksi industri dan urbanisasi yang didukung oleh teknologi menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Hal ini memicu penipisan lahan, deforestasi, serta pencemaran udara dan air, yang pada akhirnya merusak keseimbangan ekosistem. Menurut Gupta *et al.* (2021), teknologi modern dalam bidang pertanian dan industri seringkali menyebabkan degradasi tanah dan merusak habitat alami. Kondisi ini memperburuk kerusakan lingkungan, sehingga penting untuk mengembangkan teknologi yang lebih berkelanjutan.

Teknologi juga berperan dalam mempercepat proses urbanisasi yang dapat memperburuk degradasi lingkungan. Pertumbuhan kota yang pesat menyebabkan peningkatan konsumsi energi, limbah, dan polusi yang mempercepat kerusakan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur perkotaan yang didorong oleh teknologi, meskipun bermanfaat bagi masyarakat, dapat menghasilkan dampak negatif jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang berwawasan lingkungan. Salah satu contohnya adalah meningkatnya jejak karbon dari transportasi dan industri yang terus meningkat di perkotaan. Oleh karena itu, teknologi ramah lingkungan dan perencanaan kota yang berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi dampak buruk ini.

2. Dampak Teknologi terhadap Sosial

Teknologi memiliki dampak yang mendalam dan luas terhadap kehidupan sosial, baik dalam hal interaksi antarindividu, perubahan budaya, maupun transformasi ekonomi. Perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi, menciptakan manfaat besar seperti peningkatan produktivitas dan akses pengetahuan yang lebih mudah. Namun, teknologi juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan digital, masalah privasi, serta perubahan pola interaksi sosial yang lebih terisolasi secara emosional. Berikut adalah beberapa dampak teknologi terhadap sosial yang dijelaskan secara rinci:

a. Perubahan Pola Komunikasi

Perkembangan teknologi telah mengubah pola komunikasi sosial masyarakat secara signifikan. Media digital, seperti media sosial dan aplikasi pesan instan, mempercepat penyebaran informasi dan memungkinkan interaksi yang lebih luas dan cepat. Dalam konteks ini, perubahan pola komunikasi menyebabkan penurunan komunikasi tatap muka, yang digantikan dengan komunikasi daring yang lebih fleksibel dan efisien. Menurut Wulandari (2019), teknologi mengubah cara masyarakat berinteraksi, di mana komunikasi kini lebih terfokus pada kecepatan daripada kedalaman interaksi. Akibatnya, muncul potensi kesalahpahaman dan penurunan kualitas hubungan interpersonal dalam komunikasi sosial.

Teknologi telah mengubah struktur hierarki dalam komunikasi sosial. Dulu, komunikasi biasanya bersifat vertikal dengan otoritas tertentu yang memegang kendali atas informasi. Namun, dengan adanya platform digital, setiap individu dapat menjadi produsen dan konsumen informasi secara bersamaan. Kondisi ini meningkatkan demokratisasi informasi, tetapi juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi palsu. Kecepatan penyebaran informasi yang belum tentu benar dapat mengakibatkan distorsi persepsi sosial di kalangan masyarakat.

b. Ketimpangan Digital

Teknologi telah membawa banyak manfaat, namun juga memperbesar ketimpangan digital di masyarakat. Ketimpangan ini terjadi ketika akses terhadap teknologi, terutama internet dan perangkat digital, tidak merata di berbagai lapisan sosial. Kelompok dengan sumber daya yang lebih baik cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap teknologi, sementara kelompok yang kurang mampu tertinggal dalam pemanfaatan teknologi ini. Menurut Putra (2020), ketimpangan digital memperburuk kesenjangan sosial karena akses informasi dan kesempatan ekonomi semakin terpusat pada yang memiliki akses teknologi. Dampaknya, terjadi ketidaksetaraan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan untuk berkembang di era digital.

Ketimpangan digital menciptakan jurang antara yang bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan yang tidak mampu,

yang terpinggirkan dari akses digital cenderung mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi dan peluang, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Ketidakmampuan ini juga berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan karena banyak aspek kehidupan modern sekarang bergantung pada teknologi. Di sisi lain, kelompok yang memiliki akses penuh terhadap teknologi dapat memanfaatkan peluang baru dalam ekonomi digital, seperti e-commerce dan pekerjaan jarak jauh. Hal ini menyebabkan jurang sosial yang semakin lebar antara kedua kelompok tersebut.

c. Transformasi Dunia Kerja

Teknologi telah mentransformasi dunia kerja secara signifikan, mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi di lingkungan profesional. Pekerjaan yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik kini dapat dilakukan secara jarak jauh berkat kemajuan dalam komunikasi digital dan perangkat lunak kolaboratif. Menurut Santoso (2021), teknologi digital telah membuka peluang bagi pekerjaan fleksibel, yang memungkinkan individu untuk bekerja dari mana saja tanpa batasan geografis. Hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti perbedaan keterampilan dan akses teknologi yang tidak merata. Dalam banyak kasus, pekerja perlu beradaptasi dengan keahlian baru yang berbasis teknologi untuk tetap kompetitif di pasar kerja.

Otomatisasi dan kecerdasan buatan juga telah mengubah struktur pekerjaan di berbagai sektor. Banyak pekerjaan manual kini digantikan oleh mesin atau perangkat lunak yang lebih efisien, yang mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia dalam beberapa bidang. Namun, di sisi lain, muncul permintaan akan keterampilan yang lebih kompleks, seperti kemampuan dalam pengelolaan data dan pemrograman. Transformasi ini menyebabkan perubahan pada jenis pekerjaan yang tersedia, di mana pekerjaan berbasis teknologi semakin mendominasi. Akibatnya, pekerja yang tidak beradaptasi dengan keterampilan digital mungkin tertinggal dalam kompetisi kerja.

BAB IX

TANTANGAN GLOBAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi isu krusial dalam konteks administrasi publik, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan krisis kesehatan merupakan beberapa tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, kebijakan publik harus mampu mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara harmonis. Hal ini menuntut adanya kerjasama lintas sektoral dan partisipasi aktif masyarakat untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemimpin publik dituntut untuk memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

A. Krisis Lingkungan Global dan Solusinya

Krisis lingkungan global merupakan tantangan serius yang dihadapi dunia saat ini, mencakup perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, polusi, dan pengurangan sumber daya alam. Perubahan iklim, yang ditandai oleh peningkatan suhu global, menyebabkan cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, dan dampak negatif terhadap pertanian dan kesehatan. Selain itu, kehilangan keanekaragaman hayati berakibat pada hilangnya spesies dan ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan manusia, sementara polusi mengancam kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Dalam rangka menghadapi krisis lingkungan ini, pembangunan berkelanjutan menjadi sebuah pendekatan yang krusial. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa

mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Transisi Energi Terbarukan

Transisi energi terbarukan menjadi salah satu strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi krisis lingkungan global. Dengan beralih dari sumber energi fosil yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi karbon dan polusi udara, penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi jejak karbon. Selain itu, energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, memberikan alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Menurut Sovacool (2018), “Transisi energi yang efektif tidak hanya akan membantu mengatasi tantangan iklim, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.” Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur energi terbarukan menjadi krusial bagi negara-negara yang berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pada konteks krisis lingkungan, transisi energi terbarukan juga memberikan peluang untuk meningkatkan ketahanan energi. Ketergantungan pada sumber energi fosil sering kali mengakibatkan volatilitas harga dan ketidakpastian pasokan. Sumber energi terbarukan, di sisi lain, dapat diakses secara lokal, mengurangi ketergantungan pada impor energi dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Lebih jauh lagi, diversifikasi sumber energi dengan energi terbarukan dapat meningkatkan stabilitas sistem energi secara keseluruhan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan, masyarakat dan pemerintah perlu bersinergi dalam menerapkan kebijakan yang mendukung transisi ini.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi kunci dalam strategi pembangunan berkelanjutan guna menghadapi krisis lingkungan global. Dengan pendekatan ini, sumber daya alam dikelola dengan cara yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Penekanan pada keberlanjutan tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Menurut Díaz *et al.* (2019), “Pengelolaan sumber daya alam

yang berkelanjutan dapat memperkuat ketahanan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sambil memitigasi dampak perubahan iklim.” Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung praktik pengelolaan yang bertanggung jawab sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga terlihat dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati. Kehilangan habitat dan spesies akibat eksploitasi berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kemampuan alam dalam menyediakan layanan penting, seperti penyimpanan karbon dan penyediaan air. Dengan melestarikan keanekaragaman hayati, masyarakat tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga mendukung ekonomi lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Melalui pengelolaan yang baik, sumber daya dapat dipulihkan dan dipelihara untuk generasi mendatang. Kesadaran akan pentingnya konservasi menjadi langkah awal dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya ini.

3. Inovasi Teknologi Ramah Lingkungan

Inovasi teknologi ramah lingkungan merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menghadapi krisis lingkungan global. Teknologi ini mencakup pengembangan produk dan proses yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca dan limbah berbahaya. Dengan memanfaatkan inovasi, perusahaan dapat menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam produksi dan konsumsi energi. Menurut Geissdoerfer *et al.* (2018), “Inovasi berkelanjutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung tujuan lingkungan dan sosial dengan cara yang saling terkait.” Dengan demikian, adopsi teknologi ramah lingkungan menjadi esensial untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Teknologi ramah lingkungan juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi pemborosan. Dalam sektor energi, misalnya, penerapan teknologi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, teknologi yang mengedepankan efisiensi energi dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional sekaligus

meminimalkan dampak lingkungan. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dalam produksi juga dapat memperkecil jejak ekologi suatu produk. Dengan mengintegrasikan inovasi teknologi dalam proses bisnis, perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar sambil berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

4. Kebijakan Publik yang Mendukung Keberlanjutan

Kebijakan publik yang mendukung keberlanjutan menjadi strategi yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi krisis lingkungan global. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur penggunaan sumber daya alam, melindungi ekosistem, dan mempromosikan praktik yang ramah lingkungan dalam berbagai sektor. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pemerintah dapat mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi teknologi hijau, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah yang efektif. Menurut Meckling *et al.* (2019), “Kebijakan publik yang efektif dapat mengubah perilaku industri dan konsumen menuju praktik yang lebih berkelanjutan, mendorong perubahan struktural yang diperlukan untuk menghadapi tantangan lingkungan.” Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan adalah langkah penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Implementasi kebijakan publik yang mendukung keberlanjutan juga dapat mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, kesadaran akan isu lingkungan dapat meningkat, serta menciptakan dukungan yang lebih kuat untuk inisiatif keberlanjutan. Program insentif dan subsidi untuk teknologi ramah lingkungan dapat mendorong investasi dari sektor swasta, sementara kampanye edukasi publik dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Selain itu, kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor hijau, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Melalui kolaborasi yang erat dan sinergi antara semua pemangku kepentingan, implementasi kebijakan publik yang mendukung keberlanjutan dapat membawa hasil yang positif bagi lingkungan dan masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan strategi yang krusial dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi krisis lingkungan global. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam program lingkungan dapat meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan dan mendorong perilaku yang lebih berkelanjutan. Menurut Kauffman dan Toth (2020), “Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas implementasinya.” Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam sangat penting untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat juga memberikan kesempatan untuk inovasi dan solusi lokal terhadap masalah lingkungan. Dengan memahami konteks lokal, masyarakat dapat menawarkan pendekatan kreatif yang lebih sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam konservasi, pengelolaan limbah, atau pemanfaatan energi terbarukan dapat menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pendidikan lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendorong praktik berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berkontribusi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi komunitas.

B. Ketimpangan Global dalam Sumber Daya dan Akses

Ketimpangan global dalam sumber daya dan akses merupakan isu kritis yang mencerminkan ketidakadilan struktural di dalam dan antar negara, di mana distribusi yang tidak merata dari sumber daya alam, pendidikan, dan layanan kesehatan berkontribusi pada kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup individu dan komunitas, terutama di negara-negara berkembang yang sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan keterbatasan. Memahami dan mengatasi ketimpangan ini menjadi sangat penting

untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua orang.

1. Distribusi Sumber Daya yang Tidak Merata

Ketimpangan global dalam distribusi sumber daya menciptakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Sumber daya seperti air bersih, pangan, dan akses terhadap layanan kesehatan sangat tidak merata, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini menghasilkan disparitas yang signifikan dalam kualitas hidup dan kesempatan bagi individu di berbagai belahan dunia. Menurut Piketty (2020), "Ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memicu ketidakpuasan sosial." Dengan meningkatnya ketidaksetaraan ini, kebutuhan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak.

Akses terhadap sumber daya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur, dan tingkat pendidikan. Negara-negara dengan infrastruktur yang baik dan pendidikan yang tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya penting. Sebaliknya, negara-negara yang terbelakang sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan. Ketidaksetaraan dalam akses ini tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi tetapi juga memperburuk isu kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif global untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan merata dalam distribusi sumber daya.

2. Akses Terhadap Layanan Dasar

Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi adalah aspek penting dalam memahami ketimpangan global. Ketidakmerataan dalam penyediaan layanan ini sering kali menciptakan kesenjangan yang signifikan antara berbagai negara dan kelompok sosial. Banyak masyarakat di negara berkembang masih kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, sementara di negara maju, akses terhadap layanan tersebut relatif lebih baik. Menurut Gupta dan Rani (2019), "Ketidaksetaraan dalam akses layanan dasar dapat memperburuk kemiskinan dan memperpanjang siklus ketidakadilan

sosial." Dengan adanya kesenjangan ini, individu yang berada di komunitas kurang beruntung sering kali terjebak dalam keadaan yang sulit untuk diubah.

Pendidikan juga merupakan komponen krusial dalam akses terhadap layanan dasar yang dapat mempengaruhi peluang ekonomi dan sosial seseorang. Di banyak daerah, terutama di negara dengan pendapatan rendah, akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas. Keterbatasan ini sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti biaya pendidikan yang tinggi, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan kurangnya dukungan pemerintah. Ketidaksetaraan dalam pendidikan berkontribusi pada kesenjangan dalam penguasaan keterampilan dan peluang kerja, sehingga memperparah ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan harus menjadi prioritas untuk menciptakan akses yang lebih merata.

3. Dampak Teknologi dan Digitalisasi

Dampak teknologi dan digitalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam memahami ketimpangan global dalam sumber daya dan akses. Meskipun teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, tidak semua masyarakat dapat menikmati manfaatnya secara merata. Banyak komunitas di negara berkembang yang masih terputus dari konektivitas internet dan teknologi modern, yang mengakibatkannya tertinggal dalam hal pendidikan dan peluang ekonomi. Menurut Jigsaw (2021), "Digitalisasi dapat memperlebar kesenjangan antara yang memiliki akses ke teknologi dan yang tidak, menciptakan apa yang dikenal sebagai '*digital divide*'." Ketidakmerataan ini memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada, sehingga upaya untuk mengatasi ketimpangan menjadi semakin kompleks.

Teknologi juga mempengaruhi cara layanan dasar disediakan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi tetapi juga bisa menciptakan hambatan baru. Misalnya, layanan kesehatan digital seperti telemedicine dapat meningkatkan akses bagi orang-orang di daerah terpencil, namun, tanpa infrastruktur yang memadai, layanan ini tidak akan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi dapat menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan, keberhasilannya sangat bergantung pada konteks lokal dan ketersediaan sumber daya lainnya. Tanpa dukungan yang tepat, masyarakat yang sudah terpinggirkan mungkin akan semakin

terisolasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan teknologi mengutamakan inklusi dan aksesibilitas.

C. Ketahanan Sosial di Era Krisis Ekologi dan Ekonomi

Ketahanan sosial di era krisis ekologi dan ekonomi merupakan isu penting yang semakin mendapatkan perhatian di tingkat global. Krisis ini tidak hanya berdampak pada lingkungan dan ekonomi, tetapi juga pada struktur sosial dan kualitas hidup masyarakat. Perubahan iklim, penurunan sumber daya alam, dan ketidakstabilan ekonomi mengancam kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang rentan, sehingga diperlukan pendekatan holistik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Krisis ekologi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Di sisi lain, krisis ekonomi yang diperburuk oleh ketidakadilan distribusi sumber daya, pengangguran, dan ketidakpastian pasar juga memperburuk kondisi sosial. Oleh karena itu, membangun ketahanan sosial menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain:

1. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Pendidikan dan kesadaran lingkungan merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan global yang berhubungan dengan ketahanan sosial. Pendidikan lingkungan yang efektif dapat membentuk pemahaman masyarakat tentang dampak perilaku manusia terhadap lingkungan dan mendorong tindakan yang berkelanjutan. Masyarakat yang terdidik tentang isu-isu lingkungan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam solusi yang mendukung keberlangsungan ekosistem. "Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah langkah krusial dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan kolektif terhadap masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat global" (González, 2020). Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan lingkungan dapat memperkuat kapasitas individu dan komunitas untuk menghadapi tantangan ini.

Kesadaran lingkungan juga berkontribusi pada ketahanan sosial melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program lingkungan. Ketika individu menyadari pentingnya menjaga lingkungan, lebih cenderung terlibat dalam inisiatif lokal yang mendukung

keberlanjutan. Hal ini dapat menciptakan komunitas yang lebih kohesif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Dengan mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan masyarakat, kita dapat menciptakan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Dalam konteks ini, pendidikan dan kesadaran lingkungan menjadi alat penting dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama yang produktif.

2. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif

Pembangunan ekonomi yang inklusif sangat penting dalam menghadapi tantangan global dan membangun ketahanan sosial. Pembangunan ini menekankan pada penyertaan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang terpinggirkan, dalam proses ekonomi. Ketika setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. "Inklusivitas ekonomi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan berkembang" (Ocampo, 2019). Dengan memprioritaskan pembangunan yang inklusif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pembangunan ekonomi yang inklusif berkontribusi pada stabilitas sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi, akan lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap komunitas. Hal ini dapat mengurangi konflik sosial dan memperkuat ikatan sosial yang diperlukan untuk ketahanan sosial. Selain itu, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua kelompok. Dalam konteks ini, inklusivitas ekonomi menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi di antara masyarakat.

3. Keterlibatan Komunitas

Keterlibatan komunitas adalah aspek krusial dalam membangun ketahanan sosial menghadapi tantangan global. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan

pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketika komunitas dilibatkan, dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih relevan dan efektif. "Keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk membangun ketahanan sosial, karena itu menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap hasil pembangunan" (Takahashi, 2021). Dengan meningkatkan keterlibatan komunitas, kita dapat menciptakan struktur sosial yang lebih kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul.

Keterlibatan komunitas dapat memperkuat jaringan sosial yang diperlukan untuk mengatasi krisis. Ketika individu saling berkolaborasi dan mendukung satu sama lain, membangun ikatan yang dapat diandalkan dalam situasi sulit. Hal ini sangat penting, terutama saat menghadapi masalah seperti bencana alam atau perubahan iklim, di mana respons yang cepat dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Keterlibatan komunitas juga dapat mendorong inovasi lokal, di mana solusi kreatif muncul dari pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan lingkungan setempat. Dengan memfasilitasi kolaborasi antar anggota komunitas, ketahanan sosial dapat ditingkatkan secara signifikan.

4. Adaptasi dan Mitigasi

Adaptasi dan mitigasi merupakan dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam membangun ketahanan sosial menghadapi tantangan global, terutama terkait perubahan iklim. Adaptasi merujuk pada proses penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari, sedangkan mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju perubahan iklim. Keduanya harus diintegrasikan dalam kebijakan dan strategi pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh. "Adaptasi dan mitigasi harus berjalan beriringan dalam upaya membangun ketahanan sosial yang efektif terhadap ancaman perubahan iklim" (Mastrorillo, 2019). Dengan mengembangkan pendekatan yang komprehensif, kita dapat mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat secara lebih efektif.

Adaptasi yang efektif tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim, tetapi juga dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, inisiatif yang fokus pada pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem dapat

menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, proses adaptasi yang melibatkan partisipasi komunitas akan memperkuat hubungan sosial dan kolaborasi di antara anggota masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan lokal dan dapat diakses oleh semua. Dengan memprioritaskan adaptasi dalam pembangunan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih resilient dan berdaya.

Mitigasi, di sisi lain, berperan penting dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi karbon dan memperkenalkan teknologi energi terbarukan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Selain itu, tindakan mitigasi yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan kesadaran dan tanggung jawab bersama di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu-isu lingkungan. Secara keseluruhan, kombinasi antara adaptasi dan mitigasi adalah kunci untuk membangun ketahanan sosial yang tahan banting terhadap tantangan global yang terus berkembang.

5. Penguatan Jaringan Sosial

Penguatan jaringan sosial merupakan aspek penting dalam membangun ketahanan sosial menghadapi tantangan global yang kompleks. Jaringan sosial yang kuat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam menghadapi krisis. Ketika individu terhubung dengan baik, lebih cenderung untuk berbagi informasi, sumber daya, dan dukungan emosional saat menghadapi kesulitan. "Jaringan sosial yang solid berfungsi sebagai jaring pengaman yang krusial dalam membantu masyarakat bertahan dan pulih dari berbagai tantangan" (Patterson, 2022). Oleh karena itu, penguatan jaringan sosial menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang resilient.

Penguatan jaringan sosial juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat merasa terhubung dan memiliki akses ke jaringan yang lebih luas, lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas komunitas dan kebijakan publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suaranya

didengar dan kebutuhannya terpenuhi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, jaringan sosial yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan antar individu dan kelompok, yang penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerjasama. Dengan membangun hubungan yang kuat di dalam komunitas, kita dapat memperkuat ketahanan sosial secara keseluruhan.

BAB X

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi topik yang semakin penting dalam konteks administrasi publik, terutama mengingat tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi negara ini. Dengan populasi yang besar dan keanekaragaman sumber daya alam, Indonesia berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga ramah lingkungan dan inklusif. Dalam upaya ini, pemerintah berperan sebagai pengatur dan fasilitator yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program yang ada. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada keberlanjutan, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan saat ini dan mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang.

A. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia merupakan pendekatan strategis yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan di Indonesia diatur melalui berbagai kebijakan dan program yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berorientasi pada masa depan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi dalam agenda global, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam.

Salah satu kebijakan utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang mencakup target-target pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan lingkungan. RPJMN berfungsi sebagai pedoman bagi kebijakan sektoral dan penganggaran, memastikan bahwa setiap aspek pembangunan memperhatikan keberlanjutan. Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan kerangka hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan penegakan hukum lingkungan. Dalam praktiknya, Indonesia juga mengembangkan berbagai program dan inisiatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam

Program Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Dengan memperkuat pengelolaan sumber daya alam, program ini juga berupaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan. Sebagai langkah konkret, pemerintah Indonesia mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, untuk mencapai tujuan konservasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad (2020), "Konservasi sumber daya alam harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar tindakan pemulihan."

Program ini juga mencakup pelestarian ekosistem penting seperti hutan, laut, dan daerah tangkapan air. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi, Indonesia berupaya menjaga keutuhan ekosistem yang memiliki peran penting dalam keseimbangan lingkungan. Konservasi juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dengan mengurangi emisi karbon dan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan. Implementasi program ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus sosial bagi masyarakat, melalui pengembangan ekowisata dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan

demikian, konservasi sumber daya alam tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembangunan Energi Terbarukan

Pembangunan energi terbarukan di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti sinar matahari, angin, dan biomassa, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, dengan harapan mencapai 23% pada tahun 2025. Seperti yang dinyatakan oleh Iskandar (2021), "Pengembangan energi terbarukan adalah kunci untuk mencapai kemandirian energi dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia."

Pengembangan energi terbarukan juga berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Proyek-proyek energi terbarukan dapat melibatkan masyarakat lokal, sehingga memberikan manfaat ekonomi langsung kepadanya. Dengan demikian, transisi ke energi terbarukan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat, dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi swasta dalam sektor ini, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi baru yang berkelanjutan.

3. Pengelolaan Sampah dan Limbah

Pengelolaan sampah dan limbah di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat, yang memicu masalah lingkungan serius. Program pengelolaan sampah yang berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi, mendaur ulang, dan mengolah limbah dengan cara yang ramah lingkungan. Selain itu, inisiatif ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan pengelolaan limbah yang baik. Menurut Prasetyo (2020), "Pengelolaan sampah yang efektif merupakan langkah penting dalam mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat."

Implementasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan mencakup berbagai strategi, seperti pemisahan sampah di sumber, pengembangan fasilitas daur ulang, dan pengolahan limbah organik. Melalui pendekatan ini, diharapkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat diminimalkan, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, program ini juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui industri daur ulang dan pengolahan limbah yang dapat memberdayakan masyarakat. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait pengelolaan sampah, mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan sampah diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan.

4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal di Indonesia merupakan salah satu inisiatif penting dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Melalui program ini, masyarakat lokal diberdayakan untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Upaya ini mencakup pelatihan keterampilan, dukungan akses ke pasar, dan penyediaan fasilitas pendukung bagi pelaku usaha lokal. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, serta pengurangan kemiskinan. Menurut Sari (2021), "Pemberdayaan ekonomi lokal tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperkuat kemandirian dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi."

Program pemberdayaan ekonomi lokal juga berfokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian. Pemerintah menyediakan berbagai insentif dan bantuan teknis untuk membantu UMKM mengakses modal dan mengembangkan produk yang berkualitas. Selain itu, promosi produk lokal dan kolaborasi dengan berbagai sektor menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing. Dengan meningkatnya permintaan terhadap

produk lokal, tidak hanya akan menciptakan nilai tambah, tetapi juga melestarikan budaya dan kearifan lokal. Ini semua berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas.

5. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia merupakan bagian penting dari inisiatif pembangunan berkelanjutan yang diarahkan untuk memastikan keadilan sosial dan lingkungan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan praktik yang kaya terkait pengelolaan sumber daya alam, yang berkontribusi pada konservasi lingkungan. Dengan memberikan perlindungan terhadap hak-haknya, negara tidak hanya menghormati budaya dan tradisi masyarakat adat, tetapi juga mendorong partisipasinya dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya. Program ini bertujuan untuk mencegah konflik yang sering terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan atau pemerintah dalam eksploitasi sumber daya alam. Menurut Fadli (2020), "Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat merupakan prasyarat untuk menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan."

Perlindungan hak-hak masyarakat adat juga mencakup pengakuan atas wilayah adat yang menjadi tempat tinggal. Dengan adanya pengakuan ini, masyarakat adat dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah secara berkelanjutan. Selain itu, program ini mendukung pemberdayaan masyarakat adat dalam mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal, yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan juga menjadi fokus, sehingga masyarakat adat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian, inisiatif ini tidak hanya melindungi hak-haknya tetapi juga memberdayakan masyarakat adat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan.

B. Tantangan Sosial-Ekonomi dalam Pembangunan Indonesia

Sosial-ekonomi merupakan aspek penting yang mencakup hubungan antara faktor sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dinamika sosial-ekonomi mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang beragam, mulai dari distribusi pendapatan,

akses terhadap layanan publik, hingga mobilitas sosial. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, isu-isu sosial-ekonomi sering kali dipengaruhi oleh ketidakmerataan pembangunan, yang menimbulkan ketimpangan antar wilayah dan kelompok sosial dalam berbagai sektor kehidupan.

Pada konteks pembangunan Indonesia, tantangan sosial-ekonomi yang kompleks seperti ketimpangan pendapatan, keterbatasan lapangan kerja, dan akses infrastruktur menjadi penghalang bagi pemerataan kesejahteraan. Urbanisasi yang tidak terkendali, krisis lingkungan, serta kualitas pendidikan yang rendah semakin memperparah situasi ini, membuat upaya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan semakin mendesak. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang merata, diperlukan kolaborasi berbagai pihak serta kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

1. Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan

Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Distribusi kekayaan yang tidak merata antara kelompok masyarakat kaya dan miskin menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan, yang berdampak pada rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Faktor geografis dan pembangunan infrastruktur yang belum merata di berbagai wilayah juga memperburuk ketimpangan ini. Menurut penelitian, ketimpangan ekonomi di Indonesia kerap dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang lebih menguntungkan sektor-sektor tertentu, sehingga tidak memberikan kesempatan yang merata bagi semua kelompok sosial (Rahardja, 2019). Oleh karena itu, kebijakan yang lebih adil dan proaktif diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ini.

Kemiskinan merupakan dampak langsung dari ketimpangan ekonomi dan menjadi masalah yang sulit diatasi tanpa reformasi struktural yang mendalam. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan karena kurangnya akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, ketergantungan pada sektor ekonomi informal, yang rentan terhadap fluktuasi pasar, membuat banyak keluarga miskin sulit untuk mencapai stabilitas finansial. Program pengentasan kemiskinan yang ada belum

cukup efektif dalam mengatasi masalah akar seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan yang rendah. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkesinambungan.

2. Pengangguran dan Keterbatasan Lapangan Kerja

Pengangguran di Indonesia merupakan salah satu tantangan sosial-ekonomi yang terus membayangi pembangunan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka yang positif, namun belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Banyak lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi, menciptakan ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja. Menurut data, masalah ini diperburuk oleh ketergantungan pada sektor ekonomi yang padat modal, yang cenderung menciptakan lapangan kerja lebih sedikit dibandingkan dengan sektor padat karya (Suharto, 2020). Kondisi ini memerlukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja baru yang lebih beragam.

Keterbatasan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan dan luar Jawa, memperparah situasi pengangguran di Indonesia. Pembangunan yang terpusat di kota-kota besar menyebabkan migrasi besar-besaran dari desa ke kota, yang sering kali tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur atau lapangan kerja yang memadai di daerah perkotaan. Akibatnya, banyak masyarakat yang terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak stabil dan tanpa jaminan sosial. Hal ini menimbulkan masalah baru seperti ketidakpastian pendapatan dan kemiskinan urban, yang memperbesar tantangan dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang merata.

3. Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan, mengakibatkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar seperti transportasi, listrik, dan air bersih. Infrastruktur yang memadai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun banyak daerah di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal akses

tersebut. Menurut studi, pembangunan yang tidak merata ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah, sehingga menghambat pemerataan kesejahteraan (Tampubolon, 2021). Hal ini memerlukan intervensi kebijakan yang lebih fokus pada pengembangan wilayah tertinggal.

Kurangnya akses terhadap infrastruktur juga berdampak pada terbatasnya peluang ekonomi di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan transportasi, misalnya, membuat biaya distribusi barang menjadi lebih mahal, sehingga mempengaruhi harga kebutuhan pokok di daerah-daerah tersebut. Selain itu, ketiadaan akses ke infrastruktur dasar seperti jaringan internet menghambat pengembangan ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tetapi juga mencakup daerah-daerah pedesaan yang masih terisolasi.

4. Urbanisasi yang Tidak Terkelola dengan Baik

Urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik di Indonesia menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Migrasi besar-besaran dari desa ke kota sering kali tidak diimbangi dengan perencanaan infrastruktur dan layanan publik yang memadai, menyebabkan kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya mengalami tekanan yang berat. Permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, permukiman kumuh, dan peningkatan jumlah penduduk miskin perkotaan adalah dampak dari urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik. Menurut penelitian, urbanisasi yang tidak terkendali ini juga memperlebar ketimpangan antara kota dan desa serta meningkatkan ketidaksetaraan sosial di kawasan perkotaan (Wicaksono, 2020). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan urbanisasi yang lebih matang untuk mengurangi dampak negatif ini.

Kota-kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius dalam hal ketersediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi penduduk urban. Keterbatasan lahan dan harga properti yang melambung tinggi memaksa banyak penduduk untuk tinggal di daerah-daerah kumuh dengan kondisi yang tidak higienis. Selain itu, banyak kota tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan infrastruktur dasar yang memadai, seperti sanitasi, air bersih, dan fasilitas kesehatan, bagi jumlah penduduk yang terus meningkat. Hal ini menimbulkan masalah

kesehatan dan kualitas hidup yang semakin memburuk bagi penduduk miskin perkotaan.

5. Ketahanan Pangan dan Krisis Lingkungan

Ketahanan pangan di Indonesia merupakan salah satu tantangan sosial-ekonomi yang mendesak, terutama dalam konteks perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Produksi pangan nasional sering kali terganggu oleh bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan perubahan cuaca ekstrem, yang berdampak langsung pada hasil panen dan stabilitas pasokan pangan. Krisis lingkungan ini memperburuk situasi, mengingat sektor pertanian di Indonesia sangat bergantung pada kondisi alam yang stabil. Menurut para ahli, peningkatan suhu global dan kerusakan lingkungan memperbesar risiko gagal panen, yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional (Handoko, 2021). Hal ini menekankan pentingnya adopsi teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan juga mempercepat degradasi lahan dan penurunan kualitas tanah. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan mengakibatkan rusaknya ekosistem lokal serta mengurangi kesuburan tanah dalam jangka panjang. Ketergantungan pada metode pertanian konvensional ini memicu kerentanan yang semakin tinggi terhadap perubahan iklim dan menurunkan produktivitas lahan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pertanian yang lebih berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi organik dan konservasi tanah serta air untuk menjaga ekosistem alam tetap seimbang.

C. Studi Kasus: Proyek-Proyek Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan ini adalah dengan mendorong proyek-proyek berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut adalah salah satu contoh proyek berkelanjutan yang berhasil diterapkan di Indonesia:

1. PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DI BALI

Pulau Bali, sebagai salah satu tujuan wisata terbesar di dunia, menghadapi masalah ketergantungan pada bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dan swasta menginisiasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di beberapa wilayah Bali. Salah satu proyek yang menonjol adalah pembangunan PLTS di Nusa Penida, yang bertujuan untuk menyediakan energi terbarukan bagi penduduk lokal dan industri pariwisata, sekaligus mengurangi emisi karbon di wilayah tersebut. Proyek ini dimulai pada tahun 2019 dan menargetkan penyediaan energi bersih untuk lebih dari 7.000 rumah tangga dan fasilitas publik. Selain manfaat lingkungan, proyek ini juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan adanya tenaga surya, penduduk tidak hanya mendapatkan akses listrik yang lebih murah dan stabil, tetapi juga peluang pekerjaan baru dalam bidang energi terbarukan, baik dalam instalasi maupun pemeliharaan PLTS.

Keberhasilan proyek ini menjadi model bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia dan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. Meski demikian, proyek ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal pendanaan dan keterlibatan masyarakat. Namun, dengan pendekatan yang holistik, termasuk kampanye edukasi tentang pentingnya energi terbarukan, proyek ini terus berkembang dan memberikan contoh nyata bagi proyek-proyek berkelanjutan lainnya di seluruh Indonesia. Kesimpulan dari studi kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Bali menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan terintegrasi dan kolaboratif, Indonesia berpotensi untuk memimpin dalam upaya pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pemanfaatan energi terbarukan.

BAB XI

KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kebijakan publik untuk pembangunan berkelanjutan menjadi krusial dalam menghadapi tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, kebijakan harus dirancang untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Melalui pendekatan holistik, kebijakan publik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup, serta melestarikan sumber daya alam. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mengatasi isu-isu saat ini, tetapi juga untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua.

A. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu agenda global yang mendesak di tengah tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pemerintah berperan kunci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang inovatif, investasi strategis, dan keterlibatan masyarakat, pemerintah dapat menciptakan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran utama pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan:

1. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi

Penyusunan kebijakan dan regulasi merupakan peran utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya dan investasi ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Menurut Hossain (2019), "Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dan praktik berkelanjutan." Oleh karena itu, kebijakan yang tepat dapat mendorong partisipasi berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan.

Penyusunan kebijakan dan regulasi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang manfaat dari kebijakan yang diterapkan dan mengajaknya berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat menciptakan program-program yang lebih relevan dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas juga membantu mencegah penyalahgunaan sumber daya dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitasnya.

2. Investasi dalam Infrastruktur Berkelanjutan

Investasi dalam infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu peran utama pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik dan berkelanjutan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta melindungi lingkungan. Pemerintah harus berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurut Khoshroo (2020), "Investasi dalam infrastruktur berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan sistem yang tangguh dan efisien dalam menghadapi tantangan global." Dengan fokus pada infrastruktur yang berkelanjutan, pemerintah dapat menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan jangka panjang.

Investasi dalam infrastruktur berkelanjutan juga memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal. Proyek-proyek infrastruktur, seperti transportasi, energi terbarukan, dan pengelolaan air, membutuhkan tenaga kerja dan

memberikan peluang bagi masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pemerintah dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata melalui investasi infrastruktur. Investasi yang tepat juga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya tidak terbarukan, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi.

3. Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder

Mendorong partisipasi masyarakat dan stakeholder merupakan peran utama pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan responsif. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal tercermin dalam program pembangunan. Menurut Rojas (2021), "Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif." Dengan adanya partisipasi yang aktif, diharapkan hasil pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat luas.

Partisipasi masyarakat juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, lebih cenderung mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang diambil. Hal ini mendorong pemerintah untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan publik dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, partisipasi stakeholder dapat menghasilkan ide-ide dan solusi inovatif yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang diupayakan oleh pemerintah. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil dalam menghadapi tantangan pembangunan. Pendidikan yang baik juga membantu masyarakat memahami pentingnya keberlanjutan dan mengintegrasikan

nilai-nilai lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Leal Filho *et al.* (2019), "Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan fondasi yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan bertanggung jawab terhadap lingkungan." Oleh karena itu, pemerintah harus berinvestasi dalam sistem pendidikan yang memfasilitasi pembelajaran tentang keberlanjutan.

Pelatihan yang relevan juga merupakan komponen kunci dalam membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung sektor-sektor berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan program pelatihan yang sejalan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi terkini. Dengan pelatihan yang tepat, individu dapat berkontribusi secara efektif dalam berbagai bidang seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Pelatihan juga memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas tenaga kerja, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masyarakat yang terampil akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan kesempatan yang ada dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan peran utama pemerintah dalam memastikan keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Melalui pemantauan yang sistematis, pemerintah dapat mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program-program pembangunan. Proses evaluasi yang tepat juga memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan tindakan yang diambil, sehingga dapat melakukan penyesuaian jika diperlukan. Menurut Buse *et al.* (2018), "Pemantauan dan evaluasi yang kuat adalah kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembangunan." Dengan demikian, pemerintah yang proaktif dalam pemantauan dan evaluasi dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemantauan dan evaluasi juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ketika masyarakat terlibat dalam pemantauan dan evaluasi, dapat memberikan masukan yang berharga tentang efektivitas program yang dilaksanakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya

keterlibatan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara inklusif untuk menciptakan keberlanjutan yang lebih baik.

B. Kerangka Kebijakan untuk Ekonomi Berkelanjutan

Kerangka kebijakan untuk ekonomi berkelanjutan menjadi salah satu pendekatan penting dalam menghadapi tantangan global saat ini, di mana pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan meningkatnya ketidakadilan sosial, diperlukan strategi yang komprehensif dan terpadu untuk mengarahkan sumber daya dan investasi ke arah yang lebih berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, tanpa mengorbankan lingkungan.

Pada pengembangan kerangka kebijakan tersebut, berbagai aspek perlu diperhatikan, mulai dari inovasi teknologi, pengelolaan sumber daya alam, hingga pendidikan dan kesadaran publik. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah, menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif tetapi juga inklusif. Dengan mengintegrasikan berbagai elemen ini, diharapkan kerangka kebijakan yang dihasilkan dapat mendorong terciptanya ekonomi yang berkelanjutan, mampu mengatasi tantangan saat ini, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Dalam rangka mencapai tujuan ini, beberapa aspek kunci perlu dipertimbangkan:

1. Kebijakan Ekonomi Hijau

Kebijakan ekonomi hijau merupakan bagian integral dari kerangka kebijakan yang mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan yang berfokus pada efisiensi sumber daya dan mitigasi dampak lingkungan. Hal ini melibatkan penerapan strategi untuk mengurangi emisi karbon, mempromosikan energi terbarukan, serta mengintegrasikan aspek-aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan ini menekankan pentingnya perubahan dalam pola produksi dan konsumsi,

dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem jangka panjang. Ekonomi hijau juga mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak sumber daya alam. Menurut Steffen (2020), ekonomi hijau berperan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi global yang lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Kerangka kebijakan ekonomi hijau berfokus pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan. Hal ini membutuhkan kebijakan fiskal yang mendukung investasi hijau, seperti insentif pajak untuk perusahaan yang menggunakan teknologi bersih. Selain itu, regulasi yang lebih ketat dalam hal emisi gas rumah kaca juga menjadi komponen penting untuk memastikan perlindungan lingkungan. Transformasi sektor-sektor ekonomi, terutama di bidang energi, transportasi, dan industri, menjadi salah satu prioritas utama. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan.

2. Inovasi dan Teknologi Berkelanjutan

Inovasi dan teknologi berkelanjutan merupakan pilar utama dalam kerangka kebijakan untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan. Teknologi ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam secara efisien dan menciptakan proses produksi yang lebih bersih. Inovasi dalam bidang energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Selain itu, teknologi berkelanjutan juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor hijau. Menurut Geels (2019), inovasi teknologi berkelanjutan mampu mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan tangguh.

Kerangka kebijakan yang mendukung inovasi teknologi berkelanjutan perlu mengintegrasikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal, seperti subsidi atau pengurangan pajak untuk sektor energi terbarukan, akan mempercepat adopsi teknologi ini. Selain itu, kebijakan regulasi yang lebih ketat dalam hal emisi karbon dan pengelolaan limbah industri

mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dalam meminimalkan dampak lingkungan. Penerapan teknologi cerdas dalam manajemen sumber daya juga dapat mengurangi penggunaan air dan energi, sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan.

3. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam merupakan komponen penting dalam kerangka kebijakan ekonomi berkelanjutan karena mengatur penggunaan dan konservasi sumber daya alam secara bijak. Pendekatan ini memastikan bahwa eksploitasi sumber daya seperti air, tanah, mineral, dan hutan dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kebutuhan generasi mendatang. Kebijakan ini juga melibatkan pengendalian dampak negatif dari kegiatan ekonomi, seperti deforestasi dan penurunan kualitas tanah, yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan yang tepat mendukung praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan dan mendorong penggunaan teknologi yang efisien untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Menurut Ostrom (2019), pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta.

Pada kerangka kebijakan ekonomi berkelanjutan, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang memastikan sumber daya alam dikelola secara adil dan merata. Regulasi ini mencakup pengaturan izin penggunaan lahan, penetapan kuota eksploitasi sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap dampak lingkungan. Selain itu, insentif ekonomi seperti pajak lingkungan dan skema pembayaran untuk jasa lingkungan dapat mendorong praktik pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga melibatkan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pelestarian sumber daya alam melalui kampanye pendidikan dan program pelatihan bagi masyarakat.

4. Keterlibatan Masyarakat dan Partisipasi Stakeholder

Keterlibatan masyarakat dan partisipasi stakeholder adalah elemen penting dalam kerangka kebijakan untuk ekonomi berkelanjutan, karena keduanya memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Partisipasi aktif masyarakat lokal membantu

menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan dan inisiatif yang diterapkan, sehingga meningkatkan keberhasilan implementasinya. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga memungkinkan solusi yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Selain itu, partisipasi stakeholder seperti pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam proses dialog dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berimbang. Menurut Arnstein (2020), keterlibatan masyarakat dalam kebijakan berkelanjutan membantu menciptakan keadilan sosial dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif.

Pada konteks ekonomi berkelanjutan, keterlibatan stakeholder mencakup peran aktif dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pemerintah dapat berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan ruang untuk dialog terbuka antara berbagai pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan terciptanya konsensus terhadap isu-isu lingkungan dan ekonomi. Perusahaan berperan strategis dalam pengadopsian praktik bisnis yang lebih hijau, seperti inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara adil dan transparan. Kolaborasi antara berbagai stakeholder ini dapat memperkuat efektivitas kebijakan berkelanjutan di semua sektor.

C. Kerjasama Multilateral dalam Implementasi Kebijakan

Kerjasama multilateral dalam implementasi kebijakan publik merupakan salah satu pendekatan yang semakin penting dalam dunia yang saling terhubung saat ini. Dalam konteks global, banyak tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, seperti perubahan iklim, keamanan pangan, dan migrasi. Oleh karena itu, kerjasama antara negara-negara melalui organisasi internasional atau forum multilateral menjadi krusial untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Kerjasama ini memungkinkan negara-negara untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan teknologi, sehingga meningkatkan kapasitas dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan publik yang bermanfaat. Selain itu, kerjasama multilateral juga berfungsi sebagai platform untuk dialog dan negosiasi, memperkuat hubungan

antar negara, serta menciptakan norma dan standar internasional yang dapat diadopsi secara luas. Pentingnya kerjasama multilateral dalam kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Penguatan Kapasitas

Penguatan kapasitas merupakan aspek penting dalam kerjasama multilateral dalam kebijakan publik, karena memastikan bahwa negara-negara terlibat dapat berkontribusi secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas mencakup peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, serta sistem dan proses yang mendukung implementasi kebijakan publik. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat saling berbagi pengetahuan dan praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitas program-program. Menurut Cernic (2020), "penguatan kapasitas adalah kunci untuk memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara negara-negara dalam mencapai tujuan bersama." Oleh karena itu, kolaborasi yang solid dan terencana sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Penguatan kapasitas juga berdampak pada kemampuan negara-negara dalam menangani tantangan global yang kompleks, seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan ketidakstabilan ekonomi. Melalui kerjasama multilateral, negara-negara dapat membangun kapasitas dalam hal respons dan mitigasi terhadap tantangan ini. Kerjasama ini tidak hanya terbatas pada berbagi informasi, tetapi juga mencakup pelatihan, pertukaran pengalaman, dan pengembangan sumber daya yang diperlukan. Dengan meningkatkan kapasitas, negara-negara dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan global. Hal ini pada gilirannya memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan publik yang dihasilkan dalam forum-forum multilateral.

2. Respon terhadap Tantangan Global

Respon terhadap tantangan global merupakan aspek penting dalam kerjasama multilateral dalam kebijakan publik, karena tantangan ini sering kali melampaui batas negara dan memerlukan pendekatan kolektif. Berbagai isu seperti perubahan iklim, pandemi, dan krisis ekonomi menuntut negara-negara untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang efektif. Kerjasama multilateral memungkinkan negara-negara untuk saling berbagi sumber daya, informasi, dan teknologi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Menurut Stiglitz

(2019), "kerjasama internasional yang kuat dan terkoordinasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks." Oleh karena itu, membangun kemitraan yang solid di antara negara-negara menjadi sangat krusial untuk menciptakan kebijakan publik yang responsif dan adaptif.

Kerjasama multilateral juga dapat memperkuat kapasitas negara-negara dalam merespon isu-isu global. Dalam konteks ini, pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar negara dapat meningkatkan pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Dengan demikian, negara-negara dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Misalnya, dalam menghadapi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19, kolaborasi internasional dalam penelitian, pengembangan vaksin, dan distribusi alat kesehatan sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa respon yang cepat dan efektif terhadap tantangan global membutuhkan komitmen bersama dan solidaritas antar negara.

3. Inovasi dan Teknologi

Inovasi dan teknologi merupakan aspek penting dalam kerjasama multilateral dalam kebijakan publik, karena keduanya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat global. Dalam era digital saat ini, negara-negara dihadapkan pada tantangan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi guna memecahkan masalah bersama. Kerjasama multilateral memungkinkan negara-negara untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan teknologi yang diperlukan untuk inovasi yang berkelanjutan. Menurut Tschang (2021), "inovasi dan teknologi adalah pendorong utama untuk kolaborasi internasional yang lebih kuat dalam mengatasi tantangan global." Oleh karena itu, membangun jaringan inovasi di antara negara-negara sangat penting untuk menciptakan solusi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Inovasi dan teknologi dapat berperan sentral dalam menciptakan kebijakan yang berbasis bukti dan data. Penggunaan data besar dan analitik dapat membantu negara-negara memahami pola dan tren dalam berbagai isu, mulai dari kesehatan masyarakat hingga perubahan iklim. Dengan memanfaatkan teknologi, kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih akurat dan relevan dengan konteks lokal serta global. Selain itu, kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru dapat

mempercepat pencarian solusi untuk tantangan yang mendesak. Kerjasama semacam ini menciptakan ekosistem inovasi yang dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

4. Legitimasi dan Dukungan

Legitimasi dan dukungan merupakan aspek penting dalam kerjasama multilateral dalam kebijakan publik, karena keduanya memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat global. Legitimasi memberikan dasar yang kuat bagi negara-negara untuk berkolaborasi, menciptakan kepercayaan antara anggota dan memastikan bahwa keputusan yang diambil dianggap sah oleh masyarakat internasional. Dukungan yang luas dari negara-negara anggota sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan efektif. Menurut Young (2020), "legitimasi dalam kerjasama multilateral sangat bergantung pada seberapa jauh proses pengambilan keputusan melibatkan semua pihak yang terpengaruh." Oleh karena itu, memastikan partisipasi yang inklusif menjadi kunci dalam membangun legitimasi yang diperlukan untuk dukungan yang berkelanjutan.

Legitimasi dan dukungan juga berperan dalam mengatasi tantangan dan resistensi yang mungkin muncul selama proses implementasi kebijakan. Ketika negara-negara merasa bahwa memiliki suara dalam pengambilan keputusan, cenderung lebih mendukung kebijakan tersebut. Dengan demikian, pendekatan yang transparan dan akuntabel dalam kerjasama multilateral dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen antara negara-negara. Dukungan yang kuat juga berkontribusi pada keberhasilan inisiatif bersama, mengingat banyak tantangan global yang memerlukan kolaborasi jangka panjang. Dalam konteks ini, legitimasi dan dukungan tidak hanya memfasilitasi implementasi kebijakan tetapi juga memperkuat hubungan internasional secara keseluruhan.

5. Perencanaan dan Implementasi yang Terintegrasi

Perencanaan dan implementasi yang terintegrasi merupakan aspek penting dalam kerjasama multilateral dalam kebijakan publik, karena keduanya saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Proses perencanaan yang matang memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dan bahwa kebutuhan serta aspirasinya

diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, integrasi antara berbagai negara dan lembaga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Menurut De Schutter (2019), "perencanaan yang terintegrasi adalah kunci untuk menjamin bahwa kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efisien di berbagai tingkat pemerintahan." Oleh karena itu, membangun kerangka kerja yang jelas dan kolaboratif dalam perencanaan sangat penting untuk keberhasilan kerjasama multilateral.

Implementasi yang terintegrasi juga berperan kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh dalam proses implementasi, negara-negara dapat menciptakan mekanisme yang memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Hal ini juga membantu dalam meminimalkan resistensi terhadap kebijakan yang diambil dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien. Ketika negara-negara bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan, dapat saling belajar dari pengalaman satu sama lain dan memperbaiki proses yang ada. Selain itu, pendekatan terintegrasi membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang muncul selama implementasi.

BAB XII

MASA DEPAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: HARAPAN DAN SOLUSI

Masa depan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dengan semakin meningkatnya populasi dan kebutuhan akan sumber daya, penting bagi kita untuk mengembangkan strategi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tetapi juga melindungi lingkungan untuk generasi mendatang. Harapan akan pembangunan yang berkelanjutan terletak pada kemampuan kita untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan. Solusi yang inovatif dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi masalah seperti perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan ketidaksetaraan sosial. Dengan komitmen bersama dari semua pihak, masa depan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan demi kesejahteraan umat manusia dan planet kita.

A. Proyeksi Masa Depan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan global, terutama setelah disetujuinya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan oleh PBB. Proyeksi masa depan pembangunan berkelanjutan mengarah pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling terkait, serta mengharuskan kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa tren dan tantangan yang diperkirakan akan mempengaruhi pembangunan berkelanjutan di masa depan meliputi:

1. Inovasi Teknologi

Inovasi teknologi menjadi salah satu pendorong utama dalam pembangunan berkelanjutan di masa depan. Kemajuan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan energi terbarukan dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. Namun, adopsi teknologi baru juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas dan inklusi sosial. Di satu sisi, teknologi dapat mempercepat pengembangan solusi untuk masalah lingkungan, tetapi di sisi lain, kesenjangan digital dapat memperburuk ketidaksetaraan. Menurut Kharas (2020), "Teknologi memiliki potensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi juga dapat menjadi sumber ketidakadilan jika tidak dikelola dengan baik." Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Tantangan regulasi juga menjadi aspek penting dalam inovasi teknologi dan pembangunan berkelanjutan. Banyak negara masih berjuang untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengimbangi kemajuan teknologi dengan perlindungan lingkungan dan sosial. Tanpa kerangka hukum yang jelas, inovasi dapat mengarah pada eksploitasi sumber daya dan kerusakan ekosistem. Selain itu, pelaku industri perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak. Hal ini juga melibatkan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan risiko teknologi. Dengan pendekatan yang kolaboratif, inovasi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi dunia dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dampak dari perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, cuaca ekstrem, dan naiknya permukaan laut, mengancam berbagai aspek kehidupan, termasuk ketahanan pangan, kesehatan, dan keamanan air. Selain itu, kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti petani kecil dan penduduk pesisir, akan terkena dampak yang lebih parah. Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi terbarukan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Menurut IPCC (2021), "Perubahan iklim mengancam

semua aspek pembangunan berkelanjutan, memerlukan tindakan mendesak dan kolaboratif dari seluruh negara." Oleh karena itu, strategi adaptasi dan mitigasi harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan global.

Perubahan iklim juga mempengaruhi ekonomi dan lapangan pekerjaan di berbagai sektor. Banyak industri, termasuk pertanian, perikanan, dan pariwisata, sangat tergantung pada kondisi iklim yang stabil. Ketidakpastian cuaca dapat menyebabkan kerugian besar dan mengganggu rantai pasokan. Perusahaan harus berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang berubah untuk tetap kompetitif, tetapi ini memerlukan investasi yang tidak sedikit. Dengan demikian, penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung transisi ke ekonomi hijau, yang mampu menciptakan lapangan kerja sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan faktor krusial dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dengan meningkatnya pemahaman tentang isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Kesadaran yang tinggi mendorong individu untuk mengubah perilaku dan konsumsi, yang pada gilirannya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, pendidikan dan kampanye informasi menjadi alat yang efektif untuk membangun kesadaran kolektif. Menurut Burch *et al.* (2019), "Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap isu-isu keberlanjutan adalah kunci untuk mendorong tindakan kolektif yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan." Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tetap ada, terutama terkait dengan akses informasi. Di era digital, meskipun informasi sangat mudah diakses, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai dan menyaring informasi yang relevan. Kesenjangan digital dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam pemahaman isu-isu keberlanjutan. Selain itu, banyak individu yang

masih terjebak dalam pola pikir jangka pendek, lebih fokus pada keuntungan langsung daripada dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dalam pendidikan dan penyebaran informasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih baik dan memperkuat kapasitas masyarakat, kita dapat membangun kesadaran yang lebih luas dan mendalam.

4. Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi arah pembangunan berkelanjutan di masa depan. Keberhasilan implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sangat bergantung pada kerangka kebijakan yang kuat dan adaptif. Kebijakan yang efektif dapat mendorong inovasi, investasi, dan praktik ramah lingkungan, tetapi kebijakan yang tidak tepat atau tidak konsisten dapat menghambat kemajuan. Dalam konteks ini, regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengatur berbagai sektor, mulai dari energi hingga pengelolaan limbah. Menurut Zeng *et al.* (2020), "Kebijakan dan regulasi yang kuat adalah fondasi untuk mendorong transisi menuju pembangunan berkelanjutan yang efektif dan inklusif." Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

Tantangan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan berkelanjutan sangat nyata. Banyak negara menghadapi konflik kepentingan antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan tujuan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, perbedaan kapasitas antara negara maju dan berkembang juga menciptakan kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang efektif. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan ketidakpastian politik sering kali menghambat upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, resistensi dari industri yang mungkin terkena dampak regulasi baru juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan dukungan publik dan mengurangi resistensi.

5. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional menjadi salah satu elemen kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di masa depan. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan krisis sumber daya, negara-negara semakin menyadari pentingnya bekerja sama untuk mengatasi isu-isu lintas batas. Teknologi dan inovasi juga berperan penting dalam mempercepat implementasi kebijakan berkelanjutan melalui kolaborasi antar negara. Namun, sering kali terjadi perbedaan kepentingan nasional yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan bersama. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi kerjasama internasional yang harus mengintegrasikan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka global. Menurut Sachs (2019), “Kerjasama internasional yang efektif merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan ketimpangan global.”

Tren global saat ini menunjukkan bahwa negara-negara mulai membangun mekanisme kerja sama yang lebih terfokus pada inovasi teknologi hijau dan ekonomi sirkular. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan ekonomi dengan berbagi teknologi ramah lingkungan antara negara maju dan berkembang. Namun, tantangan yang muncul adalah kesenjangan teknologi dan kapasitas antara negara-negara berkembang yang membutuhkan dukungan lebih banyak untuk mengadopsi solusi ini. Dengan semakin banyaknya aktor internasional, seperti lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, kolaborasi lintas sektor juga menjadi penting. Oleh karena itu, pendekatan multi-stakeholder dalam kerjasama internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai di semua lapisan masyarakat.

6. Pembangunan Ekonomi Sirkular

Pembangunan ekonomi sirkular menjadi tren yang semakin dominan dalam strategi pembangunan berkelanjutan global. Ekonomi sirkular bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya, dengan memisahkan pertumbuhan ekonomi dari penggunaan bahan baku yang terbatas. Model ini sangat relevan dalam konteks krisis lingkungan saat ini, di mana model ekonomi linear tradisional yang berbasis konsumsi berlebihan dan limbah tak lagi berkelanjutan. Negara-negara dan perusahaan mulai

mengadopsi pendekatan sirkular untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan peluang bisnis baru. Namun, tantangan utama terletak pada transisi dari sistem ekonomi yang sudah mapan ke model sirkular yang membutuhkan perubahan perilaku dan kebijakan. Menurut Ellen MacArthur Foundation (2020), “Ekonomi sirkular memberikan peluang besar bagi pembangunan berkelanjutan, tetapi membutuhkan perubahan mendasar dalam cara kita mendesain, memproduksi, dan mengelola sumber daya.”

Pada implementasinya, ekonomi sirkular menghadapi tantangan dalam skala adopsi, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Akses terhadap teknologi daur ulang yang canggih dan pendanaan untuk proyek-proyek sirkular masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mempercepat transisi ke model sirkular. Meski beberapa negara maju telah memimpin dalam adopsi ini, negara berkembang masih tertinggal karena tantangan struktural yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan dukungan internasional dalam membangun infrastruktur ekonomi sirkular yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Solusi Sosial dan Teknologi untuk Tantangan Global

Pembangunan berkelanjutan bertujuan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan penurunan sumber daya alam memerlukan solusi inovatif. Solusi sosial dan teknologi dapat berperan penting dalam mengatasi tantangan-tantangan ini.

1. Solusi Sosial

Solusi sosial berfokus pada perbaikan struktur dan interaksi sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif. Berikut beberapa aspek penting:

a. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan dan kesadaran berperan vital dalam menyelesaikan tantangan global yang dihadapi masyarakat modern. Pendidikan

memberikan alat bagi individu untuk memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan masalah kesehatan. Dengan pendidikan, orang dapat lebih kritis dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya tindakan kolektif juga tumbuh seiring peningkatan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan. Menurut Fry & Hickson (2018), peningkatan kesadaran global melalui pendidikan adalah kunci dalam menumbuhkan generasi yang siap menghadapi tantangan di tingkat internasional.

Pendidikan juga memfasilitasi pembentukan sikap proaktif yang mendukung perubahan sosial positif. Ketika individu memahami dampak dari tindakannya terhadap komunitas global, lebih cenderung mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya membangun keterampilan teknis tetapi juga meningkatkan empati, toleransi, dan keterbukaan terhadap keragaman budaya. Dengan adanya kesadaran akan interkoneksi global, generasi muda dapat terinspirasi untuk menciptakan perubahan yang berdampak luas. Oleh karena itu, pendidikan yang berfokus pada pengembangan kesadaran sosial menjadi solusi jangka panjang.

b. Kebijakan Inklusif dan Partisipatif

Kebijakan inklusif dan partisipatif adalah pilar penting dalam menciptakan solusi sosial untuk menghadapi tantangan global. Kebijakan inklusif memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan partisipatif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mencari solusi yang relevan dan berkelanjutan. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga mengarah pada hasil yang lebih adil dan representatif. Menurut Perez & Tang (2019), kebijakan yang inklusif dan partisipatif memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan global seperti ketidaksetaraan dan perubahan iklim.

Pada konteks global, kebijakan yang inklusif dan partisipatif menciptakan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hal ini sangat penting dalam

merespons isu-isu seperti pengungsi, ketidakadilan ekonomi, dan krisis lingkungan. Ketika berbagai kelompok dapat menyuarakan kebutuhan dan pandangan, solusi yang dihasilkan lebih mungkin berhasil karena mencerminkan realitas dan keragaman pengalaman di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil akhir, yang penting untuk keberlanjutan. Dengan demikian, kolaborasi antar berbagai aktor dapat mempercepat tercapainya tujuan bersama.

c. **Pengentasan Kemiskinan dan Ketidaksetaraan**

Pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan adalah elemen penting dalam solusi sosial untuk mengatasi tantangan global yang semakin kompleks. Ketimpangan ekonomi dan sosial tidak hanya menciptakan ketidakstabilan, tetapi juga memperburuk masalah global seperti migrasi, konflik, dan perubahan iklim. Dalam menghadapi tantangan ini, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ketika orang memiliki akses yang setara ke peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan, mampu meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi secara positif pada pembangunan sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Stiglitz (2020), mengurangi ketidaksetaraan merupakan langkah kritis dalam menciptakan dunia yang lebih inklusif dan stabil.

Upaya pengentasan kemiskinan juga harus berfokus pada reformasi struktural yang mendukung distribusi sumber daya yang lebih adil. Dalam konteks global, negara-negara harus bekerja sama untuk memastikan bahwa negara berkembang mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Program-program sosial seperti akses pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan perlindungan sosial harus menjadi bagian dari kebijakan untuk meminimalkan ketimpangan. Ketika ketimpangan berkurang, masyarakat dapat menjadi lebih produktif dan inovatif, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas ekonomi global. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan tidak hanya berdampak positif bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas global.

2. Solusi Teknologi

Teknologi memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Inovasi teknologi dapat mempercepat solusi untuk masalah yang sebelumnya sulit diatasi. Berikut beberapa solusinya:

a. Teknologi Energi Terbarukan

Teknologi energi terbarukan telah menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan global terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kebutuhan energi dan dampak negatif dari penggunaan energi fosil, energi terbarukan menawarkan alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sumber energi seperti solar, angin, dan biomassa tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang tidak terbarukan. Penerapan teknologi ini berpotensi meningkatkan akses energi di daerah terpencil, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. "Energi terbarukan tidak hanya mengurangi dampak perubahan iklim tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan" (IRENA, 2020). Dengan dukungan kebijakan dan investasi yang tepat, transisi ke energi terbarukan dapat diwujudkan.

Pada konteks pembangunan berkelanjutan, teknologi energi terbarukan juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Sektor energi terbarukan diperkirakan akan menciptakan jutaan pekerjaan dalam berbagai bidang, termasuk produksi, instalasi, dan pemeliharaan teknologi ini. Selain itu, inovasi dalam teknologi penyimpanan energi memungkinkan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang lebih efisien. Hal ini akan memperkuat ketahanan energi dan mendukung stabilitas harga energi. Di banyak negara, investasi dalam energi terbarukan telah menunjukkan potensi untuk mengurangi biaya energi dalam jangka panjang. Dengan demikian, investasi yang berkelanjutan dalam teknologi ini akan berdampak positif bagi perekonomian global.

b. Inovasi Pertanian Berkelanjutan

Inovasi pertanian berkelanjutan merupakan solusi penting dalam menghadapi tantangan global terhadap pembangunan berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan tidak hanya fokus pada

peningkatan hasil panen, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari praktik pertanian. Dengan penerapan teknologi seperti pertanian presisi, penggunaan sensor, dan pengelolaan data, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah. Selain itu, inovasi dalam pemuliaan tanaman dan pengendalian hama yang ramah lingkungan membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap perubahan iklim. Menurut Godfray dan others (2019), "Inovasi pertanian berkelanjutan dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan ketahanan pangan global." Oleh karena itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan pertanian berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Inovasi pertanian berkelanjutan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan komunitas lokal. Dengan penerapan teknik pertanian yang lebih efisien, petani dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan. Sistem pertanian organik dan agroforestry menjadi semakin populer karena tidak hanya menghasilkan produk yang lebih sehat tetapi juga meningkatkan keanekaragaman hayati. Praktik ini membantu membangun ketahanan ekonomi dan sosial di tingkat komunitas. Melalui pelatihan dan akses kepada teknologi baru, petani kecil dapat diberdayakan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan pasar yang dinamis. Pendekatan ini penting untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

c. Digitalisasi dan Smart Cities

Digitalisasi dan pengembangan smart cities merupakan solusi yang semakin penting dalam menghadapi tantangan global terhadap pembangunan berkelanjutan. Smart cities memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan publik yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan mengintegrasikan sensor, big data, dan Internet of Things (IoT), kota-kota dapat mengelola sumber daya seperti energi dan air dengan lebih efektif. Inisiatif seperti pengelolaan lalu lintas pintar dan sistem pemantauan kualitas udara dapat mengurangi kemacetan dan polusi. Menurut Deakin dan Al Waer (2020), "Digitalisasi adalah

kunci untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dan tanggap terhadap kebutuhan warga." Dengan langkah-langkah ini, smart cities dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih ambisius.

Digitalisasi berkontribusi pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui aplikasi dan platform digital, warga dapat memberikan masukan tentang layanan publik dan kebijakan kota, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan responsif. Keterlibatan ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan solusi yang inovatif. Misalnya, aplikasi yang memfasilitasi pengaduan warga tentang infrastruktur dapat membantu pemerintah kota untuk menanggapi masalah dengan lebih cepat. Dengan memanfaatkan teknologi, smart cities dapat memberdayakan warga untuk berperan aktif dalam pembangunan kota. Hal ini penting untuk membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

d. Inovasi dalam Pengelolaan Limbah dan Sumber Daya

Inovasi dalam pengelolaan limbah dan sumber daya merupakan solusi teknologi yang krusial dalam menghadapi tantangan global terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya jumlah populasi dan urbanisasi, pengelolaan limbah yang efektif menjadi semakin mendesak untuk mencegah pencemaran dan dampak lingkungan yang merugikan. Teknologi baru, seperti pengolahan limbah yang lebih efisien dan sistem daur ulang otomatis, dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, konsep ekonomi sirkular mengedepankan penggunaan kembali dan daur ulang material, yang berkontribusi pada pengurangan sumber daya alam yang terpakai. Menurut Kirchgeorg dan Stötzer (2021), "Inovasi dalam pengelolaan limbah dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk menciptakan nilai ekonomi dan lingkungan." Pendekatan ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Inovasi dalam teknologi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan teknologi cerdas, seperti *Internet of Things* (IoT), memungkinkan pemantauan dan

pengelolaan penggunaan energi dan air secara real-time. Misalnya, sistem manajemen energi yang cerdas dapat mengidentifikasi area pemborosan dan merekomendasikan tindakan untuk meningkatkan efisiensi. Di sektor pertanian, teknologi pertanian presisi memungkinkan petani untuk menggunakan input secara optimal, mengurangi limbah, dan meningkatkan hasil. Dengan mengintegrasikan teknologi ini, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan efisien. Oleh karena itu, investasi dalam inovasi teknologi di sektor ini sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

e. Teknologi Kesehatan dan Ketahanan Sosial

Teknologi kesehatan berperan penting dalam menciptakan ketahanan sosial dan menghadapi tantangan global terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam era digital, penggunaan telemedicine dan aplikasi kesehatan telah memperluas akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil dan kurang terlayani. Teknologi ini memungkinkan individu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis tanpa harus bepergian jauh, sehingga mengurangi hambatan fisik dan finansial. Selain itu, penggunaan data kesehatan besar (big data) dan analitik membantu dalam pengidentifikasian pola penyakit, yang mendukung pencegahan dan respons cepat terhadap wabah. Menurut Haldane dan others (2021), "Inovasi dalam teknologi kesehatan dapat meningkatkan ketahanan sistem kesehatan global dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat." Dengan langkah-langkah ini, kesehatan masyarakat dapat lebih terjaga dan berkontribusi pada stabilitas sosial.

Teknologi kesehatan juga berperan dalam pemberdayaan individu melalui peningkatan pengetahuan kesehatan. Dengan adanya platform informasi kesehatan yang mudah diakses, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat. Program edukasi berbasis teknologi, seperti aplikasi kesehatan dan portal informasi, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan isu kesehatan yang kritis. Misalnya, kampanye vaksinasi berbasis digital mampu menjangkau lebih banyak orang dan memberikan informasi yang akurat tentang manfaat vaksin. Keterlibatan masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan kesehatan juga semakin meningkat, berkat teknologi yang memungkinkan komunikasi dua arah antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Pendekatan ini menciptakan masyarakat yang lebih proaktif dan teredukasi dalam menjaga kesehatan.

C. Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan krisis sumber daya, peran generasi muda menjadi semakin vital dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai kelompok yang mewarisi planet ini, generasi muda tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan yang inovatif dan inspiratif. Dengan semangat kreatif dan idealisme yang tinggi, dapat berkontribusi dalam menciptakan solusi berkelanjutan, mempengaruhi kebijakan publik, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keberlanjutan demi masa depan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa peran utama generasi muda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan:

1. Kesadaran dan Pendidikan

Kesadaran dan pendidikan berperan sentral dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di kalangan generasi muda. Generasi muda adalah agen perubahan yang dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan ekonomi di sekitarnya. Pendidikan yang berkualitas dan kesadaran terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan kemiskinan sangat penting untuk membangun pemimpin masa depan. Melalui pendidikan, dapat mengembangkan keterampilan kritis yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks yang dihadapi masyarakat saat ini. Seperti yang dinyatakan oleh Jansen (2020), “Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat memberdayakan generasi muda untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi berkelanjutan.”

Kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan harus ditanamkan sejak dini. Program-program pendidikan yang

mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam kurikulum akan membantu siswa memahami dampak tindakannya terhadap lingkungan. Selain itu, pengalaman langsung melalui proyek komunitas dapat meningkatkan keterlibatan. Generasi muda yang teredukasi dan sadar akan isu-isu ini cenderung lebih proaktif dalam mengambil tindakan yang mendukung keberlanjutan. Dengan memberikan pengetahuan yang tepat, dapat menjadi penggerak perubahan di komunitas.

2. Inovasi dan Kreativitas

Inovasi dan kreativitas merupakan kunci dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya oleh generasi muda. Generasi muda memiliki potensi besar untuk mengembangkan solusi baru yang dapat mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan ketidaksetaraan sosial. Melalui pendekatan kreatif, dapat merancang metode baru yang lebih efisien dan efektif untuk penggunaan sumber daya. Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga mencakup ide-ide baru dalam bidang sosial dan ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Reddy (2022), "Inovasi yang berkelanjutan dapat membentuk masa depan yang lebih baik, di mana generasi muda berperan sebagai penggerak perubahan."

Lingkungan yang mendukung inovasi harus dibangun untuk mendorong generasi muda agar dapat mengekspresikan kreativitas. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan problem-solving. Dengan menciptakan ruang bagi eksperimen dan kolaborasi, generasi muda dapat mengembangkan produk dan layanan yang ramah lingkungan. Program-program inkubasi dan akselerator juga dapat membantunya mewujudkan ide-ide inovatif menjadi realitas. Kesempatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

3. Aktivisme dan Keterlibatan Sosial

Aktivisme dan keterlibatan sosial menjadi pilar penting bagi generasi muda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks global saat ini, generasi muda memiliki peran krusial dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan dan sosial yang mendesak. Melalui gerakan sosial, mampu membahas ketidakadilan dan memobilisasi dukungan untuk perubahan kebijakan. Keterlibatannya

dalam aksi kolektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Seperti yang dinyatakan oleh Taylor (2021), "Aktivisme yang dilakukan oleh generasi muda bukan hanya memberikan suara, tetapi juga menggerakkan tindakan konkret menuju perubahan yang berkelanjutan."

Aktivisme juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dengan berpartisipasi dalam forum-forum publik, dapat menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada para pemimpin. Hal ini memungkinkan untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi sosial atau lingkungan dapat membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerjasama. Aktivisme yang berorientasi pada komunitas memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama.

4. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan aspek krusial bagi generasi muda dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan, generasi muda dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa perspektifnya diwakili, tetapi juga memperkaya proses perencanaan dengan ide-ide inovatif. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam forum-forum pengambilan keputusan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika sosial dan kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Martinez (2023), "Partisipasi aktif generasi muda dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan mencerminkan kebutuhan dan harapan semua lapisan masyarakat."

Partisipasi generasi muda dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat legitimasi proses tersebut. Ketika suaranya diakui, ini akan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Keberadaan generasi muda dalam posisi pengambilan keputusan juga menginspirasi kelompok lain untuk terlibat, menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung keberlanjutan. Dengan pendekatan yang inklusif, dapat berkontribusi pada kebijakan yang lebih berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Keterlibatan ini tidak hanya

meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat bertahan dalam jangka panjang.

5. Kewirausahaan Berkelanjutan

Kewirausahaan berkelanjutan menjadi salah satu peran utama generasi muda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menciptakan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga ramah lingkungan dan sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam model bisnis, para wirausaha muda dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, kewirausahaan berkelanjutan juga mendorong inovasi dalam menciptakan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam. Seperti yang dinyatakan oleh Khan (2021), “Kewirausahaan berkelanjutan adalah jalan menuju masa depan di mana pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.”

Kewirausahaan berkelanjutan membuka peluang kerja yang signifikan bagi generasi muda. Dengan menciptakan usaha yang berkelanjutan, tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal tetapi juga membantu mengatasi masalah sosial, seperti pengangguran. Model bisnis yang berfokus pada keberlanjutan sering kali mendorong kolaborasi dengan komunitas dan organisasi lokal. Ini menciptakan ekosistem yang saling mendukung dan memperkuat hubungan antara bisnis dan masyarakat. Melalui inisiatif ini, generasi muda dapat menjadi pemimpin dalam perubahan sosial dan ekonomi yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2019). *Social Capital, Collective Action, and Adaptation to Climate Change*. Cambridge University Press.
- Ahmad, R. (2020). Strategi Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 12(3), 45-59.
- Al-Ansari, T., Korre, A., Nie, Z., & Shah, N. (2020). Integration of renewable energy with industrial energy systems for enhanced environmental sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 247, 119189.
- Altieri, M. A. (2021). *Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture*. CRC Press.
- Arnstein, S. R. (2020). A Ladder of Citizen Participation: Implications for Sustainable Development. *Journal of Environmental Governance*.
- Asrawi, F., Embang, A. E., & Bakar, M. (2018). Analysis of Determinants of Economic Growth in Central Kalimantan Province. *Journal Magister Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya: GROWTH*, 4(2), 2-16.
- Bair, J., & Gereffi, G. (2020). *The Emergence of Global Value Chains: A New Approach to Understanding Globalization*. Stanford University Press.
- Barbier, E. B. (2019). "Economics of the Green Economy: Sustainable Development through an Economic Lens." *Environmental Science & Policy*, 101, 1-9.
- Bassey, C. (2021). The Role of Carbon Emission Reduction in Sustainable Development. *Journal of Environmental Sustainability*, 12(3), 45-56.
- Benayas, J., Bullock, J. M., Kull, C. A., & Newton, A. C. (2020). Restoration Ecology: The Key to Sustainable Development. *Nature Sustainability*, 3(1), 59-69.
- Bocken, N. M. P., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2019). A literature and practice review to develop a sustainable business model archetype. *Journal of Cleaner Production*, 213, 188-201.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Hannikainen, I. (2018). *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press.

- Buse, K., *et al.* (2018). Monitoring and Evaluation of Health Programs: A Practical Guide. *Health Policy and Planning*, 33(5), 605-617.
- Castells, M. (2020). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Cernic, J. (2020). Capacity Building for Effective Multilateral Cooperation. *International Journal of Public Policy*, 16(3), 123-145.
- Cohn, A. (2022). Dependency Theory and Economic Relations. *Journal of Global Development*, 34(2), 112-128.
- Collier, P. (2018). *The Future of Capitalism: Facing the New Anxieties*. HarperCollins.
- Cornwall, A. (2019). *Disputing Development: The Politics of Participation*. Routledge.
- Creutzig, F., *et al.* (2018). Global strategies for limiting warming to 1.5 °C. *Nature Climate Change*, 8(1), 1-9.
- De Schutter, O. (2019). Integrated Planning for Sustainable Development: A Multilateral Perspective. *Journal of International Development*, 31(6), 901-916.
- Deakin, M., & Al Waer, H. (2020). "From Smart City to Smart Citizen: The Role of Digital Technologies in Urban Sustainability." *Sustainability*, 12(15), 6284.
- Dempsey, N., *et al.* (2021). "Sustainability and Economic Growth: Finding the Balance." *Journal of Environmental Management*, 258, 110125.
- Díaz, S., *et al.* (2019). "Pervasive Human-Driven Declines of Life on Earth Points to the Need for Transformative Change." *Nature Ecology & Evolution*, 3(12), 1451-1466.
- Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E. S., Ngo, H. T., K. P. A., & M. D. (2019). Pervasive Human Impacts on Biodiversity and Ecosystem Functioning Across Trophic Levels. *Nature Ecology & Evolution*, 3(1), 30-41.
- Dos Santos, T. (2020). *Dependency and Development in Latin America*.
- Duflo, E. (2020). *Building Local Capacity: A Pathway to Economic Resilience*. *Journal of Economic Perspectives*.
- Duflo, E. (2020). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Elkington, J. (2018). *The Zeronauts: Breaking the Sustainability Barrier*. London: Routledge.
- Ellen MacArthur Foundation. (2020). *The Circular Economy: A Wealth of Opportunities*.
- Escobar, A. (2020). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton University Press.

- Fadli, M. (2020). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 45-60.
- FAO. (2021). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fatawi, I., & Adawiyah, N. (2022). Strengthening Social and Economic Institutions for Sustainable Community Development. *Journal of Sustainable Development*, 15(3), 67-82.
- Fathoni, A. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Figueroa, M. (2021). *Public Participation and Access to Information in Sustainable Development*. Routledge.
- Frank, A. G. (2019). *ReOrient: Global Economy in the Asian Age*. University of California Press.
- Freudenberg, N., & Pastor, M. (2020). *Just Distribution in Public Administration: Building Sustainable and Inclusive Communities*.
- Garcia, L., & Bowman, R. (2021). *Financing the Future: Sustainable Development Challenges and Financial Solutions*.
- Geels, F. W. (2019). Sustainable Innovation and System Transitions: Key Strategies for Green Growth. *Environmental Policy Journal*.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2018). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757-768.
- Gerschenkron, A. (2019). *Economic Backwardness in Historical Perspective*. Harvard University Press.
- Ghemawat, P. (2019). *The New Global Road Map: Enduring Strategies for Turbulent Times*. Harvard Business Review Press.
- Gichoya, D. (2021). The role of ICT in sustainable development: A critical review. *Sustainable Development*, 29(5), 949-958.
- Giddens, A. (2019). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.
- Godfray, H. C. J., *et al.* (2019). "Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People." *Science*, 327(5967), 812-818.
- Gupta, A., & Rani, S. (2019). "Inequality in Access to Basic Services: A Global Perspective." *World Development*, 122, 1-13.
- Gupta, A., Verma, P., & Kaushik, P. (2021). Environmental degradation: Causes and consequences. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(34), 46842-46857.

- Haines, A., *et al.* (2020). "Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: Overview and implications for policy." *The Lancet*, 395(10229), 1317-1327.
- Haldane, V., *et al.* (2021). "Scaling up Digital Health: A Blueprint for Improving Access and Health Outcomes." *Health Policy and Planning*, 36(1), 49-55.
- Hall, M. (2019). *Sustainable Development: Principles and Practices*. Oxford University Press.
- Handoko, T. (2021). *Ketahanan Pangan dan Krisis Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Alam Raya Press.
- Hens, L., *et al.* (2020). *Environmental Sustainability and Development: Key Principles*. Springer.
- Hidayat, R. (2019). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 4(2), 123-135.
- Hossain, M. (2019). Sustainable Development Policy and Governance: The Role of the State. *Journal of Environmental Management*, 230, 22-30.
- Hossain, M. (2021). Sustainable Economic Development and Social Inequality. *Journal of Economic Perspectives*, 35(2), 123-138.
- ILO. (2021). *World Employment and Social Outlook 2021: Trends 2021*. International Labour Organization.
- Inglehart, R., & Welzel, C. (2018). *The World Values Survey: A Global Perspective on Modernization and Development*. Cambridge University Press.
- IPBES. (2019). *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
- IRENA. (2020). *Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020*. International Renewable Energy Agency.
- Iskandar, A. (2021). Energi Terbarukan dan Kemandirian Energi di Indonesia. *Jurnal Energi dan Lingkungan*, 15(2), 78-89.
- Jansen, J. (2020). The Role of Education in Sustainable Development. *Journal of Sustainability*, 12(4), 1204-1220.
- Jaramillo, J. (2022). *Urbanization and Its Implications for Development: A Global Perspective*. Routledge.
- Jigsaw. (2021). "The Impact of Digitalization on Global Inequality." *International Journal of Information Management*, 58, 102-110.

- Johnson, P. (2020). *Technological Innovations and Sustainable Development: Bridging the Gap Between Potential and Practice*.
- Junaidi, A. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Kahn, M. E. (2020). *Green Transportation: The Key to Sustainable Cities*. Cambridge University Press.
- Kauffman, J., & Toth, L. (2020). Community Engagement in Environmental Governance: The Role of Participatory Processes. *Environmental Management*, 65(3), 371-385.
- Kauffman, M. (2021). *Public Participation and Sustainable Development: A Comprehensive Guide*. Routledge.
- Kaza, S., Yadav, A., & Kumar, A. (2022). Circular economy: Concept, applications, and challenges. *Journal of Cleaner Production*, 350, 131563.
- Khan, S. (2021). Sustainable Entrepreneurship: Driving Economic Growth and Environmental Stewardship. *Journal of Business and Sustainability*, 10(2), 88-104.
- Kharas, H. (2019). *The Role of Renewable Energy in Sustainable Development*. Brookings Institution.
- Khoshroo, A. (2020). The Role of Sustainable Infrastructure in Global Development. *Sustainable Cities and Society*, 53, 101898.
- Kim, H. J., Lee, K. H., & Park, S. J. (2020). "Community Engagement in Sustainable Development: The Role of Participatory Decision Making." *Sustainable Development*, 28(5), 1131-1140.
- Kirchgeorg, M., & Stötzer, M. (2021). "Waste Management Innovations: Turning Challenges into Economic and Environmental Opportunities." *Journal of Cleaner Production*, 285, 124778.
- Koutouan, A. (2021). Economic Independence as a Prerequisite for Resilience and Sustainability in Integrated Economic Systems. *Journal of Sustainable Development*.
- Kuhlman, T., & Farrington, J. (2020). Social Inclusion in Green Economy: The Pathway to Sustainable Development. *Journal of Sustainable Development*, 13(4), 55-70.
- Kurniasih, N. (2020). Pendidikan Inklusif dan Ketimpangan Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 45-58.
- Kurniawan, D. (2020). Konservasi Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 5(2), 101-115.

- Kurniawan, R. (2021). Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan*, 22(3), 112-125.
- Ladd, H. F. (2020). Education and inequality: The relationship between education access and social inequality in developing countries. *Journal of Economic Perspectives*, 34(2), 243-258.
- Leal Filho, W. (2020). The Role of Diplomacy in the Promotion of Sustainable Development. *Journal of International Relations and Development*, 23(2), 245-263.
- Leal Filho, W., *et al.* (2019). Education for Sustainable Development: A Global Perspective. *Sustainability*, 11(23), 6602.
- Lehtonen, M. (2020). "Sustainable Development and the Role of Society." *Sustainability Science*, 15(5), 1245-1260.
- Lipset, S. M. (2018). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *American Political Science Review*.
- Lutz, M., & Fletcher, J. (2020). Sustainable Resource Management and Environmental Challenges.
- Martinez, A. (2023). Youth Participation in Decision-Making for Sustainable Development: A Global Perspective. *Journal of Sustainable Development*, 18(1), 45-62.
- Martinez-Alier, J. (2020). *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation*. New York: Routledge.
- Mazzucato, A. (2018). Innovation and Inclusive Growth: A New Framework. *Journal of Global Policy*, 4(1), 25-42.
- McKenzie, J. (2021). Sustainable Local Economic Development: Empowering Communities for a Resilient Future. *Journal of Community Economics*, 8(2), 34-50.
- Meckling, J., Allan, G., & Denny, K. (2019). The Role of Public Policy in Promoting Sustainable Development. *Environmental Politics*, 28(4), 763-782.
- Mistral, F. (2019). Structural Dependency and Global Inequality. *Journal of International Relations*, 27(1), 33-50.
- Moyo, D. (2020). Resource Exploitation and Economic Dependency. *African Economic Review*, 32(1), 45-60.
- Nugroho, E. (2019). *Pengalihan Polusi Antarnegara dan Dampaknya terhadap Lingkungan*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Nurbaiti, H. (2020). Fair Public Policy as an Instrument for Social Equality. *Journal of Public Policy Studies*, 5(1), 47-62.

- Nursanti, R. (2020). Pengembangan Kebudayaan Berkelanjutan dalam Pembangunan Sosial. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Ocampo, J. A. (2020). Social Justice and Sustainable Development: A New Paradigm. Cambridge University Press.
- Ockwell, D., *et al.* (2018). "Sustainable Innovation: The Role of Technologies in Addressing Climate Change." *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 29, 62-74.
- Ostrom, E. (2019). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action in Natural Resource Management. *Sustainability Policy Review*.
- Oxfam. (2019). Public good or private wealth? Oxfam Inequality Report, 2019, 1-20.
- Pahlawan, A. (2020). Sosiologi dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Pappas, A., Satyamurthy, K., & de Jong, M. (2021). Circular economy and renewable resources: A review of the literature. *Resources, Conservation and Recycling*, 169, 105525.
- Piketty, T. (2020). *Capital and Ideology*. Harvard University Press.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2019). Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism—and Unleash a Wave of Innovation and Growth. *Harvard Business Review*.
- Prabowo, H. (2023). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 11(3), 95-108.
- Prasetyo, B. (2020). Pengelolaan Sampah sebagai Solusi Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, 11(4), 112-120.
- Pratiwi, D. (2022). Kebijakan dan Regulasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 88-102.
- Purnamasari, D. (2023). Equitable Access to Health Services as a Key to Social Development. *International Journal of Health Policy and Management*, 12(4), 215-224.
- Putnam, R. D. (2019). *The Upswing: How America Came Together a Century Ago and How We Can Do It Again*. Simon & Schuster.
- Putra, A. (2020). Ketimpangan Digital di Era Teknologi Modern. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 6(3), 88-96.
- Rachmawati, A. (2022). Analisis Kesejahteraan Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan. Surabaya: Penerbit Universitas.

- Rahardja, E. (2019). *Ekonomi Indonesia dan Ketimpangan Sosial: Sebuah Analisis*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Rahardjo, S. (2021). *Dampak Globalisasi Terhadap Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahman, S. (2019). Peran Masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Ekologi dan Lingkungan*, 8(2), 113-121.
- Rahmawati, N. (2022). Peran Pengelolaan Sampah dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 9(1), 45-55.
- Raworth, K. (2018). *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*.
- Reddy, S. (2022). Sustainable Innovation for a Better Future: The Role of Youth. *Journal of Innovation and Sustainability*, 15(3), 45-58.
- Reed, M. S. (2020). *Participatory Research and Stakeholder Engagement for Sustainable Development*. Earthscan.
- Roberts, B., & Jones, T. (2019). *Resource Efficiency and Sustainable Development: Strategies for a Green Economy*. Routledge.
- Rodrik, D. (2018). *Straight talk on trade: Ideas for a sane world economy*. Princeton University Press.
- Rojas, C. (2021). Community Participation and Sustainable Development: A Framework for Action. *Journal of Sustainable Development*, 14(2), 55-67.
- Rueda, S. (2022). Global Economic Structure Reform: Toward Justice and Sustainability for Developing Countries. *Journal of International Development*.
- Sachs, J. D. (2019). *The Age of Sustainable Development*. Columbia University Press.
- Santoso, B. (2021). Dampak Transformasi Teknologi terhadap Dunia Kerja. *Jurnal Teknologi dan Sosial*, 8(1), 45-54.
- Sari, A. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(2), 67-78.
- Sen, A. (2019). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Sen, A. (2019). The Importance of Reducing Social Inequality for Sustainable Development. *Journal of Social Justice*, 12(1), 24-35.
- Sen, A. (2020). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Setiawan, A. (2019). Community Participation in Development: Key to Sustainable Solutions. *Journal of Social Development*, 8(2), 101-115.

- Setiawan, J. (2023). Pemantauan dan Evaluasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. *Jurnal Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, 8(1), 67-80.
- Singh, A., & Choudhury, B. (2019). *Climate Change and Sustainable Development: Global Challenges and Solutions*.
- Sovacool, B. K. (2018). The Political Economy of Energy Transitions: A Case Study of Energy and Climate Policy in the United States. *Energy Policy*, 123, 224-235.
- Steffen, W. (2020). Green Economy and Global Climate Adaptation. *Earth Policy Review*.
- Stiglitz, J. E. (2019). Economic Growth and Social Inclusion: The Challenge Ahead. In *The Economics of Social Inclusion*. Springer.
- Suharto, R. (2020). Pengangguran dan Tantangan Lapangan Kerja di Indonesia. Jakarta: Mitra Pustaka.
- Sunkel, O. (2021). Social Injustice and Economic Dependency: A Global Perspective. *Latin American Perspectives*, 48(4), 78-92.
- Supriyadi, A. (2021). Peran Penelitian dan Evaluasi dalam Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Penerbit Universitas.
- Surya, M. (2019). Strategi Pembangunan Energi Terbarukan untuk Keberlanjutan. *Jurnal Kebijakan Energi*, 10(1), 34-47.
- Susanto, R. (2021). Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Sumber Daya Alam*, 6(1), 45-58.
- Sweeney, R., Spurling, T., & Silva, S. (2021). Driving the transition to a circular economy through collaboration and partnerships. *Journal of Cleaner Production*, 295, 126375.
- Tampubolon, D. (2021). *Ketimpangan Infrastruktur di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Nusantara Press.
- Taufiq, M., Hasan, I., & Andriani, R. (2020). "Environmental Awareness as a Foundation for Sustainable Resource Management." *Environmental Science & Policy*, 114, 123-130.
- Taylor, M. (2021). Youth Activism and Sustainable Development Goals: A Global Perspective. *Journal of Social Change*, 12(2), 134-150.
- Tilly, C. (2019). *Democracy*. Cambridge University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson.
- Tschang, F. T. (2021). Innovation and Technology in International Collaboration: Opportunities and Challenges. *Global Policy Journal*, 12(2), 230-240.

- Tufekci, Z., & Majeed, A. (2021). Active Participation in Decision-Making: A Pathway to Sustainable Community Development. *Journal of Community Empowerment*, 10(1), 45-58.
- UN Water. (2020). *The United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change*. United Nations.
- UNESCO. (2019). *Education for Sustainable Development: Goals and Targets*.
- Wallerstein, I. (2018). *World-Systems Analysis: An Introduction*. Duke University Press.
- WHO. (2021). *Climate Change and Health: A WHO Perspective*. World Health Organization.
- Wicaksono, A. (2020). *Urbanisasi dan Tantangan Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widianto, A. (2022). *Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2019). Key competencies in sustainability: A reference framework for academic program development. *Sustainability Science*, 14(1), 203-218.
- Wong, T., Smith, A., & Jones, K. (2020). Empowering Communities through Capacity Building for Sustainable Development. *Journal of Community Development*, 45(2), 113-127.
- Wulandari, D. (2019). Dampak Teknologi terhadap Perubahan Pola Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Digital*, 5(2), 102-110.
- Young, O. R. (2020). The Legitimacy of Global Governance Institutions: A Comparative Analysis. *Global Governance*, 26(1), 1-18.
- Zeng, X., Yang, C., Chiang, J. F., & Li, J. (2019). Innovating e-waste management: From macro to micro scale. *Science of The Total Environment*, 702(15), 135-155.
- Zhou, Y. (2019). Resource Efficiency as a Principle of Green Economy for Sustainable Development. *International Journal of Sustainable Development*, 16(2), 102-114.
- Zubair, M., Rahman, M., & Ahmed, K. (2021). "Empowerment and Education: Key Drivers for Sustainable Social Change." *Journal of Sustainable Development*, 14(2), 45-60.

GLOSARIUM

- Alam:** Seluruh lingkungan hidup yang mencakup ekosistem, baik tanah, air, udara, maupun makhluk hidup yang menopang kehidupan dan menjadi landasan utama pembangunan berkelanjutan.
- Adil:** Prinsip yang menekankan distribusi sumber daya secara merata dan perlakuan yang seimbang terhadap semua golongan masyarakat dalam proses pembangunan agar tidak ada yang dirugikan.
- Asri:** Kondisi lingkungan yang bersih, hijau, dan terjaga keindahannya, mencerminkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam serta keberhasilan dalam menjaga ekosistem.
- Daya:** Kapasitas atau kemampuan suatu sistem, baik masyarakat maupun alam, dalam mendukung kebutuhan pembangunan berkelanjutan secara terus-menerus tanpa mengalami kerusakan.
- Hijau:** Konsep pembangunan yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi jejak karbon, mengelola limbah, dan melestarikan sumber daya alam.
- Cakup:** Kemampuan pembangunan dalam menjangkau dan melibatkan semua lapisan masyarakat secara inklusif, tanpa ada yang tertinggal, demi keadilan sosial.
- Lest:** Upaya untuk mempertahankan keberlangsungan ekosistem dan sumber daya alam agar tetap tersedia bagi generasi sekarang dan masa depan

- Pahit:** Realitas sosial yang tidak mengenakan atau pengorbanan yang terkadang harus dihadapi dalam proses pembangunan, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun budaya.
- Sehat:** Tujuan dari pembangunan yang menciptakan kondisi yang baik untuk manusia dan lingkungan, mencakup kesehatan fisik, mental, dan ekosistem.
- Urban:** Berkaitan dengan wilayah perkotaan yang sering kali menghadapi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan, seperti kepadatan penduduk, polusi, dan kebutuhan infrastruktur.

INDEKS

- A**
aksesibilitas, 60, 147, 148, 176
- B**
big data, 184, 186
- D**
digitalisasi, 64, 147, 185
disparitas, 146
distribusi, 5, 21, 23, 30, 32, 37,
38, 42, 44, 46, 47, 59, 63, 71,
75, 86, 92, 95, 101, 112, 113,
116, 134, 145, 146, 148, 157,
160, 172, 182, 201
domestik, 21, 34, 35, 101
- E**
e-commerce, 139
ekonomi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124,
129, 130, 131, 132, 133, 134,
137, 138, 139, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 175, 177, 178, 179, 180,
182, 183, 184, 185, 187, 188,
190, 202
emisi, 3, 4, 8, 11, 53, 56, 58,
59, 73, 79, 91, 98, 103, 108,
109, 128, 129, 132, 135, 136,
142, 143, 144, 150, 151, 154,
155, 162, 167, 168, 176, 183
etnis, 40

F

finansial, 12, 57, 64, 72, 73,
103, 153, 158, 186
fiskal, 71, 168
fluktuasi, 34, 37, 47, 71, 92, 94,
158
fundamental, 44, 62, 76, 78,
120

G

geografis, 27, 40, 91, 99, 139,
158
globalisasi, 23, 43, 45, 48, 49,
99, 101, 102, 106, 107, 108,
109, 110, 180

I

implikasi, 33, 35, 41, 91, 94
infrastruktur, 3, 6, 24, 26, 28,
35, 36, 41, 43, 46, 47, 49, 60,
63, 69, 72, 73, 74, 93, 94,
101, 104, 109, 114, 129, 136,
142, 146, 147, 150, 155, 158,
159, 160, 164, 171, 180, 185,
202
inklusif, 1, 5, 6, 7, 10, 13, 16,
21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 34,
36, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 50,
52, 53, 71, 75, 76, 78, 80, 82,

83, 84, 85, 90, 101, 104, 107,
111, 112, 114, 116, 117, 118,
119, 120, 122, 123, 124, 125,
129, 146, 149, 153, 158, 159,
163, 165, 167, 170, 172, 173,
178, 180, 181, 182, 184, 187,
189, 201

inovatif, 4, 44, 51, 64, 66, 68,
72, 98, 115, 128, 129, 131,
134, 141, 149, 163, 165, 169,
175, 180, 182, 185, 187, 188,
189

integrasi, 2, 7, 8, 27, 51, 56, 60,
63, 88, 99, 100, 107, 127,
129, 174

interaktif, 134

investasi, 8, 21, 24, 26, 33, 35,
43, 45, 46, 47, 49, 53, 56, 58,
60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 98,
99, 104, 107, 108, 114, 117,
128, 134, 136, 142, 144, 147,
148, 155, 163, 164, 167, 168,
177, 178, 183, 184, 186

investor, 27, 104

K

kolaborasi, 5, 12, 15, 38, 44,
57, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 82,
84, 85, 86, 89, 90, 91, 103,

104, 118, 127, 131, 134, 144,
149, 150, 151, 153, 154, 156,
158, 165, 168, 171, 172, 173,
174, 175, 179, 180, 182, 185,
188, 190

komprehensif, 8, 15, 45, 82, 91,
93, 117, 150, 167, 170

konkret, 11, 103, 154, 189

M

manufaktur, 136

metodologi, 91

N

negosiasi, 170

O

otoritas, 138

P

politik, 13, 19, 20, 22, 23, 25,
29, 31, 33, 37, 39, 40, 45, 46,
47, 48, 50, 70, 71, 86, 99,
115, 178

R

rasional, 20

real-time, 186

regulasi, 32, 69, 70, 90, 104,
109, 110, 132, 144, 154, 156,
164, 168, 169, 176, 178

relevansi, 178

S

stabilitas, 14, 22, 31, 34, 37, 39,
71, 78, 85, 95, 97, 105, 111,
118, 142, 149, 158, 161, 168,
182, 183, 186

stakeholder, 16, 165, 169, 170,
179

stigma, 119, 122

sustainability, 191, 193, 200

T

transformasi, 19, 20, 21, 22, 25,
28, 29, 30, 48, 49, 50, 73,
100, 137

transparansi, 6, 8, 14, 18, 77,
80, 85, 89, 125, 130, 165,
166

U

universal, 28, 182

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Andrie Elia Embang, SE, M. Si

Lahir Banjarmasin, 12 Agustus 1959. Lulusan S3 ilmu Sosial di Universitas Merdeka Malang tahun 2011, saat ini sebagai Dosen Pada Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Palangkaraya. Prof. Dr. Andrie Elia, S.E., M.Si. (lahir 12 Agustus 1959) adalah akademisi Kalimantan Tengah yang menjabat sebagai Rektor Universitas Palangka Raya periode 2018–2022 serta tokoh adat Kalimantan Tengah. Beliau pernah menjabat di beberapa organisasi seperti Ketua KAGAMA Kalimantan Tengah, Ketua Harian DAD Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2026, Ketua Forum Intelektual Dayak Nasional Kalimantan Tengah, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Palangka Raya, dan Anggota dewan riset daerah provinsi kalteng 2009-2013.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN TANTANGAN GLOBAL

Buku referensi “Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Sosiologi dan Tantangan Global” ini membahas pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang sosiologi, menghubungkan konsep-konsep sosial dengan isu-isu global yang mendesak. Melalui perspektif sosiologis, buku referensi ini membahas pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan, serta menggarisbawahi dampak pembangunan yang tidak terencana terhadap masyarakat dan ekosistem. Buku referensi ini juga membahas berbagai tantangan global yang timbul akibat perkembangan industri dan urbanisasi, termasuk perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial serta membahas aspek-aspek penting seperti keadilan sosial, kebijakan lingkungan, dan masyarakat peran dalam mendukung kemiskinan.



 mediapenerbitindonesia.com

 +6281362150605

 Penerbit Idn

 @pt.mediapenerbitidn

ISBN 978-634-7012-52-4



9 786347 012524